

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Maret 2017

Melanjutkan perubahan



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Melanjutkan perubahan

Maret 2017

Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop, *Practice Manager*, dan Hans Beck, *Acting Lead Economist*. Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim inti terdiri dari Magda Adriani, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Derek H.C. Chen, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Taufik Ramadhan Indrakesuma, Jonathan William Lain, Yus Medina, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al Rikabi, Dhruv Sharma, dan Kelly Wyett. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Jerry Kurniawan, GB Surya Ningnagara, Kurniasih Suditomo, Nugroho Sunjoyo, dan Suryo Utomo Tomi. Ucapan terima kasih untuk Leela Raina, Taufik Ramadhan Indrakesuma, Edgar Janz, dan Nathaniel Adams atas bantuannya dalam pengecekan laporan ini.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Irfan Mujahid, Massimiliano Cali, Titik Anas dan Robertus Herdiyanto (Bagian B.1, Kebijakan perdagangan jasa); Michael Steidl berdasarkan kebijakan yang ditulis oleh Wolfram Hiemann, dengan dukungan dari Cynthia Clarita Kusharto (Bagian B.2, KUR), Hamidah Alatas, Ratih Dwi Rahmadanti, Daim Syukriyah, Bagus Arya Wirapati untuk kontribusi data mereka (Lampiran: Indikator sosial). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Tatiana Nenova (*Program Leader, EACIF*), Nikola L. Spatafora (*Lead Economist, EAPCE*), Ekaterine T. Vashakmadze (*Senior Country Economist, DECPG*), Christopher Juan Costain (*Lead Financial Sector Specialist*), Amanda Robbins dan David Nellor (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction dan Development Bank Dunia*, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs dan Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo di bagian sampul depan dan Ringkasan Eksekutif cover dan Executive merupakan Hak Cipta MDTF dan photo di bagian A dan B merupakan Hak Cipta Arsianti dan Kelly Wyett. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org.

Singkatan

Askrindo	Asuransi Kredit Indonesia
BI	Bank Indonesia
BOP	Balance of Payments/ Neraca pembayaran
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CAR	Capital Adequacy Ratio/Rasio kecukupan kapital
CEIC	Census dan Economic Information Center
CGC	Credit Guarantee Companies/Perusahaan penjamin kredit
CMEA	Coordinating Ministry for Economic Affairs/Kemenko perekonomian
CPI	Consumer Price Index/IHK-Indeks Harga Konsumen
CPO	Crude Palm Oil/Minyak Kelapa Sawit
DAU	Dana Alokasi Umum
EMCI	Emerging Market Currency Index
EMDE	Emergency dan Developing Economies
DGT	Directorate General of Tax/Direktur Jenderal Pajak
FDI	Foreign Direct Investment/Investasi asing langsung
GDP	Gross Domestic Per capita/PDB
GGDC	Groningen Growth Development Center
GoI	Government of Indonesia/Pemerintah Indonesia
IEQ	Indonesia Economic Quarterly/Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia
IHGS	Indeks Harga Saham Gabungan
IO	Input output
Jamkrindo	Jaminan Kredit Indonesia
JCI	Jakarta Composite Index
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LFPR	Labor Force Participation Rate/Angka partisipasi tenaga kerja
LHS	Left hand side/sebelah kiri
LNG	Liquefied natural gas
MoF	Ministry of Finance/Kementerian Keuangan
MSME	Micro, Small and Medium Sized Enterprises/UMKM-Usaha Mikro Kecil Menengah
NPL	Non-Performing Loan/kredit bermasalah
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries/Organisasi negara pengekspor minyak
PINA	Pembiayaan Investasi Non Anggaran
PMI	Purchasing Manager's Index/Indeks Pembelian Manager
PMN	Penyertaan Modal Negara
PPP	Public Private Partnership/kemitraan pemerintah dan swasta
PT	Perusahaan Terbatas
RHS	Right hand side/sebelah kanan)
RPJM-N	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKERNAS	Survey Angkatan Kerja Nasional
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SME	Small Medium Enterprises/UKM-Usaha Kecil Menengah
SOE	State Owned Enterprises/BUMN
SPV	Special Purpose Vehicles/kendaraan untuk tujuan khusus
STRI	Services Trade Restrictiveness Index
SUN	Surat Utang Negara
Susenas	Survey Sosial Ekonomi Nasional
Taspen	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TKI	Tenaga Kerja Indonesia

TOT	Term-of-Trade/Nila Tukar perdagangan
VAT	Value Added Tax/Pajak nilai tambahan
VIX	Volatility Indeks/Indeks volatilitas
yoy	Year-on-year/tahun-ke-tahun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	C
SINGKATAN	D
DAFTAR ISI.....	F
RINGKASAN EKSEKUTIF: MELANJUTKAN PERUBAHAN	I
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....	1
1. Perekonomian global memiliki pijakan yang kuat pada tahun 2017	1
2. Pertumbuhan PDB menguat di tahun 2016	3
3. Peningkatan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered prices) menjadi pendorong utama inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2017	4
4. Harga komoditas dan sektor eksternal.....	6
5. Kondisi keuangan makro dalam negeri yang kuat.....	16
6. Kebijakan fiskal nampaknya menjanjikan di tahun 2017, reformasi diperkirakan akan berlanjut..	18
7. Tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan upah riil yang meningkat mendanakan periode pasar tenaga kerja yang ketat, namun kecepatan formalisasi telah melambat.....	25
8. Kemiskinan dan ketimpangan terus menurun	27
9. Prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko	29
B. TOPIK FOKUS.....	32
1. Mengupayakan kebijakan perdagangan jasa yang tepat untuk pembangunan Indonesia	32
a. Pandangan umum perdagangan jasa Indonesia	33
b. Pembatasan perdagangan dan produktivitas jasa Indonesia	35
c. Mengurangi hambatan perdagangan jasa untuk kepentingan perekonomian	37
2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Baru.....	41
a. Program KUR telah menjadi kebijakan utama Pemerintah untuk mendukung usaha kecil	41
b. Program KUR telah berubah dari program penjaminan kredit parsial menjadi program pinjaman dengan bunga bersubsidi	42
c. Pengaturan biaya jaminan kredit yang baru mencerminkan suatu pendekatan berorientasi pasar.....	45
d. Subsidi suku bunga tidak dianggap sebagai praktek terbaik di dalam pembiayaan UMKM.....	45
e. Kesimpulan dan saran	46
REFERENSI.....	48
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Pasar keuangan global memasuki tahun 2017 dengan kondisi yang tidak bergejolak	1
Gambar 2: Pertumbuhan PDB global diproyeksikan meningkat di tahun 2017, meskipun dibayangi ketidakpastian kebijakan global.....	2
Gambar 3: Indeks Manajer Pembelian: Negara-negara dengan perekonomian kuat memasuki tahun 2017 dengan pijakan yang mantap	2
Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil: Belanja Pemerintah terus berkontraksi di Triwulan ke-4 .	3
Gambar 5: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB meningkat di triwulan ke-4	4
Gambar 6: Pertumbuhan PDB melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam lima tahun ini	4
Gambar 7: Inflasi IHK meningkat di awal 2017, terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik	5
Gambar 8: Kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah kemungkinan akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di tahun 2017, namun secara perlahan menurun di tahun 2018	5
Gambar 9: Indikator-indikator utama untuk konsumsi tetap stabil.....	6
Gambar 10: ... sementara indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama menunjukkan pemulihan.....	6
Gambar 11: Harga global untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia sebagian besar naik di tahun 2016	7
Gambar 12: Selain minyak mentah dan LNG, harga global untuk komoditas ekspor utama Indonesia sudah melebihi perkiraan Bank Dunia	7
Gambar 13: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih menunjukkan kejutan positif nilai tukar perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak Juli 2016	8
Gambar 14: Neraca perdagangan mencatat surplus pada tahun 2016, didorong oleh arus masuk modal yang kuat dan defisit transaksi berjalan yang turun ke level terendah selama 5 tahun ini.....	10
Gambar 15: Neraca perdagangan tetap surplus di Triwulan ke-4 didorong oleh penurunan tajam dalam defisit transaksi berjalan.....	10
Gambar 16: Nilai ekspor barang meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2011... ..	10
Gambar 17: ...demikian pula halnya dengan nilai impor barang	10
Gambar 18: Investor internasional menjual saham dan obligasi Indonesia di bulan November 2016	11
Gambar 19: Arus masuk dalam aset mata uang dan deposito sektor swasta yang sangat tinggi di Triwulan ke-4.....	11
Gambar 20: Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Inggris menurun sebagai bagian dari total ekspor	13
Gambar 21: Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia.....	13
Gambar 22: Inggris merupakan sumber FDI yang penting di Indonesia.....	14
Gambar 23: Indonesia kurang bergantung pada FDI dari Amerika Serikat dan Inggris dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan	14
Gambar 24: Mayoritas hutang luar negeri Indonesia adalah dalam mata uang USD	14
Gambar 25: Spread (selisih antar harga jual dan harga beli) obligasi meningkat di Indonesia segera setelah terjadinya referendum di Inggris dan pemilu di AS, namun pulih kembali dengan cepat.....	15
Gambar 26: Harga ekuitas juga turun, sebelum sebagian besar kerugian yang diakibatkannya pulih	15
Gambar 27: Rupiah mengawali tahun 2017 dengan langkah yang mantap	16
Gambar 28: IHSG memasuki tahun 2017 dengan awal yang mantap	17

Gambar 29: Imbal hasil obligasi menurun di tahun 2017 mencerminkan kepercayaan investor di Indonesia	17
Gambar 30: Pertumbuhan deposito terus meningkat.....	17
Gambar 31: Suku bunga kredit konsumsi tetap bertahan sedangkan biaya modal kerja telah menurun tajam.....	18
Gambar 32: Sistem perbankan Indonesia tetap sehat meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah.....	18
Gambar 33: APBN 2017 yang sudah disetujui mencakup target penerimaan yang lebih realistis	19
Gambar 34: Pertumbuhan penerimaan sampai saat ini di tahun ini (<i>year to date</i>) lebih tinggi di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, namun masih lebih rendah dari tahun 2015 dan 2014.....	19
Gambar 35: Realisasi belanja masih tetap lemah	21
Gambar 36: Belanja modal diproyeksikan meningkat di tahun 2017, sementara belanja untuk subsidi energi diperkirakan akan menurun	21
Gambar 37: Rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara	23
Gambar 38: Tingkat pengangguran inti turun ke tingkat terendah sejak tahun 2012	25
Gambar 39: Pertumbuhan pendapatan riil nampaknya secara signifikan meningkat di tahun 2016.....	26
Gambar 40: Jumlah tenaga kerja: Proporsi pekerja yang bekerja pada pekerjaan dengan menerima upah terus meningkat, tetapi dengan tingkat yang melambat.....	26
Gambar 41: Penurunan angka kemiskinan antara September 2015 dan September 2016 lebih besar dari tahun-tahun terakhir, namun tetap lebih kecil dari tingkat penurunan sebelum tahun 2011.....	27
Gambar 42: Setelah naik dalam kurun waktu lama, koefisien Gini telah menurun secara tahun-ke-tahun selama tiga periode survei berturut-turut.....	28
Gambar 43: Pangsa jasa Indonesia di dalam PDB berada di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah	32
Gambar 44: Perdagangan jasa lebih tahan banting dibandingkan dengan perdagangan barang	32
Gambar 45: Jasa memiliki pangsa tertinggi dalam perekonomian dan sektor yang tercepat berkembang	33
Gambar 46: Ekspor dan impor jasa telah berkembang pesat dalam dekade terakhir	33
Gambar 47: Sepuluh dari dua belas sektor jasa memiliki kelebihan permintaan, dua lainnya memiliki kelebihan pasokan.....	34
Gambar 48: Indeks pembatasan perdagangan jasa Indonesia	35
Gambar 49: Indonesia memiliki produktifitas yang relatif rendah di sejumlah sektor jasa ...	36
Gambar 50: Pembatasan ekuitas asing di sektor jasa telah menurun namun masih lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya.....	37

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil.....	50
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran.....	50
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi	50
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor.....	50
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen	50
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI	50
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran	51
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan	51
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang	51

Lampiran Gambar 10: Impor barang	51
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal	51
Lampiran Gambar 12: Inflasi	51
Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan	52
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara	52
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional	52
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	52
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional.....	52
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS	52
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ..	53
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS kelompok negara-negara EMBI Global	53
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito	53
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	53
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah.....	53
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2017 ..ii	
Tabel 2: Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap konstan pada tahun 2017.....	12
Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di APBN tahun 2017	24
Tabel 4: Ketimpangan terus menurun karena meningkatnya konsumsi warga yang berada di dalam strata 40 Menengah, tetapi yang berada di dalam strata 40 Terbawah masih tertinggal.....	28
Tabel 5: Indikator perekonomian utama	31
Tabel 6: Contoh Pembatasan di Sektor Jasa Konstruksi	39
Tabel 7: Aspek desain utama dari program KUR lama dan baru	43
Tabel 8: Ringkasan biaya KUR dan perbandingan antara KUR lama dan baru	44

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah	54
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran	54
Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia.....	55
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia	56

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Paparan Indonesia terhadap perekonomian Amerika Serikat dan Inggris.....	12
Kotak 2: Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa	35

Ringkasan eksekutif: Melanjutkan perubahan



Fundamental perekonomian Indonesia terus menguat

Dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi, defisit transaksi berjalan yang rendah, defisit fiskal yang konservatif serta tingkat inflasi yang menyentuh rekor terendah, fundamental ekonomi Indonesia terus menguat. Ditengah ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 menguat didukung oleh pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi. Perkiraan kondisi perekonomian tetap positif, didukung oleh proyeksi peningkatan perekonomian global dan pemulihan harga komoditas, yang menyebabkan meningkatnya nilai investasi dan ekspor. Perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju, perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter AS, ketidakpastian politik di Eropa, meningkatnya inflasi domestik yang berkepanjangan, dan penerimaan fiskal yang lemah memberikan risiko penurunan yang signifikan.

Pertumbuhan PDB triwulanan melambat karena belanja pemerintah menurun...

Pertumbuhan PDB riil di Triwulan ke-4 tahun 2016 melambat menjadi 4,9 persen yoy dari 5,0 persen di Triwulan ke-3, karena belanja pemerintah terus mengalami kontraksi dan pertumbuhan impor kembali meningkat. Penurunan belanja pemerintah sebesar 4,0 persen ini merupakan yang penurunan terbesar sejak Triwulan ke-1 tahun 2010. Penurunan ini sebagian disebabkan oleh pengaruh dasar dari pertumbuhan belanja pemerintah yang tinggi di Triwulan ke-4 tahun 2015. Sementara itu pertumbuhan investasi meningkat dan pertumbuhan ekspor berubah positif setelah kontraksi yang terjadi selama delapan triwulan, sejalan dengan harga komoditas yang lebih tinggi.

...namun pertumbuhan PDB tahunan tetap meningkat ditengah ketidakpastian global

Setelah lima tahun bergerak sejalan dengan harga komoditas yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari 4,9 persen di tahun 2015, ditengah peningkatan ketidakpastian kebijakan global. Nilai Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, angka pengangguran yang menurun dan upah riil yang melonjak meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah yang menurun dan

pertumbuhan investasi yang melemah menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tahun ini.

Kredibilitas fiskal yang meningkat akan meningkatkan kepercayaan investor

Walaupun penerimaan dari program amnesti pajak meningkatkan penerimaan secara keseluruhan, penerimaan dari sektor non-amnesti pajak melemah pada 2016. Kredibilitas kebijakan fiskal meningkat melalui pemotongan belanja pemerintah, sejalan dengan target penerimaan yang lebih realistis pada APBN tahun 2017, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor. APBN 2017 juga meliputi percepatan perbaikan dalam komposisi belanja, termasuk alokasi berkelanjutan yang lebih tinggi untuk sektor-sektor infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial, serta perbaikan dalam penetapan target untuk program-program subsidi energi dan bantuan sosial. Defisit fiskal pada tahun 2016 adalah sebesar 2,5 persen dari PDB, lebih rendah dari yang diperkirakan dan lebih kecil dari defisit fiskal sebesar 2,6 persen pada tahun 2015.

Defisit transaksi berjalan menurun ke level terendah selama lima tahun

Sektor eksternal juga diperkuat dengan defisit transaksi berjalan yang menurun ke level terendah selama lima tahun, sebesar 0,8 persen dari PDB pada Triwulan ke-4 2016, dari 1,9 persen pada Triwulan ke-3 2016. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan ekspor manufaktur. Secara keseluruhan, pada tahun 2016 neraca transaksi berjalan menurun menjadi 1,8 persen per PDB dari 2,0 persen per PDB pada tahun 2015, juga merupakan yang level terendah dalam lima tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali membantu penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2016

Tingkat kemiskinan resmi turun sebesar 0,4 persen antara September 2015 dan September 2016 menjadi 10,7 persen. Hal ini menunjukkan berlanjutnya peningkatan laju penurunan tingkat kemiskinan di antara bulan Maret 2015 dan Maret 2016, yang didukung oleh pertumbuhan PDB yang tinggi, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran inti yang terendah sejak 2012. Namun demikian, penurunan ini masih lebih rendah dari tingkat penurunan kemiskinan yang dicapai antara tahun 2007 dan 2011, dengan rata-rata sebesar 1,1 persen per tahun.

Pertumbuhan diharapkan akan meningkat pada jangka menengah, namun akan secara signifikan lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan yang terjadi setelah krisis keuangan global tahun 2008

Dengan memperkirakan bahwa seluruh komponen pengeluaran menjadi lebih stabil (*firm up*), pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 5,2 persen pada tahun 2017, dan mencapai 5,3 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan meningkat karena nilai Rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan

konsumen, sementara upah riil yang lebih tinggi dan angka pengangguran yang terus menurun memberi dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen. Pertumbuhan investasi swasta juga diperkirakan meningkat oleh karena harga komoditas yang sudah pulih kembali, serta efek dari pelonggaran moneter pada tahun 2016 serta reformasi ekonomi baru-baru ini. Pada saat yang sama, harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah,

Tabel 1: Pertumbuhan PDB diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2017

		2016	2017p
PDB riil	(Perubahan persentase tahunan)	5,0	5,2
Indeks Harga Konsumen	(Perubahan persentase tahunan)	3,5	4,3
Neraca transaksi berjalan	(Persen PDB)	-1,8	-1,8
Saldo anggaran	(Persen PDB)	-2,5	-2,6

Sumber: BI; BPS; Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Untuk tahun 2016 adalah nilai yang sebenarnya; p adalah singkatan dari perkiraan

sedangkan pertumbuhan global yang menguat akan meningkatkan ekspor. Oleh karena itu, baik belanja pemerintah maupun ekspor kemungkinan akan pulih dari kontraksi yang dialami di tahun 2016. Walaupun tingkat pertumbuhan PDB dalam jangka menengah diproyeksikan dapat melampaui tingkat pertumbuhan beberapa tahun terakhir ini, namun proyeksi pertumbuhan ini masih lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan yang terjadi setelah terjadinya krisis keuangan tahun 2008, ketika perekonomian pulih kembali dari pelemahan ekonomi global. Dengan demikian perlu adanya semangat dalam melanjutkan perubahan perekonomian (*staying the course*) struktural yang terus menerus dilakukan, untuk dapat lebih meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian.

Inflasi diperkirakan akan meningkat secara sementara pada 2017

Inflasi harga konsumen diperkirakan akan melonjak dari sebesar 3,5 persen pada 2016 menjadi 4,3 persen pada tahun 2017, karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan menurun pada tahun 2018 oleh karena hilangnya efek kenaikan harga.

Defisit fiskal diproyeksikan akan meningkat oleh karena meningkatnya investasi infrastruktur publik

Keseimbangan fiskal pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 2,6 persen dari PDB pada tahun 2017, lebih besar dari defisit sebesar 2,4 persen di dalam APBN Pemerintah tahun 2017 yang sudah disetujui. Belanja publik yang lebih tinggi, sebagian karena adanya upaya baru untuk meningkatkan investasi infrastruktur publik, diharapkan sebagian akan diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan, yang pada gilirannya akan dihasilkan oleh pertumbuhan PDB yang lebih kuat dan dampak positif dari reformasi kebijakan administrasi dan perpajakan.

Perubahan yang tak terduga dalam kebijakan moneter AS menimbulkan risiko penurunan...

Risiko untuk perkiraan kondisi perekonomian (*outlook*) condong menurun. Hasil yang mengejutkan dari rangkaian pemilu mendatang di Eropa, dapat semakin meningkatkan ketidakpastian kebijakan di negara-negara maju, di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme. Selain itu, Bank Sentral (*Federal Reserve*) AS diperkirakan akan melakukan normalisasi moneter dan secara bertahap meningkatkan suku bunga Federal antar-bank (*Fed Funds Rate*) di tahun-tahun mendatang. Jika peningkatan suku bunga Federal ini lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka efeknya adalah keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang secara besar-besaran seperti efek *Taper Tantrum* yang pernah terjadi oleh karena para investor dengan segera mengevaluasi dan menyeimbangkan portofolio mereka untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan. Ketidakpastian/volatilitas di pasar keuangan dan modal dapat membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah.

...demikian pula halnya dengan peningkatan laju inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan lemahnya penerimaan fiskal

Peningkatan laju inflasi yang berkepanjangan oleh karena kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah (*administered prices*) baru-baru ini dapat menimbulkan risiko penurunan yang besar bagi pertumbuhan konsumsi. Terlepas dari gejolak nilai tukar, konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenaikan harga, terutama harga makanan, dan konsumsi rumah tangga merupakan bagian dominan perekonomian Indonesia. Jika inflasi tetap tinggi dan lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan pertumbuhan output yang lebih rendah. Selain itu, Bank Indonesia dapat terdorong untuk memperketat kebijakan moneter, yang juga akan meredam pertumbuhan investasi. Pada saat yang sama, penerimaan fiskal terus menyebabkan terjadinya risiko penurunan, karena penerimaan yang rendah membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan.

Edisi ini juga memuat dua topik utama. Tulisan pertama menganalisa bagaimana perdagangan jasa di Indonesia dapat mengambil manfaat dari penghapusan hambatan perdagangan. Tulisan kedua menyajikan tinjauan program KUR yang didesain ulang di Indonesia, berikut dengan rekomendasi mengenai kebijakan

Indonesia harus mengevaluasi ulang hambatan perdagangan jasa untuk mengurangi biaya, meningkatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas

Sektor jasa tampaknya menjadi salah satu pendorong pertumbuhan yang paling menjanjikan. Sektor ini memiliki kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian dan perdagangan Indonesia, meskipun proporsinya masih di bawah tingkat yang dicapai oleh banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Pentingnya sektor jasa bagi pertumbuhan ekonomi diperjelas oleh keterkaitan ke depan yang kuat ke seluruh sektor perekonomian lainnya (yaitu setiap kebijakan yang diterapkan pada sektor jasa akan memiliki implikasi terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian). Indonesia adalah negara pengimpor jasa bersih karena permintaan jasa melebihi pasokannya di sebagian besar sektor. Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa peraturan ketat yang paling menghambat perdagangan jasa. Hambatan ini berkontribusi pada produktivitas sector jasa yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara pembanding. Hambatan ini juga menjadi faktor rendahnya produktivitas sektor manufaktur, karena jasa merupakan masukan utama untuk memproduksi barang-barang manufaktur. Oleh karena itu, tinjauan kembali terhadap hambatan perdagangan jasa diperlukan, mengingat pentingnya peran jasa bagi perekonomian secara keseluruhan.

Mengingat adanya peningkatan sepuluh kali lipat biaya program KUR, diperlukan tinjauan kembali pemanfaatan pinjaman bersubsidi untuk mendukung UMKM

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang awalnya dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007, adalah salah satu program pinjaman bersubsidi terbesar untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara-negara pasar berkembang. Ketika program ini di desain ulang pada tahun 2015, fokus KUR berubah dari fasilitasi akses terhadap pinjaman bagi para peminjam UMKM melalui pemberian jaminan kredit secara parsial, menjadi penyediaan pinjaman pada tingkat bunga bersubsidi bagi UMKM, terlepas dari kondisi akses mereka sebelumnya terhadap pembiayaan. Desain ulang ini telah menyebabkan peningkatan sebesar sepuluh kali lipat bagi Pemerintah untuk membiayai program ini, baik dari segi subsidi langsung maupun tidak langsung. Mengingat biayanya yang tinggi, kecuali jika manfaat dari program KUR dapat didokumentasikan dengan baik, sangat diperlukan tinjauan kembali terhadap pemanfaatan pinjaman bersubsidi untuk mendukung UMKM. Secara khusus, pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR yang baru tersebut sebanding dengan peningkatan yang besar dalam hal biayanya, atau apakah fokus pada instrumen-instrumen lainnya yang lebih murah dan sudah teruji — seperti jaminan kredit parsial dan penguatan infrastruktur keuangan — dapat mendukung sektor UMKM dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi suku bunga dilakukan dengan realokasi pengeluaran bagi intervensi-intervensi prioritas lainnya, mengingat terbatasnya sumber daya fiskal yang ada.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



1. Perekonomian global memiliki landasan yang kuat pada tahun 2017

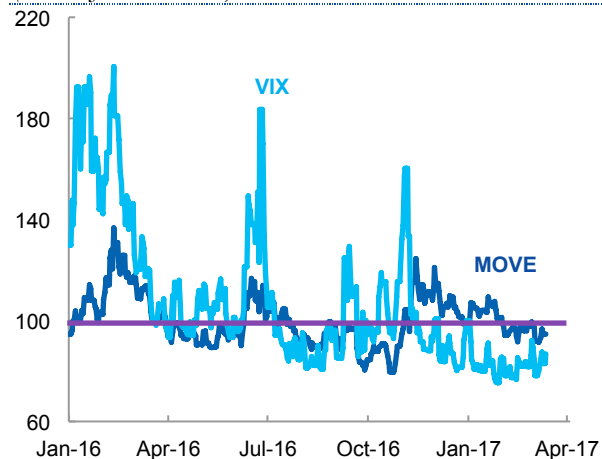
Perekonomian global telah mereda saat memasuki tahun 2017

Setelah setahun penuh bergejolak di tahun 2016, tahun 2017 dibuka dengan perekonomian global yang relatif tenang. Hasil dari referendum di Inggris pada bulan Juni dan pemilihan presiden AS di bulan November menyebabkan (pasar) keuangan secara tiba-tiba bergejolak, dimana gejolak terjadi disekitar peristiwa-peristiwa tersebut (Gambar 1).¹ Semenjak itu, meskipun ketidakpastian kebijakan berlanjut di tengah suasana meningkatnya sentimen proteksionisme, pasar keuangan global secara mengejutkan mereda, dan mendukung aktivitas perekonomian global.

Pertumbuhan perekonomian global diperkirakan meningkat di tahun 2017, yang dipimpin

Pertumbuhan perekonomian global diperkirakan akan meningkat tahun ini, dengan PDB riil meningkat sebesar 2,7 persen secara global, naik dari posisi pasca krisis sebesar 2,3 persen di tahun 2016 (Gambar 2). Karena harga komoditas terus pulih dan tantangan domestik yang menurun di beberapa negara eksportir komoditas, negara pasar berkembang dan negara berkembang (EMDEs - commodity exporters,

Gambar 1: Pasar keuangan global memasuki tahun 2017 dengan kondisi yang tidak bergejolak (indeks Januari=100)



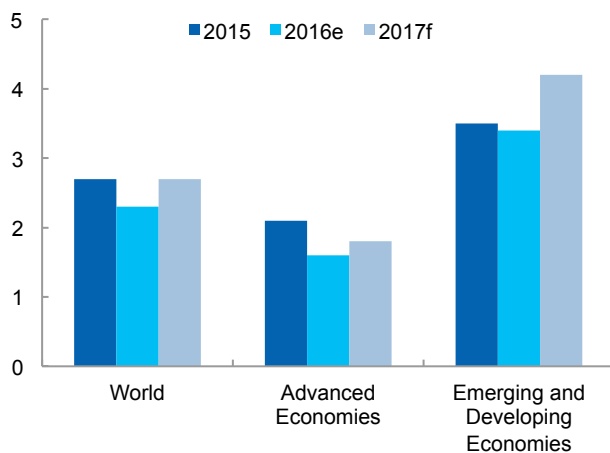
Sumber: Bloomberg; Perhitungan staf Bank Dunia

¹ Indeks Volatilitas (VIX index), yang mengukur volatilitas di pasar ekuitas, melonjak 49 persen setelah

oleh negara-negara berkembang

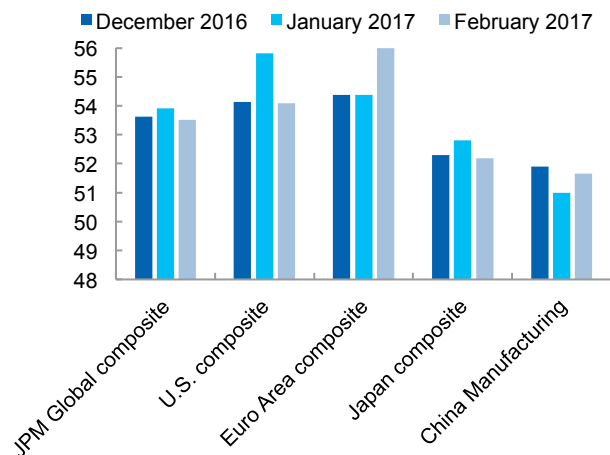
emerging dan developing economies) akan memimpin pulihnya tingkat pertumbuhan global, dengan pertumbuhan meningkat 4,2 persen pada tahun 2017. Kegiatan ekonomi di negara-negara maju juga diharapkan akan tumbuh lebih cepat tahun ini, mencapai 1,8 persen, yang dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi AS yang secara signifikan lebih kuat. Capaian ini nampak dari Indeks Pembelian Manajer (PMI - *Purchasing Manager's Index*) di bulan Januari dan Februari yang mendukung perkiraan pertumbuhan global yang optimis, dengan capaian produksi multi-tahunan yang tinggi pada negara-negara di dunia dan di negara-negara dengan ekonomi kuat (Gambar 3).

Gambar 2: Pertumbuhan PDB global diproyeksikan meningkat di tahun 2017, meskipun dibayangi ketidakpastian kebijakan global
(*pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen*)



Sumber: World Bank (2017a)
Catatan: 2016e adalah untuk estimasi dan 2017f adalah untuk perkiraan

Gambar 3: Indeks Manajer Pembelian: Negara-negara dengan perekonomian kuat memasuki tahun 2017 dengan landasan yang mantap
(*indeks*)



Sumber: Markit Economics, Haver Analytics
Catatan: Hasil di atas 50 merupakan ekspansi dan hasil yang ada di bawah merupakan kontraksi

Harga komoditas diproyeksikan akan terus pulih, yang mendukung para eksportir komoditas

Sejalan dengan pemulihan bertahap yang terlihat di tahun 2016, harga komoditas diproyeksikan akan terus meningkat di tahun 2017. Harga energi diperkirakan melonjak sebesar 26 persen tahun ini, sementara harga logam rata-rata diperkirakan naik sebesar 11 persen. Harga komoditas yang lebih tinggi memberi dorongan yang besar bagi para eksportir komoditas, termasuk Indonesia, mengangkat penerimaan fiskal mereka, meningkatkan nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*) dan memiliki efek yang positif pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, serta merangsang pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan PDB menguat di tahun 2016

Pertumbuhan PDB menurun pada Triwulan ke-4 yang didorong oleh terjadinya kontraksi pada konsumsi pemerintah dan impor yang meningkat

Pertumbuhan PDB riil sedikit menurun menjadi 4,9 persen tahun-ke-tahun di Triwulan ke-4 dari 5,0 persen di Triwulan ke-3, terutama disebabkan oleh kontraksi pada konsumsi pemerintah dan impor yang meningkat (Gambar 4). Kontraksi pengeluaran fiskal, yang terbesar sejak Triwulan ke-1 2010, secara luas mencerminkan posisi fiskal Pemerintah yang hati-hati, juga apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi pemerintah yang lebih tinggi di Triwulan ke-4 2015, didorong oleh pilkada.

Didukung oleh inflasi yang rendah dan nilai Rupiah yang relatif stabil, pertumbuhan konsumsi sektor swasta tetap stabil di Triwulan ke-4.

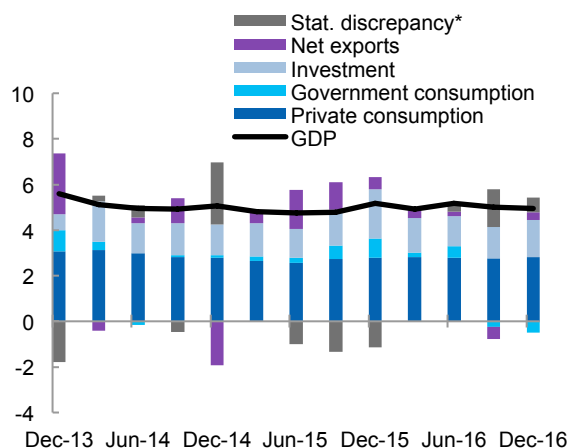
Pertumbuhan investasi meningkat di Triwulan ke-4...

Sementara itu, pertumbuhan investasi meningkat di Triwulan ke-4 setelah turun atau stabil selama tiga triwulan berturut-turut. Sampai titik tertentu peningkatan tersebut mencerminkan pola yang biasa terjadi di Indonesia di mana peningkatan investasi biasanya terjadi di akhir tahun. Namun demikian, ada tanda-tanda bahwa peningkatan ini bisa menjadi awal dari tren peningkatan yang berkelanjutan di tahun 2017. Tingkat suku bunga kredit untuk modal kerja dan kredit investasi menurun sekitar 100 basis poin yang didukung oleh pelonggaran kebijakan moneter sebesar 150 basis poin di tahun 2016, pertumbuhan kredit pulih dari penurunan di akhir tahun dan harga komoditas meningkat di paruh kedua tahun 2016. Selain itu, kepercayaan investor cenderung menguat yang didukung oleh kredibilitas fiskal yang meningkat dan momentum reformasi yang positif untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia².

...dan ekspor serta impor meningkat untuk pertama kalinya dalam dua tahun ini

Pertumbuhan negatif ekspor dan impor nampak membaik di Triwulan ke-4 untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun ini. Peningkatan investasi di Triwulan ke-4, bersama dengan meningkatnya konsumsi swasta, mendorong permintaan impor. Setelah mengalami pelemahan pertumbuhan di Triwulan ke-3, ekspor bersih memberikan kontribusi positif di Triwulan ke-4 karena adanya ekspansi yang kuat di sisi ekspor, yang didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sebagai indikator yang utama untuk ekspor barang-barang manufaktur, komponen pesanan ekspor baru dari PMI manufaktur Markit mencatat peningkatan di bulan Februari - memberikan tanda-tanda positif tentatif untuk pembalikan pertumbuhan ekspor berkelanjutan di di tahun 2017.

Gambar 4: Pertumbuhan PDB riil: Belanja Pemerintah terus berkontraksi di Triwulan ke-4
(kontribusi untuk pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



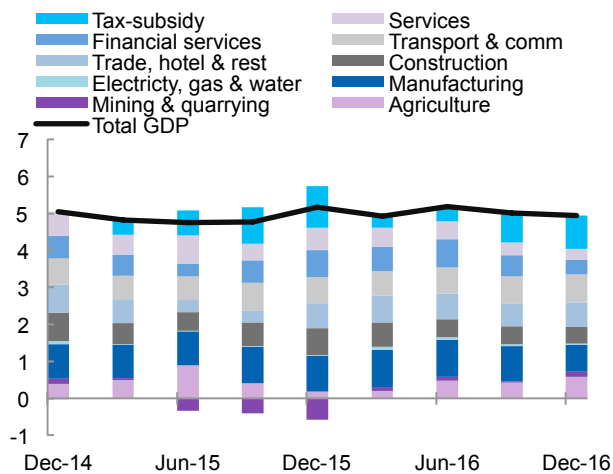
Sumber: CEIC dan BPS Indonesia
Catatan: * Perbedaan statistik meliputi perubahan dalam persediaan

² Posisi Indonesia meningkat di peringkat Doing Business tahun 2017 dari peringkat ke 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 di tahun 2017 - membuat Indonesia menjadi salah satu negara reformis terbaik secara regional maupun global (World Bank, 2017d)

Dalam hal kinerja sektoral, sektor pertanian dan pertambangan meningkat kinerjanya di Triwulan ke-4, tetapi hanya di kedua sektor inilah yang berkinerja baik karena pertumbuhan di sebagian besar sektor-sektor lainnya pada umumnya stagnan atau menurun dibandingkan dengan Triwulan ke-3 (Gambar 5).

Gambar 5: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB meningkat di triwulan ke-4

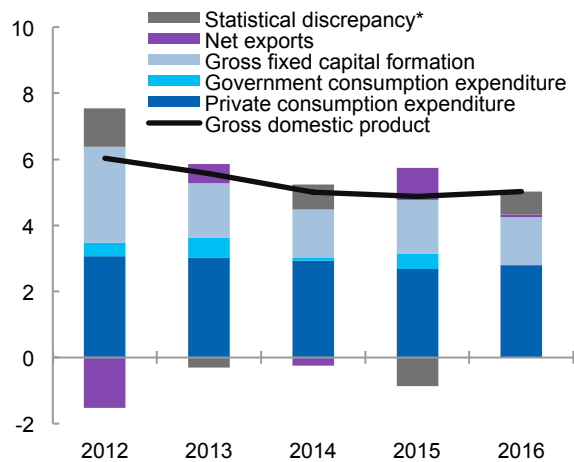
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC dan BPS

Gambar 6: Pertumbuhan PDB melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam lima tahun ini

(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC dan BPS

Catatan: * Perbedaan statistik meliputi perubahan dalam persediaan

Pertumbuhan PDB tahunan melampaui tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya untuk pertama kalinya dalam lima tahun ini

Meskipun terjadi peningkatan ketidakpastian kebijakan global, pertumbuhan PDB riil tahunan di tahun 2016 mencapai 5,0 persen, dibandingkan dengan hasil pertumbuhan tahun 2015 yang sedikit direvisi ke atas sebesar 4,9 persen (Gambar 6). Ini adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir bahwa pertumbuhan PDB tahunan telah melampaui hasil tahun sebelumnya dan hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa siklus pertumbuhan Indonesia akhirnya sampai pada titik baliknya dan mulai meningkat. Di tahun 2016, pertumbuhan PDB riil didorong oleh konsumsi swasta, yang meningkat berkat stabilnya nilai Rupiah, inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang lebih rendah³. Sebaliknya, belanja pemerintah menurun dan pertumbuhan investasi yang lebih lemah membebani pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan untuk tahun ini.

3. Peningkatan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah menjadi pendorong utama inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2017

Inflasi umum meningkat di awal tahun 2017, terutama karena adanya kenaikan tarif listrik

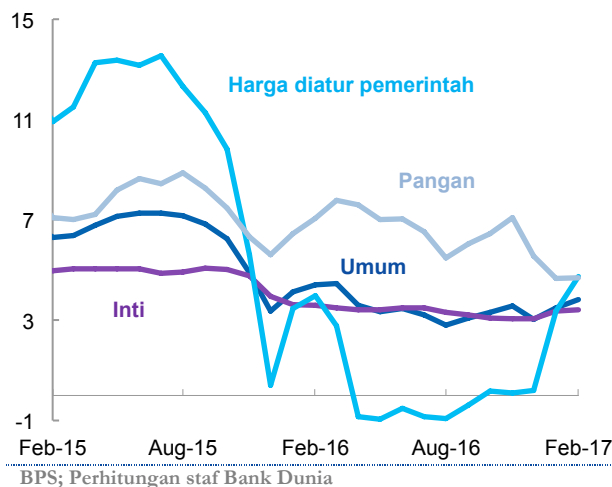
Setelah turun ke angka terendah kedua sejak tahun 2009 pada bulan Desember, inflasi harga konsumen tahunan meningkat pada dua bulan pertama tahun 2017, meningkat menjadi 3,5 persen di bulan Januari dan 3,8 persen di bulan Februari. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya pajak kendaraan bermotor, yang menyebabkan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah naik 3,4 persen tahun-ke-tahun pada bulan Januari dan 4,7 persen pada Februari, dari 0,2 persen pada bulan Desember 2016 (Gambar 7). Setelah adanya reformasi Pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik, 18,7 juta pelanggan pada

³ Lihat Badan Kebijakan Fiskal (2017).

kategori listrik 900VA akan terkena kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan mulai bulan Januari sampai Mei tahun ini. Pada bulan Juli 2017, 18,7 juta pelanggan tersebut, yang mewakili 29 persen dari jumlah total pelanggan listrik, akan membayar skema tarif swa-penyesuaian (*auto-adjusted*) standar⁴.

Inflasi inti yang tidak termasuk harga yang lebih tidak stabil seperti makanan dan bahan bakar minyak, juga meningkat, merayap hingga 3,4 persen pada bulan Januari dan Februari dari 3,1 persen pada bulan Desember. Sementara itu, inflasi pangan terus menurun, dari 5,7 persen pada bulan Desember menjadi 4,4 persen pada bulan Februari, terutama karena kontribusi yang lebih rendah dari makanan olahan, yang meliputi harga beras yang relatif stabil dikarenakan hasil panen yang baik karena cuaca yang menguntungkan di tahun 2016.

Gambar 7: Inflasi IHK meningkat di awal 2017, terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik
(*pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen*)



Gambar 8: Kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah kemungkinan akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di tahun 2017, namun secara perlahan menurun di tahun 2018
(*pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen*)



Inflasi umum diproyeksikan secara sementara meningkat di tahun 2017, namun secara perlahan menurun di tahun 2018

Efek inflasi dari kenaikan tarif listrik di akhir bulan Mei dan masa Lebaran di bulan Juni diperkirakan akan mencapai puncaknya di Triwulan ke-4 2017. Naiknya harga minyak dunia juga diperkirakan akan berkontribusi untuk biaya produksi dan transportasi yang lebih tinggi. Namun demikian, efek inflasi tersebut akan sebagian diimbangi oleh penurunan lebih lanjut dalam inflasi di sektor makanan, yang dikontribusikan oleh panen raya padi yang diharapkan terjadi pada semester pertama tahun 2017. Bank Dunia memperkirakan tingkat inflasi IHK tahunan rata-rata meningkat 4,3 persen di tahun 2017, sebelum kemudian menurun ke 3,8 persen di 2018, dan tetap berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia sebesar 3 sampai 5 persen (Gambar 8).

Terdapat risiko yang menguntungkan (*upside*) dan merugikan (*downside*) terhadap perkiraan tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang sebenarnya mungkin akan lebih tinggi

⁴ Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 28/2016, tarif listrik akan disesuaikan setiap bulan sesuai dengan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap USD, harga minyak, dan inflasi bulanan.

apabila Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga eceran BBM mendekati tingkat harga global. Sebaliknya, apabila pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan tarif listrik yang dijadwalkan di bulan Mei, tingkat inflasi yang sebenarnya akan cenderung lebih rendah.

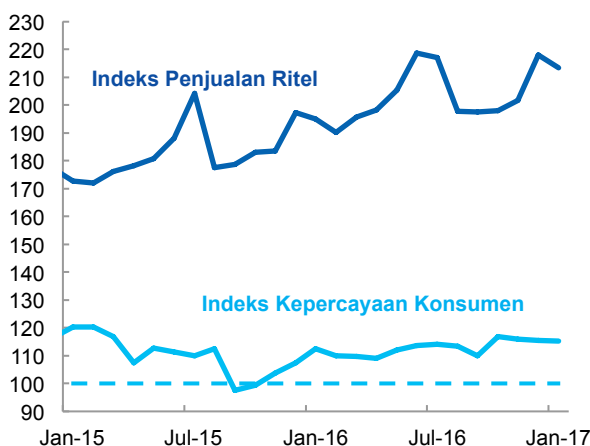
Banyak indikator yang mengindikasikan bahwa konsumsi tetap kuat meskipun ada tekanan inflasi...

Indikator utama bulanan untuk konsumsi dan investasi mengindikasikan stabilitas dalam sentimen ekonomi yang terus berlanjut. Meskipun diperkirakan tekanan inflasi tahun ini cukup rendah, kepercayaan konsumen di bulan Januari menguat, dengan indeks yang hanya sedikit lebih rendah dari Triwulan ke-4 tahun 2016, yaitu rata-rata 116, yang merupakan angka tertinggi dalam tujuh kuartal (Gambar 9). Demikian juga, indeks penjualan ritel naik 9,4 persen pada Januari, yang secara umum tidak berubah dari pertumbuhan rata-rata bulanan 9,5 persen untuk Triwulan ke-4 tahun 2016.

... sedangkan indikator-indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama menunjukkan tanda-tanda pemulihan

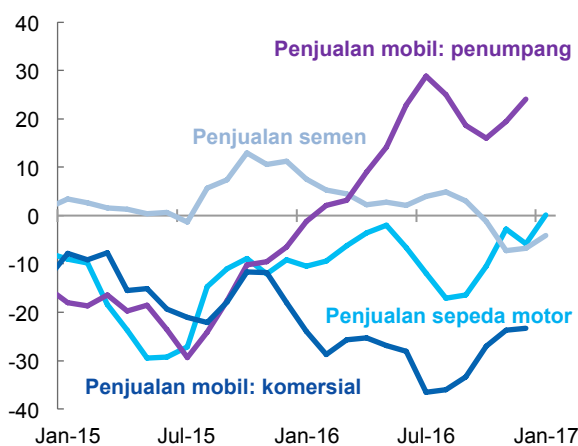
Sementara itu, indikator-indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama membaik dan mengindikasikan pemulihan. Penjualan kendaraan bermotor di semua kategori mengalami pembalikan tren, menguat di Triwulan ke-4 tahun 2016, dan diperkirakan akan bertahan hingga 2017⁵ (Gambar 10). Pemanfaatan kapasitas meningkat ke level tertinggi selama enam triwulan menjadi 76,3 persen di Triwulan ke-4 tahun 2016, sedangkan angka di PMI manufaktur Nikkei/Markit meningkat ke level tertinggi selama empat bulan di bulan Januari, sebelum menurun menjadi 49,3 di bulan Februari.

Gambar 9: Indikator-indikator utama untuk konsumsi tetap stabil...
(indeks)



Sumber: BI

Gambar 10: ... sementara indikator untuk investasi dan barang konsumsi tahan lama menunjukkan pemulihan
(pergerakan pertumbuhan rata-rata tahun-ke-tahun sepanjang 3 bulan, persen)



Sumber: ASI; GAI; Perhitungan staf Bank Dunia

4. Harga komoditas dan sektor eksternal

Harga komoditas ekspor utama Indonesia terus meningkat di

Barang-barang komoditas mempunyai porsi cukup besar dari ekspor di Indonesia - yang jumlahnya sekitar 30 persen dari total ekspor pada tahun 2016. Harga barang-barang komoditas ekspor utama Indonesia, yang mencakup minyak dan gas, Minyak Kelapa Sawit (CPO), karet dan logam dasar, terus meningkat di Triwulan ke-1 tahun

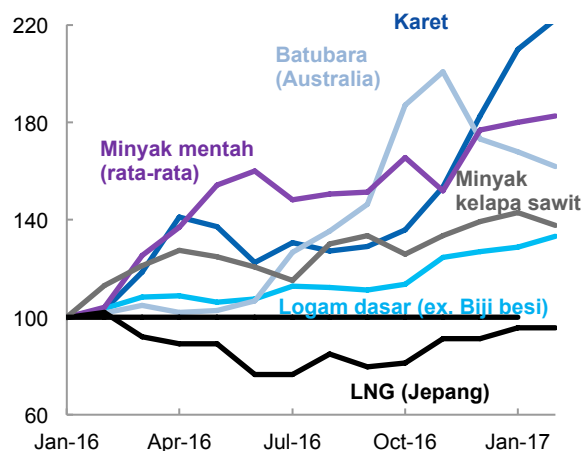
⁵ Penjualan mobil di Indonesia tahun 2017 terlihat naik sebesar 3-4 persen menurut distributor mobil terkemuka Astra (Reuters, 24 Feb, 2017)

Triwulan ke-1 tahun 2017 2017 (Gambar 11). Di samping minyak mentah dan LNG, harga barang-barang komoditas utama sudah melebihi harga perkiraan Bank Dunia untuk tahun ini (Gambar 12).

Kebijakan OPEC dan Tiongkok akan menentukan perkembangan harga minyak, gas dan batubara Keputusan OPEC dan negara-negara penghasil minyak lain untuk membatasi produksi memberikan dukungan bagi harga minyak dan gas. Bank Dunia memproyeksikan harga minyak rata-rata sebesar USD 55 untuk tahun 2017⁶. Setelah melonjak di hampir sepanjang tahun 2016 dikarenakan kebijakan Tiongkok untuk membatasi operasi tambang batubara menjadi 276 hari per tahun, harga batubara global mulai mereda setelah Pemerintah Tiongkok mengendurkan peraturan, yang memungkinkan produksi batubara yang lebih tinggi, terutama di provinsi-provinsi yang kekurangan batubara.⁷

Gambar 11: Harga global untuk enam komoditas ekspor utama Indonesia sebagian besar naik di tahun 2016

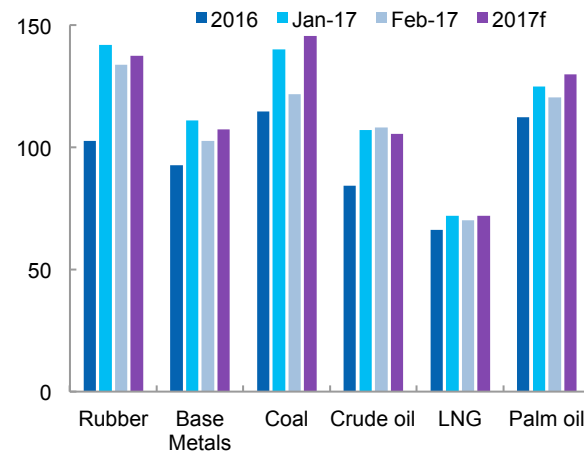
(indeks Januari 2016 = 100)



Sumber: *World Bank Pink Sheet*; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 12: Selain minyak mentah dan LNG, harga global untuk komoditas ekspor utama Indonesia sudah melebihi perkiraan Bank Dunia

(indeks 2015=100)



Sumber: Bank Dunia (2017); Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: f berarti perkiraan

⁶ Analisis pasar memperkirakan bahwa harga sebesar \$ 50- \$ 60/bbl akan cukup untuk meningkatkan produksi shale oil (*shale oil* adalah minyak yang terkandung dalam sejenis bebatuan lunak, di mana minyak dalam bebatuan ini diekstraksi dengan proses pemanasan atau teknik-teknik lainnya – penerjemah), dikarenakan perbaikan produktivitas di industri *shale oil* AS. Hal ini membatasi risiko yang menguntungkan (*upside risk*) untuk harga minyak dalam waktu dekat ini (lihat World Bank 2017b).

⁷ Penelitian Macquarie (Januari 2017)

Harga karet dan minyak kelapa sawit meningkat didorong oleh pasokan yang ketat dan permintaan yang kuat

Harga karet yang tetap memperlihatkan arah peningkatannya, didorong oleh pemulihan yang terjadi di pasar minyak mentah⁸, kekhawatiran terhadap kelangsungan pasokan yang dipicu oleh banjir di Thailand Selatan dan Semenanjung Malaysia⁹, dan harapan baru dari pemulihan ekonomi global yang dipimpin AS yang lebih cepat memberikan perkiraan akan membaiknya permintaan karet. Dengan demikian, fundamentalnya selaras untuk mendukung harga karet, setidaknya dalam jangka pendek. Untuk minyak kelapa sawit, harga menguat di Triwulan ke-4 tahun 2016, yang disebabkan oleh persediaan minyak sawit yang lebih rendah di Malaysia (terendah untuk bulan Desember sejak 2010) karena produksi turun dan permintaan ekspor yang tinggi¹⁰, serta komitmen Indonesia terhadap rencana pemanfaatan biodiesel¹¹. Beranjak ke tahun 2017, keseimbangan penawaran dan permintaan CPO akan tetap ketat, karena persediaan awal yang lebih rendah dan pertumbuhan permintaan yang tinggi.

Nilai tukar perdagangan Indonesia meningkat

Dengan mempertimbangkan jumlah impor dan ekspor relatif dari enam komoditas utama ini, Indonesia telah mengalami kejutan positif nilai tukar perdagangan sejak bulan Juli 2016, sebagai akibat dari harga global komoditas-komoditas tersebut yang lebih tinggi (Gambar 13).¹²

Defisit transaksi berjalan tahunan turun ke level terendah dalam lima tahun

Di sektor eksternal, defisit transaksi berjalan tahunan menyusut menjadi 1,8 persen dari PDB di tahun 2016 — defisit terkecil sejak tahun 2011 (Gambar 14). Hal ini didorong oleh peningkatan neraca perdagangan barang maupun jasa. Neraca perdagangan barang meningkat karena nilai impor turun lebih dari nilai ekspor, khususnya di sektor minyak bumi di mana Indonesia merupakan negara pengimpor

Gambar 13: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih menunjukkan kejutan positif nilai tukar perdagangan komoditas untuk Indonesia sejak Juli 2016

(indeks 2011=100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Indeks harga perdagangan tertimbang bersih ditetapkan atas dasar lebih dari enam komoditas ekspor utama Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, gas, dan minyak kelapa sawit)

⁸ Karet sintesis, pengganti karet alam, merupakan elastomer buatan yang dibuat dari bahan baku petrokimia. Harga karet mengikuti harga minyak dan bahan bakunya.

⁹ Lihat Reuters (9 Januari, 2017).

¹⁰ Dewan Minyak Kelapa Sawit Malaysia: <http://www.mpoc.org.my>

¹¹ Sejak awal 2016, pemerintah Indonesia meluncurkan program B20 biodiesel. Program ini menetapkan kewajiban untuk mencampurkan 20 persen asam lemak metil ester (fatty acid methyl ester) (yang berasal dari minyak kelapa sawit) dengan 80 persen diesel.

¹² Indeks Harga Perdagangan Tertimbang Bersih (NTI - Net Trade-Weighted Index) didefinisikan sebagai: $NTI_t = \frac{Weight_{i,p} \times Price_{i,t}}{Price_{i,t}}$ di mana $Weight_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum (I_{N,t})}$ di mana i= jenis komoditas; t= bulan; p=siklus (mis. rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun basis; E=nilai ekspor; I=nilai impor

dan harga menurun tajam pada tahun 2016¹³. Sebaliknya, neraca perdagangan jasa meningkat karena nilai ekspor meningkat lebih dari nilai impor. Kontributor terbesar untuk peningkatan ini adalah peningkatan sejumlah USD 1 miliar dalam ekspor jasa pariwisata dan penurunan sebesar USD 550 juta di impor jasa transportasi barang (yang cenderung bergerak sejalan dengan ekspor barang).¹⁴

Surplus neraca keuangan meningkat di tahun 2016 karena warga Indonesia mengurangi kepemilikan mereka atas aset asing (yang mengakibatkan terjadinya arus masuk bersih). Misalnya, warga Indonesia mengurangi pembelian FDI dan menjual investasi portofolio asing mereka (FDI - *Foreign Direct Investment* – Investasi Asing Langsung). Warga Indonesia juga memindahkan dana mereka dari luar negeri ke dalam mata uang dan deposito Indonesia. Di sisi lain, FDI dan investasi portofolio oleh warga negara asing di Indonesia sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2015 (tetapi masih menghasilkan arus masuk bersih). Hal ini sejalan dengan investasi asing sederhana di pasar negara berkembang lainnya.¹⁵ Secara keseluruhan, neraca pembayaran (BOP - *balance of payments*) mencatat surplus sebesar 1,4 persen dari PDB di tahun 2016, dari defisit sebesar 0,1 persen di tahun 2015.

Neraca perdagangan tetap surplus di Triwulan ke-4 tahun 2016, sedangkan defisit transaksi berjalan menurun menjadi 0,8 persen dari PDB pada Triwulan ke-4, terendah dalam lebih dari lima tahun ini

Secara triwulanan, Neraca Perdagangan tetap surplus, didorong oleh arus masuk yang besar dalam aset mata uang dan deposito pihak swasta (komponen dari investasi lainnya), dan penurunan tajam dalam defisit transaksi berjalan menjadi 0,8 persen dari PDB, tingkat yang terendah sejak tahun 2011 (Gambar 15).

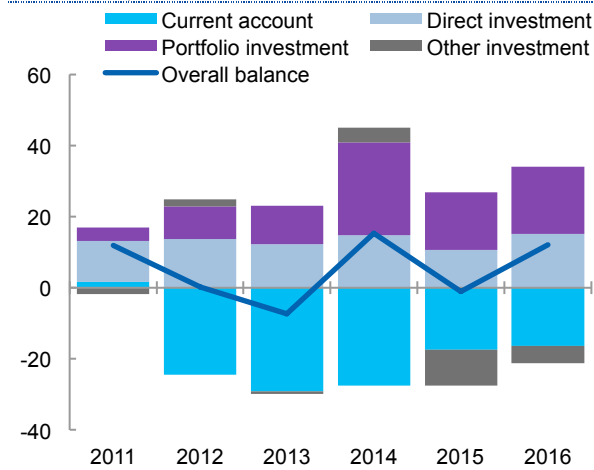
Penurunan defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan yang cukup besar dalam neraca perdagangan, karena nilai ekspor meningkat lebih dari nilai impor. Dalam hal pertumbuhan nilai ekspor tahun-ke-tahun positif untuk pertama kalinya sejak tahun 2013 (Gambar 16). Sementara harga komoditas yang lebih tinggi membantu meningkatkan pertumbuhan ekspor, pertumbuhan ekspor manufaktur juga tinggi (13,2 persen tahun-ke-tahun), yang berpotensi menunjukkan pembalikan arah pertumbuhan (turn-around) nilai ekspor yang lebih lama. Nilai ekspor batubara dan minyak kelapa sawit menjadi komoditas kontributor yang kuat, didukung oleh peningkatan sebesar 86 persen dalam harga batubara dan peningkatan sebesar 20 persen dalam harga minyak kelapa sawit di sepanjang tahun. Pertumbuhan impor barang juga positif untuk pertama kalinya sejak 2013. Semua kategori utama impor memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ini, kecuali impor (barang) modal yang hanya sedikit lebih rendah di sepanjang tahun. Impor bahan baku memberi kontribusi yang terbesar (Gambar 17). Baik ekspor maupun impor jasa juga meningkat di sepanjang tahun, dengan pertumbuhan ekspor yang melampaui pertumbuhan impor.

¹³ Harga minyak mentah dan LNG masing-masing turun sebesar 15,6 dan 32,9 persen pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Sebaliknya, harga komoditas ekspor utama Indonesia lainnya (seperti batu bara dan minyak kelapa sawit) meningkat selama periode yang sama.

¹⁴ Untuk pembahasan terinci mengenai perdagangan jasa, lihat Bagian B.1.

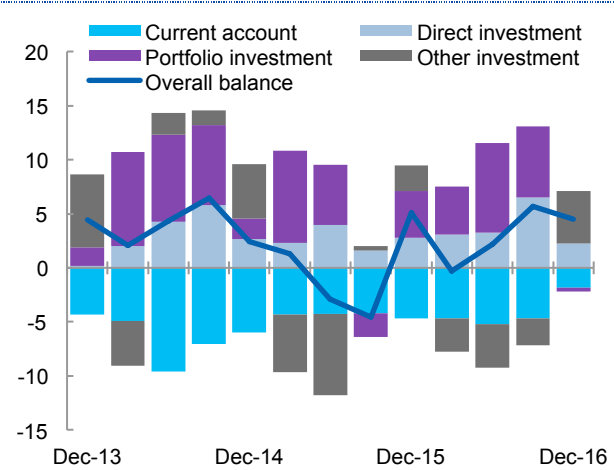
¹⁵ Lihat IIF (2017).

Gambar 14: Neraca perdagangan mencatat surplus pada tahun 2016, didorong oleh arus masuk modal yang kuat dan defisit transaksi berjalan yang turun ke level terendah selama 5 tahun ini
(USD miliar)



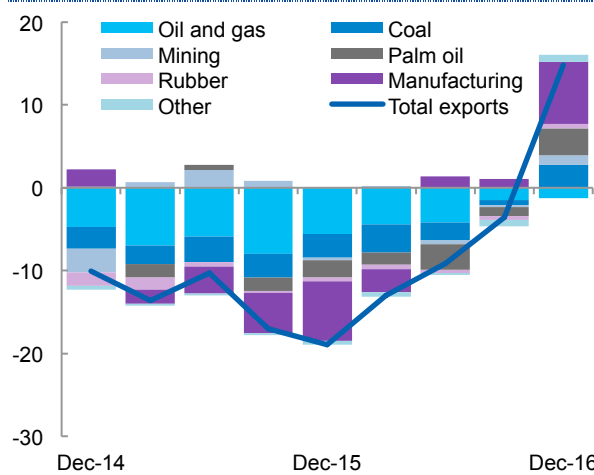
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 15: Neraca perdagangan tetap surplus di Triwulan ke-4 didorong oleh penurunan tajam dalam defisit transaksi berjalan
(USD miliar)



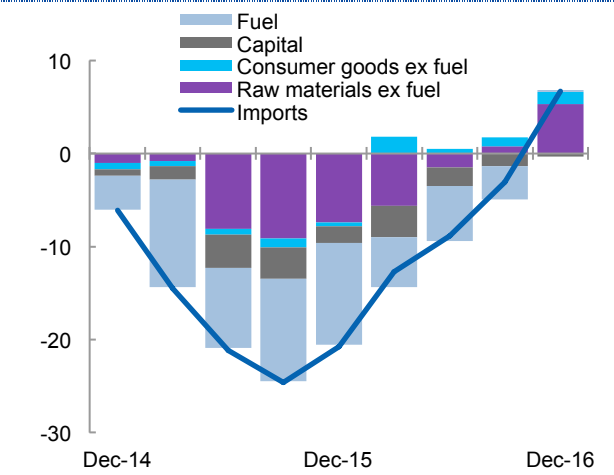
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 16: Nilai ekspor barang meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2011...
(sumbangan terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 17: ...demikian pula halnya dengan nilai impor barang
(sumbangan terhadap pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

FDI yang lemah dan investasi portofolio yang negatif mendorong penurunan surplus

Surplus neraca keuangan (*financial account*) dan neraca modal (*capital account*) menyusut di Triwulan ke-4 karena Investasi Asing Langsung melemah dan investasi portofolio yang negatif. Arus masuk dan keluar FDI didominasi oleh “keluar-masuknya” investasi asing langsung di sektor perbankan,¹⁶ kemungkinan dikarenakan oleh adanya perubahan insentif pajak menyusul diberlakukannya program amnesti

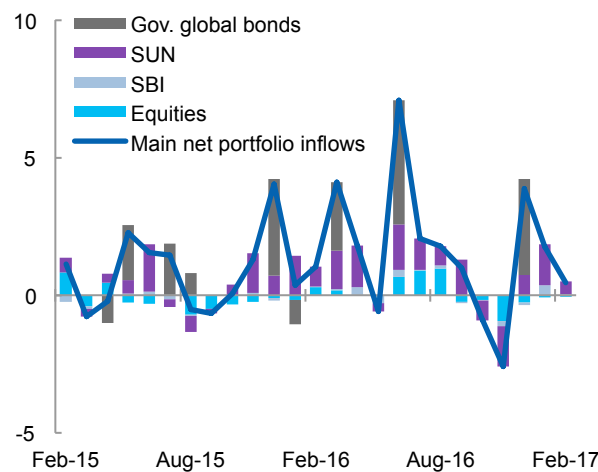
¹⁶ Bank Indonesia (2017)

neraca keuangan di
Triwulan ke-4

pajak¹⁷. Secara keseluruhan, investasi asing langsung bersih melemah di Triwulan ke-4.

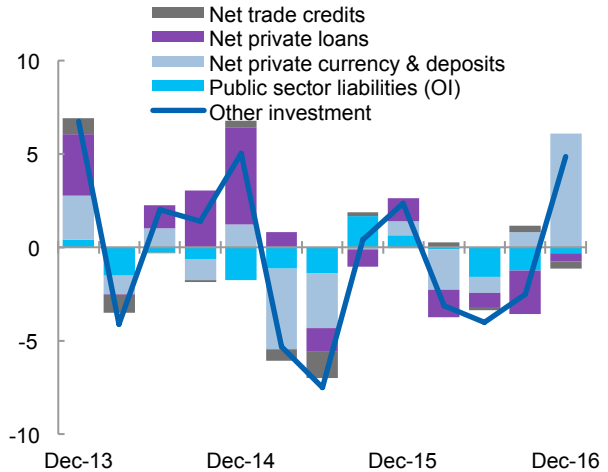
Investasi portofolio negatif di Triwulan ke-4, yang hanya terjadi dua kali dalam lima tahun terakhir.¹⁸ Hal ini didorong oleh aksi jual obligasi dan ekuitas Indonesia setelah berlangsungnya pemilu AS di bulan November (Gambar 18). Investasi lainnya bernilai besar dan positif di Triwulan ke-4, sesuai dengan pola musimannya. Pada pola musiman ini, ada arus masuk yang sangat besar dalam aset mata uang dan deposito pihak swasta (arus masuk terbesar setidaknya sejak 2004) (Gambar 19), yang mencerminkan repatriasi aset sebagai bagian dari amnesti pajak.¹⁹

Gambar 18: Investor internasional menjual saham dan obligasi Indonesia di bulan November 2016
(USD miliar)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: SUN: Surat Utang Negara, SBI: Sertifikat Bank Indonesia

Gambar 19: Arus masuk dalam aset mata uang dan deposito sektor swasta yang sangat tinggi di Triwulan ke-4
(USD miliar)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

¹⁷ Keluar masuknya FDI adalah penyaluran dana lokal ke badan yang dibentuk dengan tujuan khusus (SPVs - *Special Purpose Vehicles*) di luar negeri (biasanya didirikan di pusat-pusat keuangan di luar negeri atau di negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak/tax haven) dan selanjutnya kembalinya dana tersebut ke perekonomian lokal dalam bentuk FDI. Ketika investasi tersebut dibatalkan, hal ini menghasilkan dua transaksi yang sama dan saling mengimbangi (*offset*) di neraca pembayaran. Yang pertama, transaksi tersebut terdata sebagai pengurangan FDI di Indonesia (arus keluar/ *outflow*) karena dana dikembalikan ke SPV. Kedua, transaksi tersebut terdata sebagai pengurangan FDI di luar negeri (arus masuk/ *inflow*) karena dana dikembalikan ke Indonesia dari SPV tersebut. Dengan demikian, dampak bersih terhadap FDI adalah nol.

¹⁸ Contoh sebelumnya terjadi selama periode gejolak keuangan global. Yang pertama di Triwulan ke-3 tahun 2011, terkait dengan krisis hutang zona euro, dan yang kedua, di Triwulan ke-3 tahun 2015, terkait dengan ketidakpastian seputar kebijakan moneter AS.

¹⁹ Bank Indonesia (2016)

Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap konstan pada 1,8 persen dari PDB di tahun 2017

Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan tetap stabil di tahun 2017 sebesar 1,8 persen dari PDB (Tabel 2). Baik nilai ekspor maupun impor diperkirakan akan meningkat di tahun 2017, dengan nilai ekspor sedikit melampaui impor, yang mengakibatkan peningkatan neraca perdagangan. Harga komoditas terus meningkat di sepanjang Triwulan ke-1 tahun 2017, dan kejutan positif nilai tukar perdagangan komoditas ini diperkirakan berlangsung di sepanjang sisa tahun, yang mendukung neraca

perdagangan. Indikator-indikator utama menunjukkan bahwa pertumbuhan mungkin sedikit meningkat di beberapa mitra dagang utama Indonesia dan selanjutnya menyebabkan peningkatan ekspor. Namun demikian, ada sejumlah risiko terhadap perkiraan (*outlook*) ini, salah satunya adalah perlambatan ekonomi yang sedang berlangsung di Tiongkok (mitra dagang terbesar Indonesia). Untuk impor, khususnya impor bahan baku dan barang modal, diproyeksikan akan meningkat, sejalan dengan investasi yang diperkirakan meningkat. FDI diperkirakan akan meningkat di tahun 2017 seiring dengan pertumbuhan global dan pertumbuhan di Indonesia yang lebih tinggi. Risiko terhadap arus modal tetap ada, mengingat berlanjutnya ketidakpastian kebijakan global yang tinggi, khususnya mengenai laju normalisasi tingkat suku bunga di Amerika Serikat (lihat Kotak 1 untuk pembahasan lebih lanjut mengenai paparan Indonesia terhadap Amerika Serikat).

Tabel 2: Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap konstan pada tahun 2017*(USD miliar kecuali dinyatakan lain)*

	2016	2017p
Neraca Pembayaran secara Keseluruhan	12,9	14,1
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	1,4	1,3
Neraca Transaksi Berjalan	-16,3	-18,4
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	-1,8	-1,8
Neraca perdagangan barang	15,4	17,7
Neraca perdagangan jasa	-6,5	-7,4
Penerimaan	-29,7	-33,3
Transfer	4,4	4,6
Neraca Modal dan Finansial	29,2	32,4
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	3,1	3,1
Investasi Langsung	15,1	18,4
Investasi Portofolio	18,9	16,4
Investasi Lainnya	-4,8	-2,4

Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Kotak 1: Papan Indonesia terhadap perekonomian Amerika Serikat dan Inggris

Dalam era ketidakpastian kebijakan global saat ini dan di tengah latar belakang sentimen proteksionisme yang tinggi, box ini secara ringkas meneliti paparan Indonesia terhadap Amerika Serikat dan Inggris melalui berbagai saluran.

Amerika Serikat adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang menyumbang sekitar seperempat dari PDB dunia dan sekitar sepersepuluh dari perdagangan global.¹ Negara ini juga merupakan pemain dominan di pasar keuangan global. Inggris, walaupun tidak sebesar Amerika Serikat, masih merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia dan menyumbang 3,5 persen dari total perdagangan.² Selanjutnya, London adalah pusat keuangan terbesar dunia, yang menjadi perantara untuk sejumlah besar arus keuangan global.³ Mengingat ukuran perekonomian negara-negara ini dan hubungan mereka dengan perekonomian global, guncangan ekonomi yang menerpa atau yang berasal dari Amerika Serikat atau Inggris dapat memiliki implikasi tidak hanya bagi para mitra ekonomi terdekat mereka, tetapi juga bagi perekonomian global. Guncangan tersebut ditransmisikan melalui berbagai saluran, termasuk perdagangan, investasi, dan keuangan. Secara keseluruhan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, arus masuk investasi dari Inggris, dan pengaruh kedua negara ini terhadap pasar keuangan global, menghadirkan saluran terkuat melalui mana kebijakan di Amerika Serikat dan Inggris dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

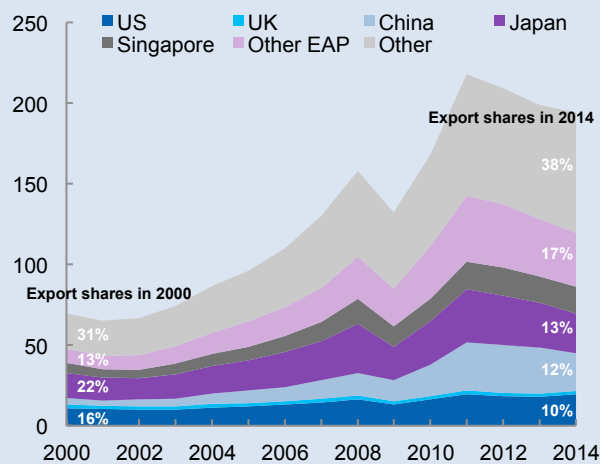
Hubungan perdagangan

Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia, yang menyumbang 10,4 persen dari total ekspor barang di sepanjang tahun 2013-2015, namun pangsa ini telah menurun dari waktu ke waktu, dari 15,5 persen di tahun 2000 (meskipun ekspor ke Amerika Serikat masih bertumbuh dalam hal tingkat) (Gambar 20). Inggris adalah tujuan ekspor yang secara signifikan lebih kecil, yang menyumbang hanya 1,0 persen dari ekspor barang Indonesia di tahun 2013-2015, yang menjadikannya sebagai negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-18. Demikian pula, ekspor ke Inggris yang telah menurun adalah bagian dari total ekspor, dari 2,7 persen di tahun 2000. Negara tujuan ekspor terbesar

Indonesia adalah Tiongkok (13,2 persen dari total ekspor) dan Jepang (13,0 persen) (Gambar 21)⁴. Sementara komoditas primer seperti bahan bakar minyak, mineral dan logam merupakan bagian terbesar dari ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Jepang, dan produk-produk manufaktur adalah bagian dominan ekspor ke Amerika Serikat, serta Inggris. Dengan demikian, gangguan di dalam arus perdagangan dengan baik Amerika Serikat maupun Inggris lebih mempengaruhi sektor manufaktur di Indonesia.⁵

Gambar 20: Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Inggris menurun sebagai bagian dari total ekspor

(ekspor menurut negara tujuan, USD miliar)

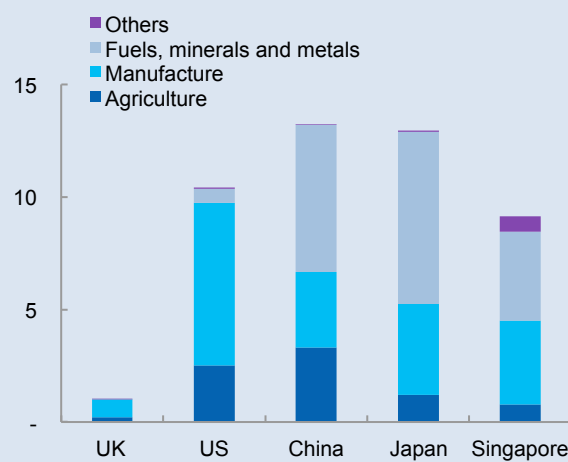


Sumber: UN Comtrade

Catatan: EAP singkatan dari East Asia dan the Pacific (Asia Timur dan Pasifik)

Gambar 21: Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia

(pangsa dari total ekspor, persen)



Sumber: UN Comtrade

Catatan: Nilai yang tercantum merupakan nilai rata-rata untuk 2013-2015

Meskipun bukan negara tujuan terbesar ekspor Indonesia, Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor yang sangat signifikan bagi mitra dagang Indonesia terbesar, Tiongkok dan Jepang, serta negara-negara lain di kawasan seperti Vietnam, yang mencatatkan lebih dari 20 persen dari ekspor mereka di sepanjang tahun 2013 -2015. Oleh karena itu, gangguan perdagangan antara Amerika Serikat dan wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP) dapat memiliki efek tidak langsung yang negatif terhadap Indonesia melalui penurunan permintaan di Tiongkok dan Jepang. Bank Dunia (2016a) menemukan bahwa satu kali saja pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun sebesar satu titik persentase dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,4 persen setelah dua tahun.

Dalam hal ekspor jasa, ekspor jasa Indonesia ke Amerika Serikat dan Inggris saat ini bernilai kecil, relatif terhadap ekspor barang⁶. Namun demikian, secara global, perdagangan jasa relatif lebih stabil dibandingkan dengan perdagangan barang, yang telah menampakkan penurunan yang signifikan.⁷ oleh karena itu, Bagian B1 dari laporan ini meneliti saluran-saluran melalui mana perdagangan jasa Indonesia dapat ditingkatkan.

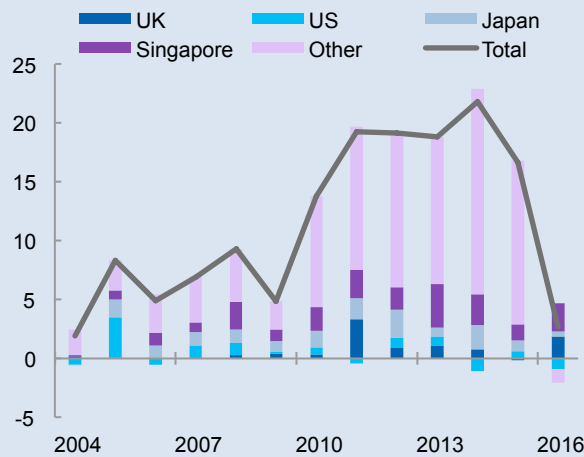
Amerika Serikat, dan pada tingkat lebih rendah Inggris, adalah pemain penting di komunitas pasar global. Amerika Serikat sendiri adalah konsumen terbesar gas alam dan minyak, di dunia yang mencatatkan lebih dari seperlima dari konsumsi global. Negara ini juga merupakan konsumen yang signifikan dari komoditas-komoditas lainnya yang diekspor oleh Indonesia, termasuk batubara dan tembaga. Pergeseran besar dalam permintaan AS untuk komoditas ini akan berdampak terhadap harga global, yang akan mempengaruhi nilai tukar perdagangan Indonesia, dan oleh karena itu berdampak pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Perbedaan harga komoditas global juga akan berdampak pada penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, belanja investasi, dan dengan demikian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hubungan investasi

FDI merupakan sumber utama investasi di Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menunjukkan bahwa investasi asing menyumbang 68 persen dari realisasi total investasi selama lima tahun terakhir. Sementara Amerika Serikat adalah sumber terbesar dan penerima FDI terbesar di dunia, Amerika Serikat bukanlah sumber utama FDI bagi Indonesia (Gambar 22). Selama tahun 2004-2016 (kurun waktu yang datanya tersedia), FDI bersih yang masuk dari Amerika Serikat menyumbang 3,3 persen dari total kumulatif investasi asing. Investasi di sektor manufaktur sebesar USD 3,0 miliar pada tahun 2005 menyumbang sebagian besar arus masuk tersebut. Inggris adalah

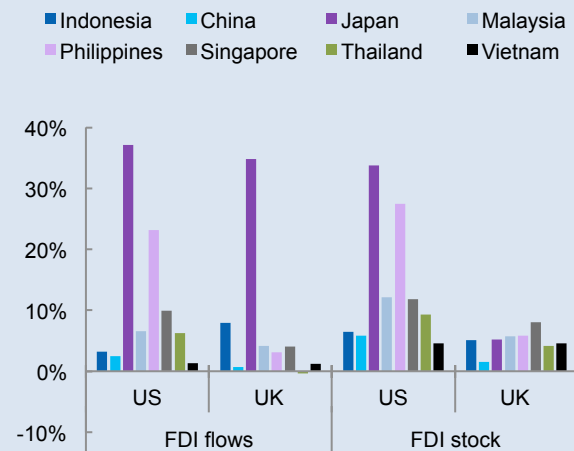
sumber FDI yang sedikit lebih besar untuk Indonesia, menyumbang 6,1 persen dari arus masuk FDI bersih selama periode yang sama, sehingga menjadikannya sebagai sumber terbesar ketiga setelah Singapura (15,0 persen) dan Jepang (10,5 persen).

Gambar 22: Inggris merupakan sumber FDI yang penting di Indonesia
(USD miliar)



Sumber: BI

Gambar 23: Indonesia kurang bergantung pada FDI dari Amerika Serikat dan Inggris dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan
(pangsa dari total arus FDI dan total stok FDI, persen)



Sumber: UNCTAD

Catatan: Data adalah hasil rata-rata selama periode 5 tahun terakhir yang tersedia untuk semua negara (2008-2012), kecuali bagi FDI yang mengalir ke Vietnam adalah hanya untuk tahun 2011-2012.

Persediaan/stok FDI adalah sama dengan total akumulasi nilai bersih FDI yang mengalir masuk dari waktu ke waktu. Angka ini menunjukkan nilai total aset investasi langsung milik asing. Indonesia tidak secara khusus membuka diri bagi Amerika Serikat atau Inggris dalam hal stok FDI. Hanya sekitar 6 persen dari porsi FDI yang berasal dari Amerika Serikat dan hanya 5 persen yang dari Inggris. Ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, terutama Jepang dan Filipina (Gambar 23), yang menerima porsi FDI yang jauh lebih besar dari Amerika Serikat.

Hubungan finansial

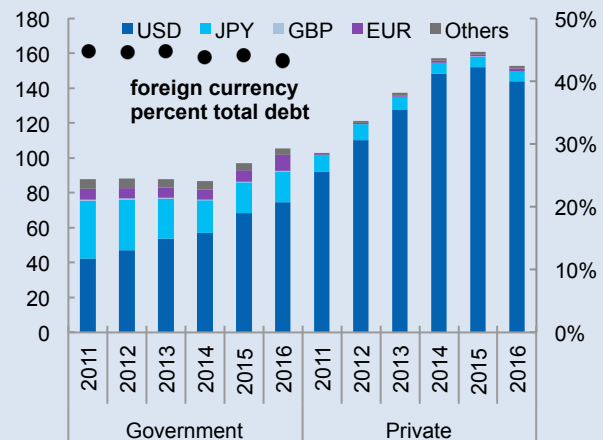
Perkembangan di Amerika Serikat dapat mempengaruhi pasar keuangan global, dan pada gilirannya mempengaruhi kondisi pembiayaan Indonesia, melalui sejumlah saluran, termasuk nilai tukar, tingkat suku bunga, dan kepercayaan investor. Perkembangan di Inggris cenderung memiliki dampak yang sama tetapi lebih kecil.

Nilai tukar

Dolar AS adalah mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan dan pasar keuangan internasional dan sebagai mata uang cadangan de-facto di dunia. Dengan demikian, pergerakan nilai tukar dolar AS memiliki implikasi global. Misalnya, apresiasi dolar AS terhadap Rupiah akan meningkatkan biaya untuk membayar pinjaman Indonesia dari pinjaman dalam mata uang dolar AS, yang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 24). Mayoritas pinjaman luar negeri baik pemerintah (70 persen) maupun swasta (94 persen) adalah dalam mata uang dolar AS; sektor swasta yang terutama terkena. Selanjutnya, proporsi pinjaman luar negeri swasta jangka pendek (29 persen) jauh lebih tinggi dari pinjaman luar negeri pemerintah (5 persen).

Gambar 24: Mayoritas hutang luar negeri Indonesia adalah dalam mata uang USD

(USD miliar, Kiri; persen dari total hutang, Kanan)

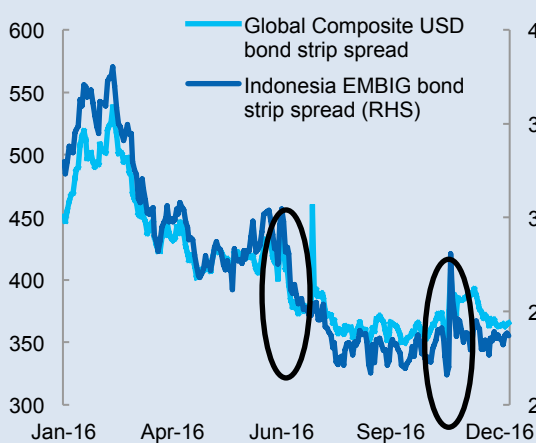


Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Tingkat suku bunga

Perubahan kebijakan moneter AS yang aktual atau yang diperkirakan akan terjadi akan berdampak terhadap tingkat suku bunga global. Sejak krisis keuangan global, kebijakan moneter yang sangat akomodatif di negara-negara maju - termasuk Amerika Serikat dan Inggris - membuat tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman bagi negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang (EMDE - *emerging market dan developing economy*) relatif lebih menarik, yang mengakibatkan peningkatan arus masuk modal untuk negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Pada gilirannya, suku bunga AS yang lebih tinggi dapat mengurangi atau membalikkan arus tersebut dan mendorong kenaikan tingkat suku bunga global, dan meningkatkan biaya pinjaman Indonesia. Analisis terbaru menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 100 basis poin pada obligasi imbal hasil jangka panjang AS dapat mengurangi arus modal ke negara-negara EMDE sebesar 20-45 persen, dengan batas atas dari kisaran ini mencerminkan kenaikan tingkat suku bunga secara simultan oleh bank sentral lainnya dan batas bawah yang mencerminkan kebijakan moneter yang tidak berubah di tempat-tempat lain.⁸

Gambar 25: Spread (selisih antar harga jual dan harga beli) obligasi meningkat di Indonesia segera setelah terjadinya referendum di Inggris dan pemilu di AS, namun pulih kembali dengan cepat (Spread obligasi tanpa bunga (strip bonds), basis poin)



Sumber: JP Morgan; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 26: Harga ekuitas juga turun, sebelum sebagian besar kerugian yang diakibatkannya pulih (barga saham, indeks, 4 Januari = 100)



Sumber: Bloomberg; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Kepercayaan investor

Lepas dari perkembangan pasar ekonomi atau keuangan, peningkatan volatilitas pasar keuangan atau ketidakpastian mengenai perubahan kebijakan AS atau Inggris dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi — baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada gilirannya hal ini dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan global jangka panjang. Analisis terbaru memperkirakan dampak volatilitas keuangan dan ketidakpastian kebijakan terhadap keluaran dan pertumbuhan negara-negara EMDE. Volatilitas pasar keuangan diukur dengan indeks VIX — volatilitas yang tersirat dari pasar saham AS. Peningkatan 10 persen dalam indeks VIX terbukti menurunkan pertumbuhan rata-rata keluaran negara-negara EMDE sebesar sekitar 0,2 persen dan pertumbuhan investasi EMDE sekitar 0,6 persentase poin setelah satu tahun. Ketidakpastian kebijakan diukur oleh Index Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi (EPU - *Economic Policy Uncertainty*), ukuran berbasis berita dari ketidakpastian kebijakan. Kenaikan 10 persen secara berkelanjutan dalam indeks EPU AS terbukti mengurangi pertumbuhan keluaran negara-negara EMDE sebesar 0,2 persen, dan pertumbuhan investasi negara-negara EMDE sebesar 0,6 persentase poin setelah satu tahun.⁹ Dampak tersebut terealisasi sampai batas-batas tertentu setelah berlangsungnya referendum Inggris dan pemilihan presiden AS baru-baru ini. Investor menghindari aset pasar negara berkembang, termasuk Indonesia (Gambar 25 dan Gambar 26). Namun demikian, di Indonesia, penurunan tersebut banyak yang berbalik naik lagi di minggu-minggu berikutnya dan kondisi pasar tetap kuat.

¹ Data adalah untuk tahun 2015

² ibid

³ Lihat *Long Finance* (2016).

⁴ Lihat World Bank (2015b) untuk analisis pentingnya perdagangan dan investasi Indonesia dengan Tiongkok.

⁵ Perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat atau Inggris dapat mempengaruhi pertumbuhan mitra dagangnya baik secara langsung, melalui perubahan permintaan impor, maupun tidak langsung, melalui limpasan (*spillovers*) produktivitas yang tertanam di dalam perdagangan, atau melalui dampak pada harga barang yang diperdagangkan.

⁶ Data perdagangan jasa bilateral sulit untuk dikumpulkan karena sifat dari jasa yang tidak berwujud tetapi juga karena diperlukan kapasitas yang tinggi untuk merekam data tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa ekspor jasa Indonesia kecil nilainya dibandingkan dengan ekspor barang, dan bahwa Amerika Serikat dan Inggris bukanlah negara tujuan utama ekspor jasa ini. Lihat perdagangan Bank Dunia dalam *database* jasa: <http://data.worldbank.org/data-catalog/trade-in-services>

⁷ Lihat Constatntinescu, C., A. Mattoo, dan M. Ruta, (2016)

⁸ World Bank (2016a)

⁹ *ibid*

5. Kondisi keuangan makro dalam negeri yang kuat

Setelah mengalami peningkatan demi peningkatan di tahun 2016, kondisi keuangan dalam negeri menjadi stabil di Triwulan ke-1

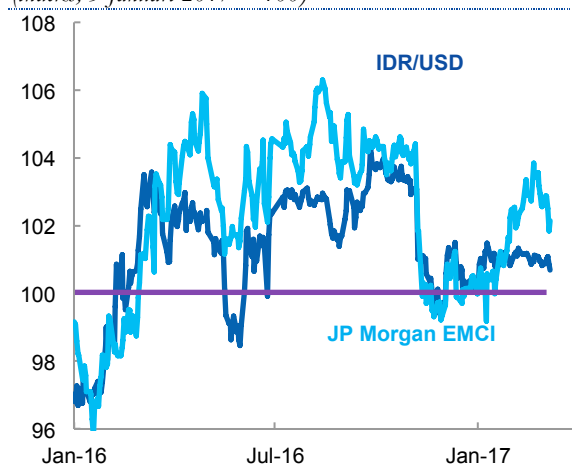
Kondisi keuangan makro dalam negeri tetap stabil selama Triwulan ke-1 tahun 2017. Berkaitan dengan keuntungan signifikan yang diraih di tahun 2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali tahun ini dengan mantap, sementara imbal hasil obligasi cenderung terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap merupakan tujuan investasi yang menarik. Kebijakan moneter tetap akomodatif setelah terjadinya pemberlakuan kebijakan penurunan suku bunga sebanyak enam kali di tahun 2016, meskipun Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa ruang untuk pelonggaran lebih lanjut mungkin telah menyempit. Kapitalisasi di sektor perbankan terus membaik, meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah tahun lalu.

Rupiah mengawali tahun ini dengan langkah yang mantap ...

Rupiah menunjukkan ketahanannya di sepanjang tahun 2016, sebagian karena intervensi BI di pasar mata uang terutama di sekitar saat berlangsungnya pemilihan presiden AS ketika ada tanda-tanda peningkatan volatilitas. Sejak awal 2017, Rupiah terapresiasi sebesar 0,8 persen, sementara mata uang negara-negara berkembang lainnya terapresiasi rata-rata sebesar 2 persen (Gambar 27). Meskipun mungkin Rupiah dapat mengalami tekanan tahun ini

Gambar 27: Rupiah mengawali tahun 2017 dengan langkah yang mantap

(indeks, 3 Januari 2017 = 100)



Sumber: CEIC; Bloomberg

Catatan: Perhitungan staf (Bank Dunia)

mengingat adanya kemungkinan normalisasi moneter AS yang terus berlanjut²⁰, secara umum diharapkan tekanan tersebut akan menjadi minimal karena investor sudah memperhitungkan perubahan harga (*priced in*) yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga Bank Sentral AS.

... demikian juga dengan Indeks Harga Saham Gabungan

IHSG telah mengawali tahun 2017 dengan mantap, tetapi tertinggal dari negara-negara setara di kawasan. Kinerja yang baik di tahun 2016 ini terutama disebabkan adanya pembalikan kerugian yang terjadi di tahun 2015. Pemulihan tetap kuat di sepanjang tahun 2016, meskipun terjadi gangguan keuangan global yang signifikan. Sub-indeks pertambangan memimpin kinerja yang baik di tahun 2016, dan stabil di

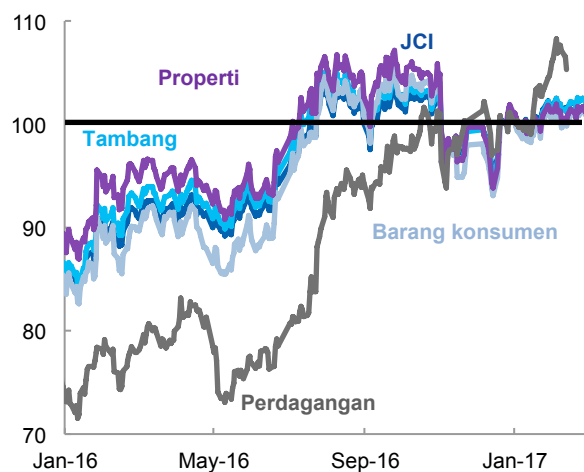
²⁰ Bank Sentral AS menaikkan suku bunga pada tanggal 15 Maret 2017 - yang pertama dari tiga kali kenaikan tingkat suku bunga yang secara umum diperkirakan akan terjadi di tahun 2017.

Triwulan ke-1 2017. Naiknya harga komoditas diperkirakan akan terus mendukung sektor pertambangan lagi tahun ini. Pertumbuhan di sub-indeks sektor perdagangan juga telah meningkat, dengan peningkatan year-to-date sebesar hampir 5 persen.

Pergerakan imbal hasil (*yield*) obligasi mengindikasikan kepercayaan investor di Indonesia yang membaik

Imbal hasil obligasi stabil menyusul kerugian yang terjadi pasca pemilihan presiden AS. Imbal hasil di semua tenor menurun menjadi rata-rata 40 basis poin lebih rendah dari posisi di awal 2017. Lelang obligasi di bulan Januari yang mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*)²¹, sekali lagi mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada perekonomian Indonesia.

Gambar 28: IHSG memasuki tahun 2017 dengan awal yang mantap
(indeks Januari 2017 = 100)



Sumber: CEIC
Catatan: Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 29: Imbal hasil obligasi menurun di tahun 2017 mencerminkan kepercayaan investor di Indonesia
(persen)

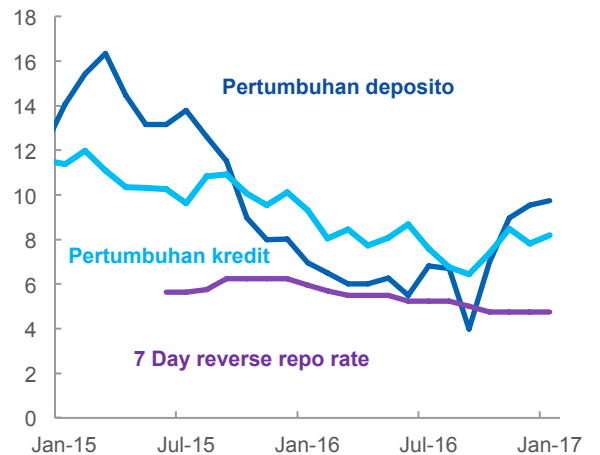


Sumber: CEIC

Kebijakan moneter tetap akomodatif dan tampaknya telah berdampak pada suku bunga kredit investasi utama

Laporan terbaru oleh BI menunjukkan bahwa kebijakan pelonggaran moneter cenderung akan dipertahankan. Meskipun posisi kebijakan ini sudah jelas, kebijakan yang ada saat ini masih akomodatif. Penurunan tingkat suku bunga BI di semester pertama 2016 tampaknya mulai berdampak ke saluran yang terkait, dengan tingkat suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing turun

Gambar 30: Pertumbuhan deposito terus meningkat
(pertumbuhan tahun-ke-tahun, persen)



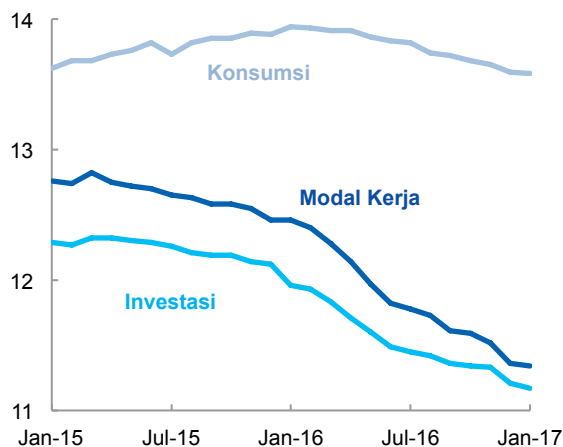
Sumber: CEIC; Bank Indonesia

²¹ Lihat DJPPR (2017a).

sebesar 110 dan 76 basis poin, sejak awal tahun 2016. Tingkat suku bunga pada pinjaman konsumsi tetap tidak berubah dan hanya turun sebesar 33 basis poin selama periode yang sama. Namun demikian, tampaknya hal ini tidak mempengaruhi pertumbuhan konsumsi yang tetap sehat.

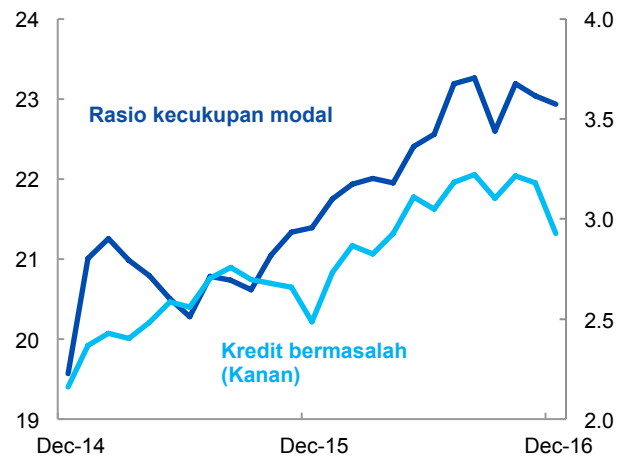
Peningkatan pertumbuhan kredit yang nampak di awal Triwulan ke-4 sepertinya tidak dapat bertahan di tahap ini. Bertahannya pertumbuhan kredit tersebut sebagian dapat dikaitkan dengan kredit bermasalah (NPL - *non-performing loan*) yang terus meningkat di tahun 2016. Peningkatan NPL tersebut tampaknya telah berbalik dalam beberapa bulan terakhir ini yang dapat menimbulkan efek ikutan (*flow-on effect*) yang positif terhadap pertumbuhan kredit. Ukuran lain dari kondisi kesehatan keuangan makro dalam negeri adalah rasio kecukupan modal (CAR), yang memberikan satu indikasi (di antara beberapa) dari apakah sistem keuangan sudah memenuhi tolok ukur internasional (Gambar 32). CAR Indonesia naik ke tingkat yang sehat sebesar 23 persen di akhir 2016 - jauh di atas persyaratan yang ditetapkan oleh Basel III. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan sehat meskipun terjadi peningkatan NPL. Pertumbuhan deposito meningkat tajam di akhir 2016. Hal ini sejalan dengan bukti non-ilmiah (*anecdotal evidence*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar arus masuk dari program Amnesti Pajak Pemerintah mungkin hanya disimpan saja di bank (sisanya tampaknya telah masuk ke pasar saham dan obligasi).

Gambar 31: Suku bunga kredit konsumsi tetap bertahan sedangkan biaya modal kerja telah menurun tajam
(persen)



Sumber: CEIC

Gambar 32: Sistem perbankan Indonesia tetap sehat meskipun terjadi peningkatan kredit bermasalah
(persen)



Sumber: CEIC

6. Kebijakan fiskal nampaknya menjanjikan di tahun 2017, reformasi diperkirakan akan berlanjut

Tekanan fiskal mereda, progres capaian sampai saat ini nampaknya menjanjikan

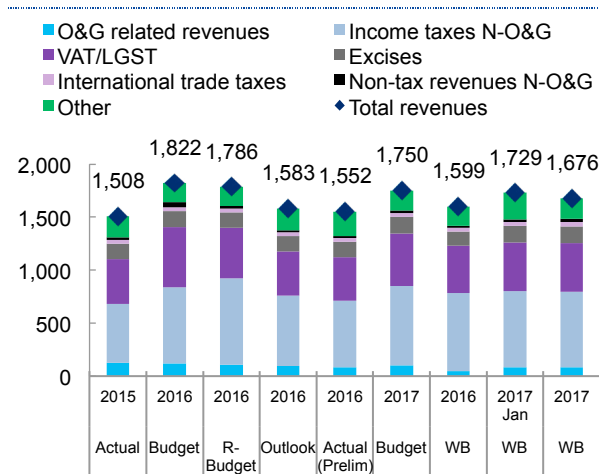
Di paruh kedua tahun 2016, Pemerintah melakukan beberapa langkah yang mengakibatkan terjadinya konsolidasi fiskal dan peningkatan kredibilitas, termasuk: revisi penurunan target pendapatan; pemotongan belanja; dan mendorong partisipasi yang tinggi dalam tahap pertama dari program amnesti pajak. Akibatnya, defisit fiskal pemerintah pusat untuk tahun 2016 adalah sebesar 2,5 persen dari PDB, lebih rendah dari perkiraan Pemerintah sebesar 2,6 persen dari PDB, dan tetap jauh di bawah batas aturan fiskal sebesar 3 persen dari PDB. Hasil di tahun 2017 sampai saat ini secara keseluruhan nampaknya menjanjikan. Di sisi penerimaan, Pemerintah

telah menetapkan target penerimaan yang lebih realistis di dalam APBN tahun 2017 (Gambar 33) dibandingkan dengan tahun 2016, dan realisasi penerimaan nominal tahun-ke-tahun di akhir Februari secara keseluruhan bertumbuh, pulih dari penurunan di Q4 2016. Di sisi pengeluaran, pelaksanaan APBN tahun 2017 sejauh ini mempertahankan momentum tersebut dibandingkan periode yang sama di tahun 2016. Pelaksanaan APBN di bulan Februari menunjukkan defisit fiskal yang relatif lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, karena pencairan belanja menurun dan penerimaan meningkat. Pembiayaan pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan target. Sampai dengan tanggal 21 Februari Pemerintah telah mengumpulkan pembiayaan sebesar Rp 149 triliun atau 45 persen dari perkiraan defisit anggaran tahun 2017²².

Penerimaan non-amnesti pajak meningkat, terutama penerimaan terkait komoditas dan PPN

Realisasi penerimaan di dua bulan pertama tahun 2017 secara nominal tumbuh sebesar 8,9 persen tahun-ke-tahun, atau 7,6 persen jika penerimaan yang didapat dari program amnesti pajak dikecualikan (Gambar 34). Pertumbuhan didorong terutama oleh penerimaan yang terkait komoditas, tetapi juga diharapkan dari sumber-sumber pajak lainnya termasuk PPN, yang meningkat lagi setelah penurunan nominal yang mengecewakan di tahun 2016. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini masuk akal. Pertumbuhan saat ini pada realisasi penerimaan pajak bulanan belum mampu mengangkat penerimaan secara nominal pada tingkat yang sama dengan tingkat yang dicapai di tahun 2015 atau 2014, pada titik ketika penerimaan pajak harus ditingkatkan terkait dengan tahun-tahun yang didukung oleh reformasi pajak untuk memenuhi target penerimaan tahun ini.

Gambar 33: APBN 2017 yang sudah disetujui mencakup target penerimaan yang lebih realistis (Rp triliun)

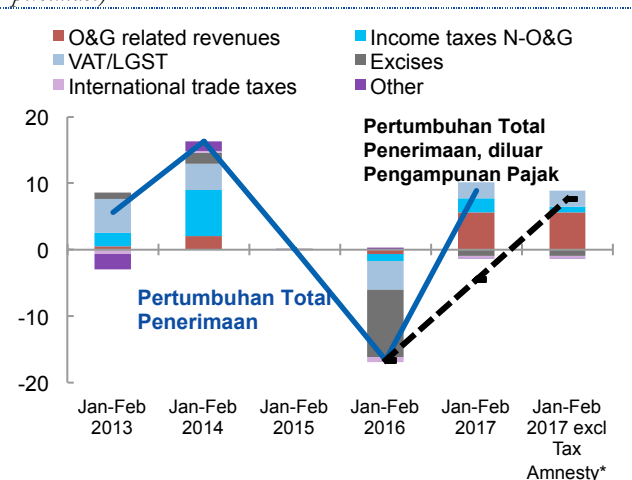


Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Migas singkatan dari minyak dan gas, N-Migas singkatan dari non-minyak dan gas; PPnBM singkatan dari pajak penjualan barang mewah; "Lainnya" meliputi: PBB, penerimaan pajak lainnya; PNBPN non-minyak dan gas; PNBPN lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBPN lainnya (PNBPN). Pada Gambar 34, Jan-Feb 2015 terlihat pertumbuhan tahun-ke-tahun nol dibandingkan dengan Jan-Feb 2014, yang menyebabkan grafik tidak menunjukkan aliran penerimaan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan untuk tahun tersebut.

Gambar 34: Pertumbuhan penerimaan sampai saat ini di tahun ini (year to date) lebih tinggi di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, namun masih lebih rendah dari tahun 2015 dan 2014

(kontribusi untuk pertumbuhan penerimaan tahun-ke-tahun, poin persentase)



²² lihat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (2017b)

Tahap akhir dari program amnesti pajak akan berakhir di Triwulan ke-1 tahun 2017 dengan kemajuan capaian tahap ketiga yang lambat sampai saat ini

Program amnesti pajak Indonesia akan berakhir dengan berakhirnya tahap ketiga pada tanggal 31 Maret. Penerimaan year-to-date di tahap akhir ini kecil, meskipun sesuai dengan perkiraan Pemerintah yang tidak terlalu besar²³: tambahan Rp 2 triliun dari biaya penebusan telah terkumpul di atas Rp 103 triliun yang terkumpul pada tahun 2016 di tahap satu dan dua, sehingga total keseluruhan menjadi Rp 105 triliun, atau 63,6 persen dari Rp 165 triliun target pemerintah. Repatriasi/pemulangan aset yang berada di luar negeri tetap relatif sangat rendah terhadap target pemerintah, yang mencapai Rp 145 triliun, atau 14,5 persen dari Rp 1.000 triliun target pemerintah. Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar Rp 89,6 triliun, 63,5 persen dari repatriasi aset yang dilakukan di tahap satu dan dua sebenarnya telah direpatriasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.²⁴

Pencairan belanja tetap rendah, namun diperkirakan akan meningkat di Triwulan ke-2

Pada bulan Februari, pencairan anggaran tetap rendah hanya mencapai 11 persen dari total belanja dibandingkan dengan 12 persen pada periode yang sama tahun 2016. Dengan pengecualian dari belanja sosial dan material, total belanja, belanja modal, dan transfer ke Pemerintah Daerah semuanya mencatatkan penurunan nominal dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 (Gambar 35). Hal ini sebagian disebabkan oleh efek dasar dari pencapaian (*outturns*) yang tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Namun demikian, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat meningkat di Triwulan ke-2 didukung oleh kelanjutan dari inisiatif pengadaan awal yang dilaksanakan di sejumlah kementerian. Misalnya, pada bulan Januari 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kementerian lini utama dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, telah melakukan pengadaan proyek senilai Rp 33 triliun, atau sekitar sepertiga dari alokasi anggaran.²⁵

Belanja fiskal di tahun 2017 akan berfokus pada sektor-sektor infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial melalui belanja pusat dan daerah

Seperti yang sudah dibahas di dalam IEQ (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia) edisi bulan Januari 2017, APBN memuat alokasi yang lebih tinggi pada infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial (selain 20 persen dari total alokasi anggaran wajib untuk pendidikan) dan pengurangan lebih lanjut dalam belanja subsidi energi (Gambar 36). Secara khusus, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah di tahun 2017²⁶. Awal tahun 2017, Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 25 persen dana transfer umum (dana hibah umum dan dana bagi hasil) untuk infrastruktur. Suntikan modal ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait infrastruktur yang diberikan pada tahun 2015 dan 2016 (Rp 29 triliun dan Rp 36 triliun) diharapkan dapat memberikan pengaruh tambahan untuk belanja modal BUMN di tahun 2017.²⁷

Selain itu, dana transfer ke Pemerintah Daerah dan Dana Desa ditetapkan untuk ditingkatkan di tahun 2017 sebesar 8 persen tahun-ke-tahun, kurang lebih setara

²³ Lihat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2017) untuk jumlah terkini dari program amnesti pajak. Angka yang dikutip di sini sebagaimana yang dilaporkan oleh DJP pada tanggal 6 Maret 2017.

²⁴ Data yang dilaporkan oleh DJP selama presentasi berjudul “Apa yang berikutnya setelah amnesti pajak?” UBS Indonesia Conference 2017, 6 Maret, 2017

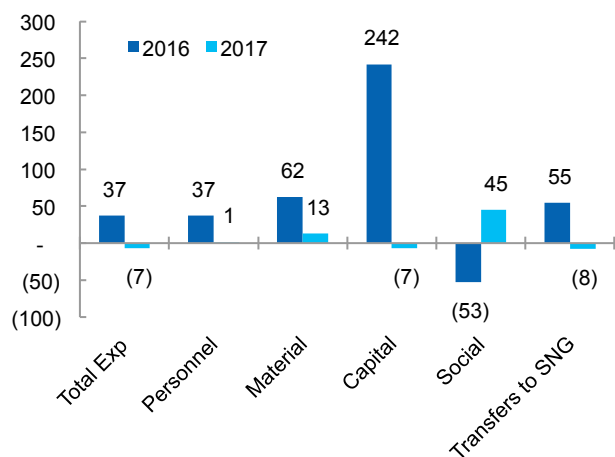
²⁵ Lihat Detik.com (12 Januari 2017)

²⁶ target pembangunan infrastruktur pemerintah untuk tahun 2017 meliputi 815 km jalan nasional, 550 km jalur kereta api, 13 bandara, dan 55 pelabuhan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016)

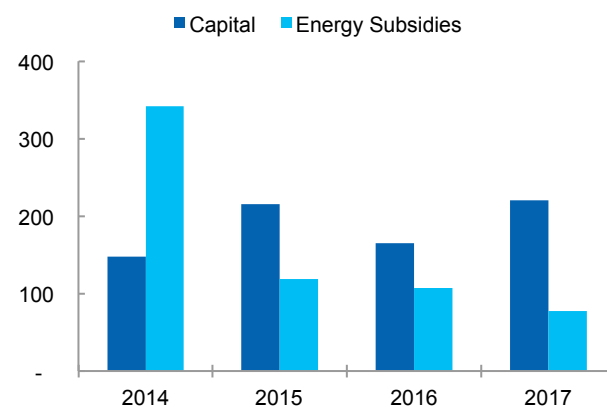
²⁷ Untuk APBN 2017, Pemerintah mengalokasikan suntikan modal untuk manajemen aset dari Badan Layanan Umum (BLU) dan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara (BUMN). Tidak ada alokasi yang disediakan langsung ke BUMN infrastruktur.

dengan jumlah total yang dialokasikan untuk kementerian-kementerian lini. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih lanjut dan mengembangkan daerah terluar Indonesia. Namun demikian, perbaikan terus menerus dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan untuk memastikan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci diterjemahkan ke dalam hasil yang lebih baik.

Gambar 35: Realisasi belanja masih tetap lemah
(pertumbuhan belanja aktual Jan-Feb tahun-ke-tahun, persen)



Gambar 36: Belanja modal diproyeksikan meningkat di tahun 2017, sementara belanja untuk subsidi energi diperkirakan akan menurun
(Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu; Perhitungan staf Bank Dunia

Note: Angka realisasi bulan Februari 2016 termasuk tambahan hari pengeluaran karena bulan Februari berakhir di tanggal 29, sedangkan pada tahun 2017, bulan Februari berakhir di tanggal 28

Defisit fiskal diproyeksikan menjadi 2,6 persen dari PDB di tahun 2017

Sejalan dengan Perkiraan Makroekonomi di tahun 2017 dan reformasi kebijakan pajak dan administrasi yang sedang berlangsung, Bank Dunia memproyeksikan total penerimaan akan mencapai Rp 1.676 triliun pada tahun 2017, meningkat delapan persen dalam nominal penerimaan tahun-ke-tahun. Pertumbuhan penerimaan ini diharapkan akan menjadi pertumbuhan dengan basis yang luas, dengan proyeksi peningkatan dalam penerimaan PPh, PPN, cukai dan PNBPN. Total pengeluaran diproyeksikan mencapai Rp 2.034 triliun pada tahun 2017, peningkatan nominal sebesar 9,4 persen tahun-ke-tahun, yang sebagian besar didorong oleh proyeksi peningkatan belanja modal. Secara keseluruhan, Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB (tidak berubah dari Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia edisi bulan Januari 2017), lebih tinggi dari APBN tahun 2017 sebesar 2,4 persen dari PDB (Tabel 3). Defisit fiskal yang diproyeksikan lebih tinggi ini mengasumsikan proyeksi penerimaan yang sedikit lebih rendah dari target di dalam APBN (perbedaan sebesar Rp 75 triliun), sebagian besar karena proyeksi yang lebih kecil untuk penerimaan pajak penghasilan non-migas dan PPN.²⁸ Hal ini juga mengasumsikan bahwa prioritas pemerintah adalah untuk menjaga kenaikan nominal pengeluaran fiskal, khususnya pada belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Ada risiko penurunan maupun

Pelambatan dalam reformasi administrasi dan kebijakan pajak merupakan salah satu risiko penurunan (*downside risk*) terhadap penerimaan. Jika risiko ini terwujud,

²⁸ Proyeksi Bank Dunia untuk penerimaan dari minyak dan gas mengasumsikan tingkat produksi yang lebih rendah, meskipun dengan harga yang lebih tinggi.

peningkatan terhadap proyeksi penerimaan

perkiraan belanja untuk tahun 2017 akan terpengaruh, dengan risiko pemotongan anggaran yang mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2016. Di sisi lain, APBN tahun 2017 mengadopsi asumsi harga minyak mentah yang konservatif, sebesar USD 45 (per barrel) dan asumsi yang juga konservatif untuk komoditas-komoditas lainnya. Dengan demikian, penerimaan terkait sumber daya alam dapat mendatangkan risiko peningkatan (*upside risk*) yang dapat mengimbangi dampak dari pelambatan reformasi jika memang pelambatan tersebut terwujud. Dalam skenario yang paling optimis, harga komoditas terus tumbuh dan Pemerintah mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak. Jika skenario ini terlaksana, maka penerimaan pemerintah mungkin akan melebihi peningkatan yang diperkirakan dan dengan asumsi pengeluaran tidak direvisi meningkat, defisit fiskal kemungkinan akan turun di bawah 2,6 persen. Pemantauan ketat terhadap perkembangan fiskal di triwulan mendatang akan memberikan kejelasan apakah skenario ini lebih memungkinkan untuk terlaksana di akhir tahun.

Pemerintah menerapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mempercepat pembangunan infrastruktur

Untuk membantu memobilisasi investasi untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah baru-baru ini meluncurkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PIN A).²⁹ Ini adalah skema pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur yang melengkapi inisiatif yang sudah ada untuk mendorong kemitraan pemerintah dan swasta (*PPP - public private partnership*). Peluncuran skema ini juga ditandai dengan kesepakatan pendanaan (*financial closing*) dari proyek jalan tol yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (BUMN konstruksi) sebagai proyek pertama yang mengadopsi skema PIN A ini. PT SMI (perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara Indonesia) dan PT Taspen (perusahaan dana pensiun pegawai negeri) secara bersama-sama menyediakan pembiayaan investasi dalam bentuk ekuitas kepada PT Waskita Toll Road, yang saat ini memiliki konsesi 15 ruas jalan tol. Transaksi tersebut dapat memberikan kontribusi penting untuk mengatasi tantangan infrastruktur Indonesia. Namun demikian, perhatian yang terus menerus pada peningkatan peran sektor swasta untuk memastikan penetapan harga berbasis pasar tetaplah penting.

Tim Reformasi mengawasi agenda reformasi yang ambisius ini, yang jika diterapkan, secara signifikan akan meningkatkan rasio pajak terhadap PDB

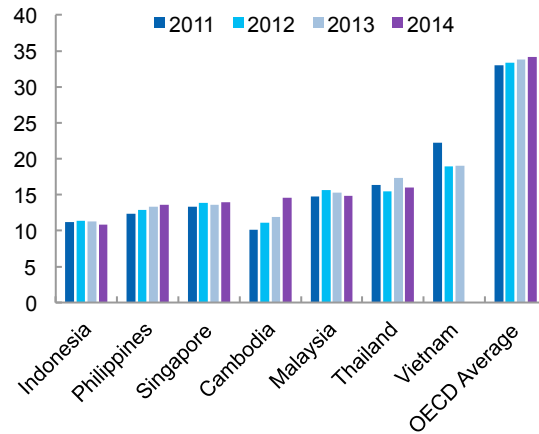
Tim Reformasi yang baru dari Kementerian Keuangan bekerja cepat untuk menetapkan peta jalan terinci untuk agenda reformasi pajak empat tahun.³⁰ Reformasi ini akan dipusatkan pada tiga pilar administrasi dan satu pilar kebijakan: struktur organisasi dan proses bisnis; sumber daya manusia; sistem TI; dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Strategi baru ini termasuk daftar reformasi yang dengan segera harus disusun (*quick-wins*) untuk mata/item reformasi yang dimaksudkan untuk segera dilaksanakan oleh Pemerintah di tahun 2017, tetapi yang lebih penting, tim tersebut menetapkan pekerjaan pada reformasi multi-tahun yang mendasar, termasuk investasi dalam sistem TI yang baru. Selain itu, pada administrasi pajak, berakhirnya program amnesti pajak menggeser perhatian pada pertanyaan mengenai apakah Pemerintah akan mampu melakukan sesuatu dengan menggunakan data yang baru dikumpulkan tersebut.

²⁹ Untuk rincian lebih lanjut, lihat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (12 Februari 2017)

³⁰ Selain Tim Reformasi Perpajakan, Kementerian Keuangan juga menetapkan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan Dan Cukai. Pekerjaan tim ini difokuskan pada satu pilar administrasi dan satu pilar kebijakan: struktur organisasi dan sumber daya manusia; dan peraturan perundang-undangan bea dan cukai. Tim Penguatan Reformasi Bea dan Cukai bertujuan untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai dan mengatasi tantangan yang sudah lama ada di wilayah reformasi bea dan cukai. (BKF, 2017)

Jika Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berhasil menggunakan data yang dikumpulkan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak, maka mungkin ada manfaat jangka panjang dari program amnesti pajak ini. Di sisi kebijakan, reformasi peraturan (*regime*) PPN dan pajak yang mengatur usaha menengah, kecil dan mikro (PP46) dapat diprioritaskan, sama seperti, mungkin, undang-undang pajak penghasilan. Reformasi yang diusulkan ini pada umumnya berusaha untuk memperluas basis pajak, mengurangi pembebasan (pajak), dan menurunkan biaya kepatuhan. Jika Pemerintah mampu untuk berhasil melewati rintangan legislatif dan melaksanakan reformasi yang positif pada wilayah-wilayah tersebut, maka tahun 2017 akan terbukti menjadi tahun yang besar bagi reformasi struktural yang bermakna. Dengan hadirnya Indonesia di antara negara-negara di kawasan sebagai salah satu negara dengan rasio pajak terhadap PDB yang terendah, ini akan menjadi perkembangan yang positif (Gambar 37).

Gambar 37: Rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang setara
(persen dari PDB)



Sumber: IMF; Perhitungan Bank Dunia

Tabel 3: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah daripada di APBN tahun 2017
(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2016	2016	2017	2017
	Aktual teraudit	APBN	Aktual (Prelim)	APBN	Bank Dunia
A. Penerimaan	1.508	1.822	1.552	1.750	1.676
(% PDB)	13,1	14,6	12,5	12,8	12,4
1. Penerimaan pajak	1.240	1.547	1.284	1.499	1.435
(% PDB)	10,7	12,4	10,3	10,9	10,6
Pajak penghasilan	602	757	667	788	744
Migas	50	41	36	36	36
Non-Migas	553	716	631	752	708
PPN/PPnBM	424	572	411	494	463
PBB	29	19	19	17	21
Cukai	145	146	143	157	157
Pajak perdagangan internasional	35	40	35	34	41
Bea masuk	31	37	32	34	38
Bea ekspor	4	3	3	0	3
Pajak lainnya	6	12	8	9	9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	256	274	262	250	237
(% PDB)	2,2	2,2	2,1	1,8	1,8
Penerimaan sumber daya alam	101	125	66	87	76
Migas	78	79	45	64	49
Non-Migas	23	46	21	23	26
Penerimaan bukan pajak lainnya	155	149	197	163	162
3. Hibah	12	2	6	1	3
B. Belanja	1.806	2.096	1.860	2.080	2.034
(% PDB)	15,6	16,8	14,9	15,2	15,0
1. Pemerintah Pusat	1.183	1.326	1.149	1.316	1.280
(% PDB)	10,3	10,6	9,2	9,6	9,4
Pegawai	281	348	305	345	329
Barang	233	325	258	270	261
Modal	215	202	165	221	210
Pembayaran bunga pinjaman	156	185	183	221	222
Subsidi	186	183	175	160	159
Energi	119	102	107	77	82
BBM	61	64	44	32	33
Listrik	58	38	63	45	49
Non-energi	67	81	68	83	77
Hibah	4	4	7	2	8
Sosial	97	55	50	56	54
Lainnya	10	25	7	41	39
2. Transfer ke daerah	623	770	711	760	753
(% PDB)	5,4	6,2	5,7	5,5	5,6
Saldo Keseluruhan	-298	-274	-308	-330	-357
(% PDB)	-2,6	-2,2	-2,5	-2,4	-2,6
<i>Asumsi</i>					
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)	4,8	5,3	5,0	5,1	5,2
IHK (%)	6,4	4,7	3,5	4,0	4,3
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.458	13.900	13.309	13.300	13.359
Harga Minyak Mentah (USD/barrel)	51	50	39	45	55

Sumber: Kemenkeu

Catatan: Proyeksi Bank Dunia tidak termasuk potensi penerimaan dari amnesti pajak

7. Tingkat pengangguran yang rendah dan pertumbuhan upah riil yang meningkat mendanakan periode pasar tenaga kerja yang ketat, namun kecepatan formalisasi telah melambat

Tingkat pengangguran telah menurun karena pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja

Tingkat pengangguran yang terlihat sedikit meningkat di tahun 2015 berbalik di tahun 2016. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran inti turun dari 5,1 persen pada bulan Agustus 2015 menjadi 4,6 persen pada bulan Agustus 2016 (Gambar 38).³¹ Ini adalah angka pengangguran inti terendah sejak 2012. Hal ini mencerminkan pertumbuhan lapangan kerja yang melampaui pertumbuhan tenaga kerja.

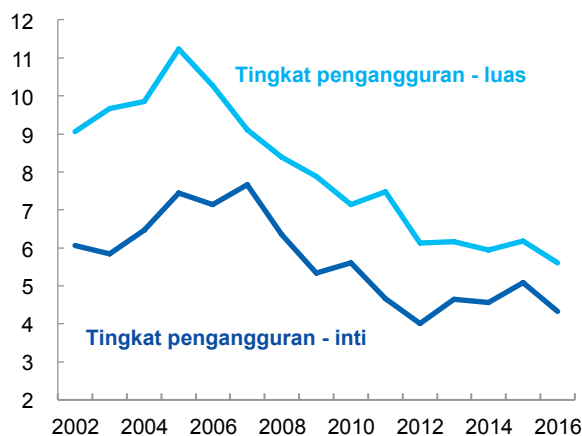
Antara Agustus 2015 dan Agustus 2016, angkatan kerja tumbuh sebesar 2,3 persen menjadi 123,8 juta, sementara jumlah pekerja yang dipekerjakan tumbuh sebesar 3,1 persen menjadi 118,4 juta. Hal ini membuat proporsi penduduk usia kerja yang bekerja menjadi sebesar 62,6 persen, naik dari 61,7 persen pada Agustus 2015, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 65,5 persen, naik sedikit dari 65,0 persen pada Agustus 2015.³² Namun demikian, perbedaan gender yang besar tetap ada: untuk wanita, TPAK adalah sebesar 49,9 persen dibandingkan dengan TPAK sebesar 81,0 persen untuk laki-laki.

Pertumbuhan upah riil tampaknya telah menguat karena ketatnya pasar tenaga kerja ...

Pengetatan pasar tenaga kerja Indonesia juga tampaknya memiliki dampak mendalam pada pertumbuhan upah. Setelah penurunan sebesar 2,6 persen tahun-ke-tahun di tahun 2015, data BPS menunjukkan bahwa antara Agustus 2015 dan Agustus 2016, median penghasilan bulanan riil tumbuh secara mengejutkan sebesar 22,9 persen (Gambar 39).³³ Peningkatan ini diimbangi dengan lompatan serupa untuk median penghasilan bulanan nominal, yang tumbuh sebesar 21,0 persen di waktu yang sama. Mungkin ini sebagian disebabkan karena penyesuaian pertumbuhan upah kembali ke tren yang ada sebelum tahun 2014: selama periode 2014-2015, angka median untuk upah riil menurun sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun, sedangkan selama periode 2012-2013, median upah riil tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun.

Gambar 38: Tingkat pengangguran inti turun ke tingkat terendah sejak tahun 2012

(tingkat pengangguran, persen)



Sumber: Sakernas

³¹ Tingkat pengangguran inti didefinisikan sebagai proporsi orang-orang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Ini harus dibedakan dari 'pengangguran secara luas', yang juga termasuk mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers), mereka yang mendirikan usaha baru, dan mereka yang memiliki pekerjaan di masa depan yang sedang diatur.

³² Populasi usia kerja mencakup semua individu yang berusia 15 tahun ke atas.

³³ Meskipun ada perubahan pada kuesioner Sakernas ini antara bulan Agustus 2015 dan bulan Agustus 2016, dan ukuran sampel dikurangi, hal ini seharusnya tidak mempengaruhi keterwakilan data di tingkat nasional.

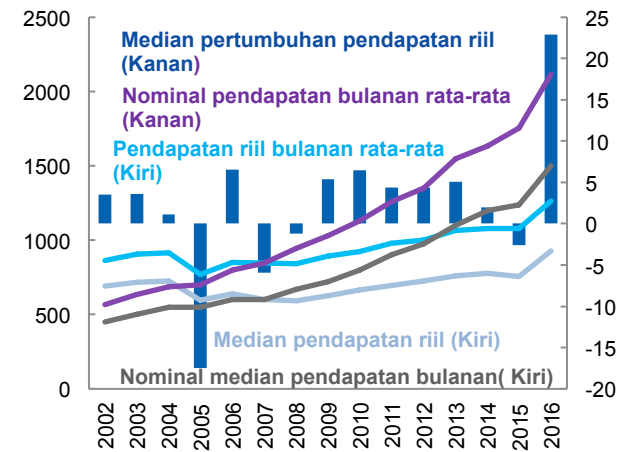
... namun pertumbuhan upah ini belum dinikmati secara merata di seluruh perekonomian Indonesia

Meskipun semua sektor menikmati pertumbuhan pendapatan riil yang kuat di tahun lalu hingga bulan Agustus 2016, beberapa industri tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Sektor jasa mengungguli pertanian dan industri primer lainnya. Antara bulan Agustus 2015 dan bulan Agustus 2016, median pendapatan riil tumbuh 37,2 persen pada jasa keuangan dan 24,3 persen pada layanan jasa kemasyarakatan, sosial, dan pribadi. Sementara itu, peningkatan di sektor pertambangan dan galian – di mana median pendapatan riil telah menurun tajam dengan rata-rata 7,4 persen per tahun selama tahun 2014 dan 2015 – hanya sebesar 14,4 persen. Oleh karena itu, beberapa sektor belum sepenuhnya mendapatkan pengganti kerugian upah yang dialami selama dua tahun sebelum tahun 2016.

Indonesia terus meningkatkan formalisasi lapangan kerja, didorong oleh perluasan basis sektor lapangan kerja dengan menerima upah ...

Indonesia melanjutkan upaya meningkatkan jumlah pekerja formal dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mencapai titik balik di tahun 2016. Menurut definisi resmi BPS, sektor formal – yang terdiri 58,3 juta pekerja pada bulan Agustus 2016 – hampir melampaui sektor informal – dengan jumlah pekerja sebesar 60,1 juta pekerja.³⁴ Hal ini tampaknya disebabkan oleh pertumbuhan upah kerja, yang terdiri dari 38,7 persen dari angkatan kerja di bulan Agustus 2016 (Gambar 40). Sebaliknya, proporsi pekerja mandiri non-pertanian – sekitar setengah dari mereka tergolong

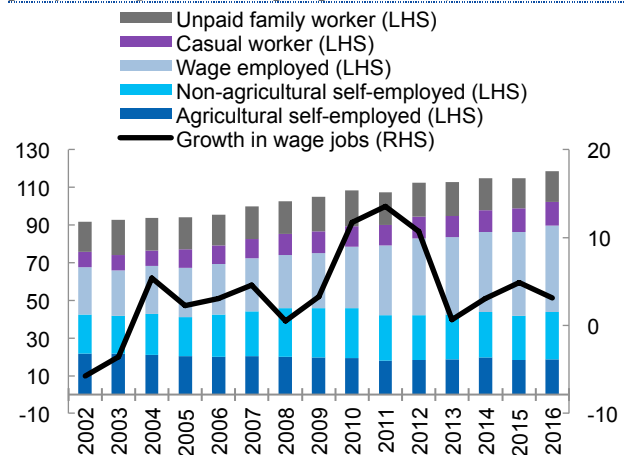
Gambar 39: Pertumbuhan pendapatan riil nampaknya secara signifikan meningkat di tahun 2016
(pendapatan, ribuan Rupiah, Kiri; median pertumbuhan tahun-ke-tahun penghasilan bulanan secara riil, persen, Kanan)



Sumber: Sakernas

Gambar 40: Jumlah tenaga kerja: Proporsi pekerja yang bekerja pada pekerjaan dengan menerima upah terus meningkat, tetapi dengan tingkat yang melambat

(jumlah pekerja, juta, Kiri; pertumbuhan tahun-ke-tahun jumlah pekerjaan dengan menerima upah, persen, Kanan)



Sumber: Sakernas

³⁴ Definisi resmi BPS dari pekerja tetap menggunakan informasi status pekerjaan - termasuk apakah seseorang adalah pekerja penerima upah atau pekerja mandiri - dan sektor atau industri dari pekerjaannya. Beberapa publikasi BPS menggunakan definisi yang disederhanakan, yang mengklasifikasikan hanya pekerja upah dan pengusaha wiraswasta yang dibantu oleh satu atau lebih pekerja tetap formal. Menurut definisi sederhana ini, ada 50,2 juta pekerja formal dan 68,2 juta pekerja informal di Indonesia pada bulan Agustus 2016.

formal, dan yang membentuk hampir semua sisa sektor formal – relatif konstan.

... namun laju formalisasi telah melambat dalam beberapa tahun terakhir ini

Namun, meskipun perluasan sektor formal berlanjut hingga 2016, pertumbuhan baru dalam jumlah pekerjaan dengan menerima upah relatif lambat. Jumlah pekerja penerima upah tumbuh rata-rata hanya 2,9 persen per tahun selama periode 2013-2016, dibandingkan dengan 9,8 persen dalam empat tahun sebelumnya. Pelambatan dalam penciptaan lapangan kerja dengan menerima upah ini menghadirkan potensi perangkap di masa depan bagi upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran bersama, karena penciptaan pekerjaan produktif tetap menjadi bagian penting dari berbagi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

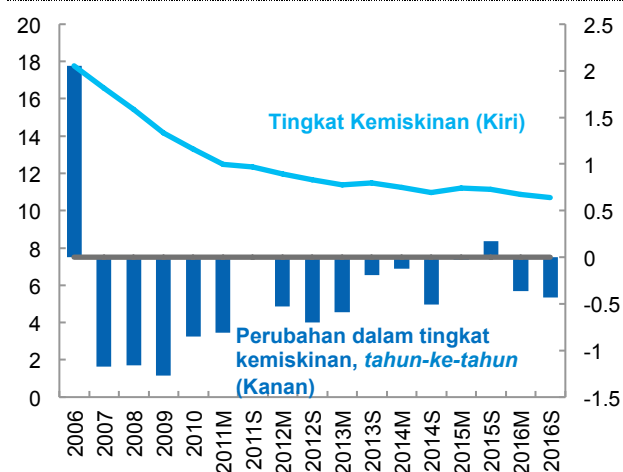
8. Kemiskinan dan ketimpangan terus menurun

Tingkat kemiskinan terus menurun di tahun 2016

Angka kemiskinan resmi adalah 10,7 persen pada bulan September 2016, 0,4 persen lebih rendah dari di bulan September 2015. Penurunan baru-baru ini adalah lanjutan dari penurunan pertama yang nampak di bulan Maret 2016, ketika tingkat kemiskinan turun 0,4 poin persentase tahun-ke-tahun. Pada saat yang sama, angka kemiskinan turun 0,7 poin persentase selama setahun, menjadi 27,8 juta orang pada bulan September 2016. Meskipun laju penurunan kemiskinan sudah lebih baik dari stagnasi antara tahun 2013 dan 2015 (Gambar 41), ini masih lebih lambat daripada laju penurunan kemiskinan antara tahun 2007 dan 2011, yang rata-rata sebesar 1,1 poin persentase per tahun³⁵.

Gambar 41: Penurunan angka kemiskinan antara September 2015 dan September 2016 lebih besar dari tahun-tahun terakhir, namun tetap lebih kecil dari tingkat penurunan sebelum tahun 2011

(tingkat kemiskinan, persen, Kiri; perubahan angka kemiskinan, poin persentase, Kanan)



Sumber: Susenas
Catatan: M adalah Maret dan S untuk September

Garis kemiskinan hanya mengalami sedikit peningkatan pada bulan September 2016, karena harga makanan yang stabil

Tren penurunan tingkat inflasi dan harga makanan yang stabil telah bertahan sejak pengkinian (*update*) yang terakhir mengenai kemiskinan³⁶, dan terus berkontribusi bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan yang relatif kecil di garis kemiskinan. Garis kemiskinan di bulan September 2016 hanya naik sebesar 5,0 persen tahun-ke-tahun menjadi Rp 361.990, kurang dari kenaikan di bulan September antara tahun 2014-2015 (10,4 persen) dan 2013-2014 (6,6 persen).

Koefisien Gini, ukuran ketimpangan, juga

Koefisien Gini untuk bulan September 2016 adalah 39,4, atau 0,8 poin lebih rendah dari pada bulan September 2015 (Gambar 42). Setelah bertahan stagnan antara tahun 2011 dan 2015, koefisien Gini sekarang telah turun selama tiga periode survei

³⁵ Penting untuk dicatat bahwa angka kemiskinan di bulan September tidak langsung sebanding dengan angka kemiskinan di bulan Maret, karena kemiskinan musiman belum dipahami dengan baik.

³⁶ Lihat World Bank (2016b). Bagian A, Sub-bagian 7.

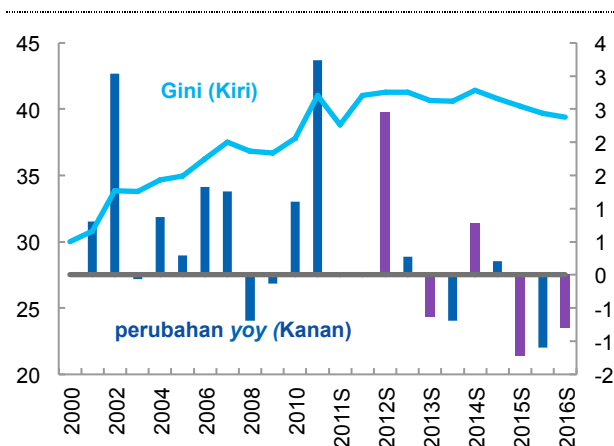
menurun

secara berturut-turut.

Meskipun Koefisien Gini turun, strata 40 Terbawah masih tertinggal

Pendorong utama dari penurunan Koefisien Gini antara bulan September 2015-2016 adalah pertumbuhan konsumsi yang tinggi dari masyarakat yang tergolong strata 40 Menengah (Kuintil konsumsi 3 dan 4) (Tabel 4). Mengulang perubahan total konsumsi nasional yang terjadi di bulan Maret 2015-2016, data di bulan September 2016 menunjukkan bahwa pangsa strata 40 Menengah meningkat 1,63 poin persentase, terutama dengan mengorbankan strata 20 Teratas (Kuintil 5), yang pangsa konsumsinya menurun 1,29 poin persentase. Namun, rumah tangga strata 40 Terbawah juga mengalami penurunan sebesar 0,34 persen di dalam pangsa konsumsi mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun strata 40 Menengah mulai mengejar strata 20 Teratas, strata 40 Terbawah masih tertinggal.

Gambar 42: Setelah naik dalam kurun waktu lama, koefisien Gini telah menurun secara tahun-ke-tahun selama tiga periode survei berturut-turut
(Koefisien Gini, poin; perubahan koefisien Gini, poin)



Catatan: S di sumbu x adalah untuk bulan September. Perubahan tahun-ke-tahun untuk data September, yang hanya tersedia sejak 2011 disoroti dengan warna ungu.

Tabel 4: Ketimpangan terus menurun karena meningkatnya konsumsi warga yang berada di dalam strata 40 Menengah, tetapi yang berada di dalam strata 40 Terbawah masih tertinggal

(distribusi konsumsi nasional di Indonesia, September 2015 - 2016)

Periode	40	40	20
	Terbawah	Menengah	Teratas
Sept 2015	17,45	34,70	47,85
Sept 2016	17,11	36,33	46,56
Δ 2015-2016	-0,34	+1,63	-1,29

Sumber: Berita Resmi Statistik No.15/02/Th.xx (BPS 2017)

Namun demikian, masih diperlukan banyak pekerjaan untuk menurunkan ketimpangan dan memenuhi target Pemerintah

Meskipun terjadi penurunan baru-baru dalam koefisien Gini, ketimpangan tetap jauh lebih tinggi dari pada tahun 2000, setelah Indonesia pulih dari krisis keuangan Asia. Antara tahun 2000 dan 2011, koefisien Gini meningkat dari 30 menjadi 41, menjadikannya salah satu negara dengan ketimpangan yang meningkat paling cepat di wilayah. Pemerintah Indonesia telah membuat upaya penurunan ketimpangan sebagai prioritas, dan telah menetapkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) untuk menurunkan koefisien Gini menjadi 36 pada tahun 2019. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan upaya bersama untuk mengatasi pendorong utama ketimpangan: memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan akses terhadap pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik untuk semua orang, membangun ketahanan terhadap guncangan, dan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih inklusif.³⁷

³⁷ Lihat World Bank (2015) untuk analisis terinci pada pendorong meningkatnya ketimpangan di Indonesia.

9. Prospek pertumbuhan ekonomi dan risiko

Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat	Secara keseluruhan, fundamental ekonomi Indonesia terus menguat, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, defisit transaksi berjalan yang rendah dan defisit fiskal yang konservatif. Prospek ekonomi terus positif, didukung oleh pertumbuhan konsumsi swasta yang lebih tinggi, sementara proyeksi peningkatan dalam perekonomian global dan pemulihan harga komoditas, meningkatkan baik investasi maupun ekspor.
Pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 5,2 persen tahun ini	Tahun 2016 adalah pertama kalinya dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tahunan melampaui hasil tahun sebelumnya, dan dapat menjadi indikasi bahwa siklus pertumbuhan Indonesia akhirnya mencapai titik baliknya dan mulai meningkat. Selain itu, dengan semua komponen pengeluaran diperkirakan menjadi semakin stabil, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2017 ³⁸ , dan terus meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2018 (Tabel 5).
Konsumsi sektor swasta, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor diproyeksikan akan meningkat	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diproyeksikan akan meningkat karena nilai Rupiah yang stabil mengangkat kepercayaan konsumen, sementara lonjakan dua digit dalam upah riil serta tingkat pengangguran yang rendah meningkatkan daya beli konsumen. Pertumbuhan investasi swasta juga siap untuk meningkat sebagai efek dari pelonggaran kebijakan moneter pada tahun 2016 dan reformasi ekonomi baru-baru ini yang mendapatkan pijakan. Pemulihan harga komoditas yang terus berlanjut, disertai dengan peningkatan pertumbuhan kredit dan peningkatan kredibilitas fiskal saat ini, juga cenderung mendukung belanja investasi. Sementara itu, investasi publik diperkirakan akan meningkat tahun ini, karena pemerintah sangat berkomitmen untuk meningkatkan investasi infrastruktur. Karena harga komoditas dan perekonomian global menjadi semakin mantap, serta penerimaan fiskal dan permintaan eksternal yang marak, belanja pemerintah dan ekspor kemungkinan akan pulih dari kontraksi yang dialami pada tahun 2016.
Reformasi struktural harus dilanjutkan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan	Sementara peningkatan harga komoditas memberikan daya tahan, dan tingkat pertumbuhan PDB dalam jangka menengah diproyeksikan untuk melampaui tingkat yang dicapai beberapa tahun terakhir ini, harga komoditas dan tingkat pertumbuhan PDB tersebut secara signifikan lebih rendah daripada yang terlihat sesaat setelah krisis keuangan, karena perekonomian pulih dari penurunan global. Dengan demikian, upaya kebijakan yang lebih banyak lagi dan melanjutkan semangat reformasi struktural harus dilakukan untuk lebih meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian, agar terhindar dari pemahaman bahwa tingkat pertumbuhan yang relatif lebih lambat saat ini sebagai suatu kondisi normal yang baru.
Perubahan tak terduga dalam kebijakan moneter AS dan volatilitas keuangan dapat menimbulkan risiko	Risiko terhadap perkiraan pertumbuhan condong ke sisi penurunannya. Bank Sentral AS diperkirakan akan meningkatkan suku bunga antar-bank (<i>Fed Funds Rate</i>) secara bertahap di tahun-tahun mendatang ³⁹ . Jika peningkatan suku bunga Federal ini lebih tinggi dari yang diperkirakan, maka efeknya adalah terjadinya arus modal yang keluar dari pasar negara berkembang secara besar-besaran seperti efek <i>Taper Tantrum</i> yang pernah terjadi oleh karena para investor dengan segera mengevaluasi

³⁸ Ini merupakan revisi penurunan sebesar 0,1 persentase poin dari IEQ (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia) edisi Januari 2017.

³⁹ Kenaikan pertama terjadi pada tahun 2017 sebesar 25 basis poin terjadi pada tanggal 15 Maret, sesuai dengan perkiraan.

yang merugikan	dan menyeimbangkan portofolio mereka untuk mengurangi risiko. ⁴⁰ Volatilitas seperti ini di pasar modal dan keuangan global dapat membebani pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah.
Kejutan politik lebih lanjut yang terjadi di Uni Eropa dapat meningkatkan ketidakpastian kebijakan global	Setelah referendum Inggris mengguncang Uni Eropa pada tahun 2016, hasil yang mengejutkan dari serangkaian pemilu berisiko tinggi di Perancis, Jerman, Belanda, dan mungkin Italia yang mendatang, dapat semakin meningkatkan ketidakpastian kebijakan global pada negara-negara maju. Ketidakpastian tersebut, di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme, dapat memiliki efek peredam yang parah pada perdagangan dan arus keuangan global.
Risiko dalam negeri termasuk terjadinya inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan secara berkepanjangan...	Karena kenaikan harga dari barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah (<i>administered prices</i>) tahun ini, suatu periode inflasi tinggi yang berkepanjangan menimbulkan risiko penurunan yang utama bagi pertumbuhan konsumsi. Konsumen pada umumnya sensitif terhadap kenaikan harga, terutama makanan, sementara konsumsi swasta merupakan bagian terbesar dari PDB. Apabila inflasi tetap tinggi dalam kurun waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan, pengeluaran konsumen dapat menurun, yang mengakibatkan menurunnya pertumbuhan keluaran. Selain itu, Bank Indonesia dapat dipaksa untuk bertindak dengan memperketat kebijakan moneter, yang juga akan menurunkan pertumbuhan investasi.
... serta lemahnya penerimaan	Pada saat yang sama, penerimaan fiskal yang lemah terus menimbulkan risiko yang merugikan yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Penerimaan yang lebih rendah dapat membatasi pengeluaran fiskal dan investasi infrastruktur yang masih banyak dibutuhkan ⁴¹ .

⁴⁰ *Taper tantrum* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah (*Treasury (Bonds)*) AS yang terjadi pada tahun 2013, karena pengumuman dari upaya Bank Sentral AS untuk mengurangi pelonggaran kuantitatif (*Quantitative Easing - QE*) program pembelian aset, atau lebih sederhananya, jumlah uang yang disalurkan oleh Bank Sentral AS ke dalam perekonomian. *Taper tantrum* terjadi ketika investor panik karena bereaksi terhadap berita mengenai perampingan ini dan menarik uang mereka dengan cepat keluar dari pasar obligasi, yang secara drastis meningkatkan imbal hasil obligasi. Arus keluar sejumlah besar modal dari beberapa negara pasar berkembang utama juga terjadi, yang menyebabkan nilai tukar masing-masing negara jatuh.

⁴¹ ADB (2017) memperkirakan bahwa kesenjangan infrastruktur Indonesia adalah antara 4,7-5,1 persen dari PDB.

Tabel 5: Indikator perekonomian utama
(persen, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2016	2017p	2018p	2017
1. Indikator perekonomian utama				
Pengeluaran konsumsi swasta	5,0	5,1	5,2	-0,2
Konsumsi pemerintah	-0,1	2,8	3,8	0,6
Pembentukan modal tetap bruto	4,5	5,7	6,0	-0,5
Ekspor barang dan jasa	-1,7	2,0	2,4	0,5
Impor barang dan jasa	-2,3	1,0	2,0	-0,6
Produk Domestik Bruto	5,0	5,2	5,3	-0,1
2. Indikator perekonomian lainnya				
Indeks harga konsumen	3,5	4,3	3,8	-0,1
Deflator PDB	2,5	3,5	3,2	-0,8
Nominal PDB	7,6	8,8	8,7	-1,0
3. Asumsi Ekonomi				
Nilai Tukar (Rp/USD)	13.300	13.359	13.450	59
Harga minyak mentah Indonesia (USD/b)	51	54	59	3

Sumber: BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka untuk tahun 2016 adalah untuk hasil yang sebenarnya. P singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data rata-rata tahunan. Revisi adalah sesuai dengan proyeksi di dalam *IEQ* (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia) edisi Januari 2017.

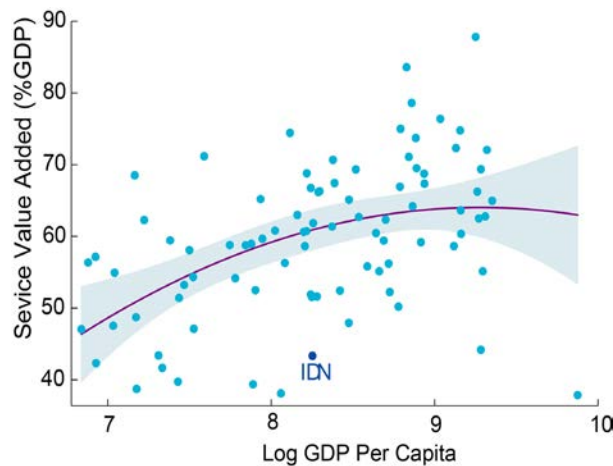
B. Topik Fokus



1. Mengupayakan kebijakan perdagangan jasa yang tepat untuk pembangunan Indonesia

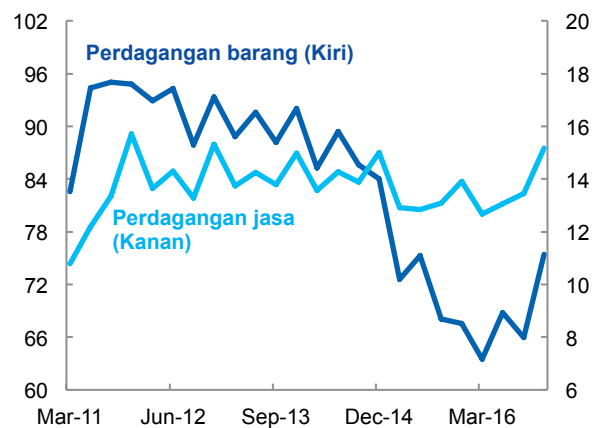
Jasa menjadi semakin penting bagi perekonomian dan perdagangan Indonesia. Namun demikian, pangsa jasa di dalam PDB masih di bawah dari banyak negara berpendapatan menengah lainnya. Hal ini sebagian karena tingginya hambatan perdagangan jasa di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Artikel ini membahas kemungkinan dampak pembatasan perdagangan pada pengembangan sektor jasa di Indonesia. Artikel ini menekankan pentingnya untuk mengevaluasi kembali pembatasan tersebut dan meningkatkan persaingan untuk membantu mengembangkan potensi sektor jasa untuk kepentingan perekonomian secara keseluruhan.

Gambar 43: Pangsa jasa Indonesia di dalam PDB berada di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah (USD miliar)



Sumber: Indikator Pembangunan Dunia (World Development Indicators)

Gambar 44: Perdagangan jasa lebih tahan banting dibandingkan dengan perdagangan barang (USD miliar)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Sektor jasa adalah pendorong pertumbuhan yang menjanjikan di Indonesia, meskipun pangsa nya dalam PDB masih lebih rendah dari banyak negara berpendapatan menengah lainnya

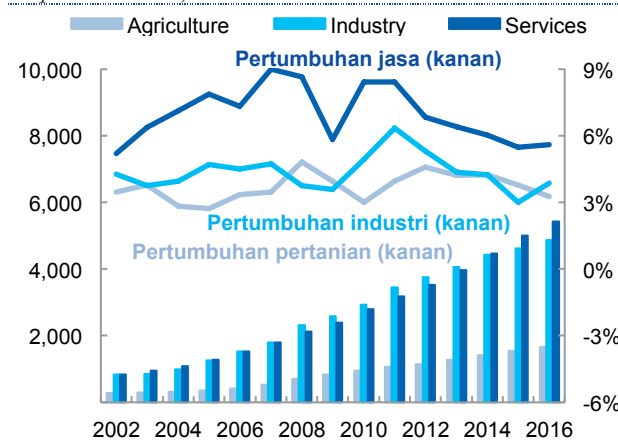
Di dalam pembangunan ekonomi, pendorong utama pertumbuhan ekonomi biasanya bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri), dan kemudian ke sektor tersier (jasa). Akibatnya pangsa jasa di dalam perekonomian cenderung untuk meningkat secara signifikan. Indonesia tidak terkecuali, meskipun pangsa jasa lebih rendah daripada di banyak negara-negara berpenghasilan menengah lainnya (Gambar 43). Kemajuan teknologi telah membuat jasa lebih dapat diperdagangkan di seluruh perbatasan, seperti melalui alih daya (*outsourcing*) operasional bagian administrasi (*back office*), pergerakan sementara penyedia layanan, dan penjualan daring (*online*). Memang, perdagangan jasa global telah berkembang lebih cepat daripada perdagangan barang. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana perdagangan jasa lebih tahan banting dibandingkan dengan perdagangan barang, yang telah mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir ini (Gambar 44). Dengan kebijakan yang tepat, perdagangan jasa memiliki potensi untuk tampil sebagai salah satu pendorong pertumbuhan. Sama seperti dua kaki yang berjalan bersama-sama, manfaat dari baik perdagangan barang maupun jasa haruslah saling memperkuat.

a. Pandangan umum perdagangan jasa Indonesia

Jasa menunjukkan peningkatan pangsa dalam ekonomi dan perdagangan Indonesia

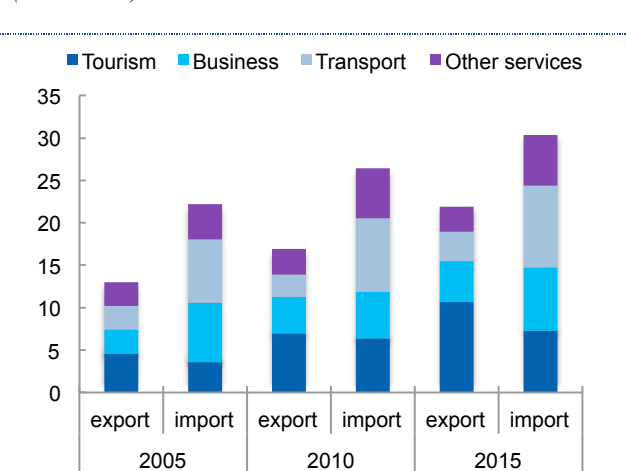
Jasa menyumbang sekitar 45 persen dari PDB Indonesia. Sektor ini telah tumbuh sebesar rata-rata 6,8 persen per tahun sejak tahun 2001, lebih cepat dari sektor industri dan pertanian (Gambar 45). Di awal tahun 2016, 53,6 persen penduduk Indonesia yang bekerja - atau 64,7 juta pekerja - bekerja di sektor jasa. Lebih dari 2 juta pekerjaan baru ditambahkan oleh sektor jasa di tahun 2015 saja.⁴² Pertumbuhan di sektor jasa telah berbasis luas. Sektor transportasi dan komunikasi menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata yang paling tinggi, sebesar 12,1 persen per tahun sejak tahun 2001, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 6,9 persen per tahun. Perdagangan jasa telah berkembang dengan tingkat tahunan rata-rata sekitar 6 persen untuk ekspor dan 4 persen untuk impor sejak tahun 2005. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh jasa transportasi dan komunikasi, dan jasa perjalanan wisata, yang mendominasi perdagangan jasa dan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi (Gambar 46).

Gambar 45: Jasa memiliki pangsa tertinggi dalam perekonomian dan sektor yang tercepat berkembang (PDB dalam Rp triliun, Kiri; pertumbuhan dalam persen; harga tetap 2000, Kanan)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 46: Ekspor dan impor jasa telah berkembang pesat dalam dekade terakhir (USD miliar)



Sumber: Trademap; Perhitungan staf Bank Dunia

⁴² Data jumlah penduduk di atas usia 15 tahun menurut status pekerjaan utama dari SAKERNAS.

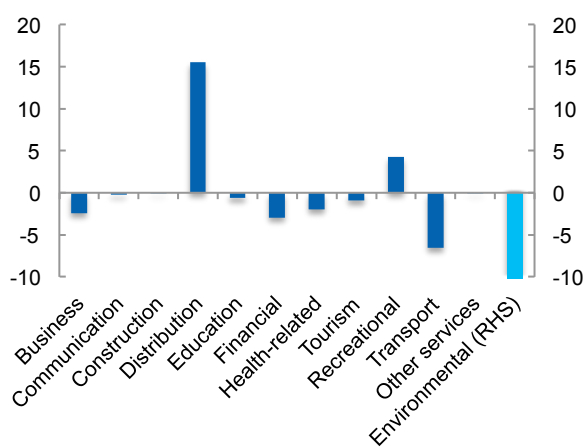
Pentingnya jasa bagi pertumbuhan Indonesia ditegaskan oleh keterkaitan ke depan-nya yang kuat ke seluruh perekonomian

Jasa merupakan masukan utama produksi di berbagai sektor perekonomian Indonesia.⁴³ Jasa berkontribusi sebesar sekitar 44 persen dari nilai masukan antara (*intermediate input*) untuk sektor pertambangan, 32 persen untuk sektor pertanian, dan 21 persen untuk sektor manufaktur. Delapan dari dua belas sektor jasa yang utama memiliki skor keterkaitan ke depan lebih tinggi dari rata-rata semua sektor dalam perekonomian. Misalnya, 21 persen dari keluaran jasa lingkungan dimanfaatkan oleh industri minyak mentah dan 20 persen digunakan oleh industri farmasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan pada sektor jasa juga akan memiliki implikasi yang besar bagi daya saing sektor-sektor lainnya.

Indonesia adalah pengimpor bersih jasa karena permintaan melebihi pasokan di sebagian besar sektor jasa

Seperti di sektor-sektor ekonomi lainnya, perdagangan dapat memainkan peran kunci untuk mengisi kesenjangan permintaan atau pasokan yang ada. Untuk mengevaluasi kesenjangan seperti itu di sektor jasa, kami menggunakan tabel Input-Output yang membandingkan permintaan dalam negeri dan keluaran dalam negeri dari setiap sektor jasa, setelah permintaan internasional (ekspor) dikeluarkan dari komponen permintaan total. Estimasi menunjukkan bahwa 10 dari

Gambar 47: Sepuluh dari dua belas sektor jasa memiliki kelebihan permintaan, dua lainnya memiliki kelebihan pasokan
(kelebihan pasokan, persen, Kiri; 100 persen, Kanan)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan tabel I-O Indonesia tahun 2010, BPS (2015)

12 sektor jasa memiliki kelebihan permintaan (Gambar 47). Ini berarti bahwa sebagian dari permintaan dalam negeri di sektor jasa tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan harus dipenuhi oleh impor sebagai gantinya. Jasa lingkungan memiliki kelebihan permintaan yang terbesar, dengan permintaan dalam negeri melebihi produksi dalam negeri sebesar 27 kali, meskipun sektor ini secara keseluruhan kecil. Salah satu alasan bagi kelebihan permintaan yang besar ini adalah teknologi khusus yang digunakan oleh sektor ini yang seringkali tidak dapat disediakan oleh penyedia dalam negeri, seperti pengelolaan sampah di sub-sektor minyak mentah.⁴⁴ Layanan transportasi juga memiliki kesenjangan pasokan dalam negeri, dengan 6,5 persen dari total permintaan yang harus disediakan oleh penyedia transportasi internasional. Jasa tersebut merupakan kunci bagi para eksportir dan importir barang dan kemampuan untuk memanfaatkan penyedia transportasi asing adalah kunci dalam mempertahankan daya saing mereka. Dua sektor yang memiliki kelebihan pasokan jasa adalah sektor distribusi dan rekreasi, dan pasar internasional menyerap sekitar 15,5 persen dan 4,3 persen dari pasokan mereka, masing-masing.

⁴³ Menurut tabel Input-Output Indonesia 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

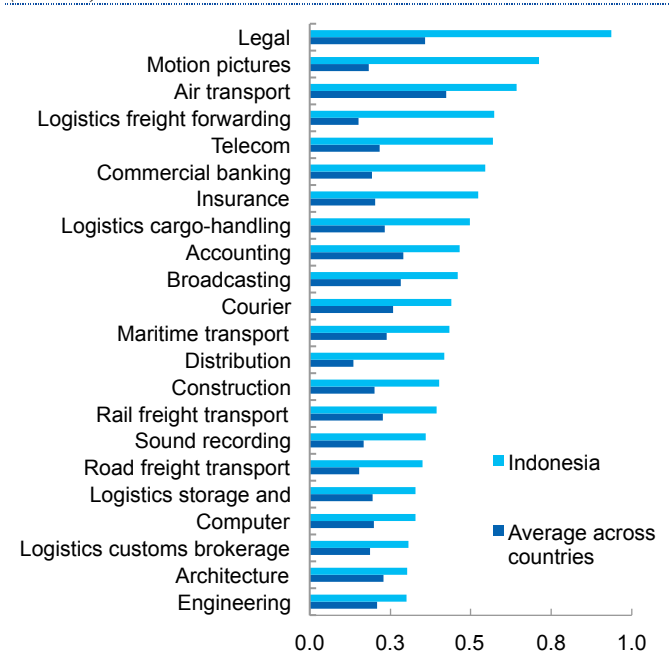
⁴⁴ Sub-sektor ini adalah pengguna terbesar, yang mengkonsumsi atau menggunakan 21 persen dari total jasa lingkungan.

b. Pembatasan perdagangan dan produktivitas jasa Indonesia

Indonesia memiliki beberapa hambatan yang paling ketat untuk perdagangan jasa di antara 42 negara pembanding

Terlepas dari pentingnya penyediaan jasa yang efisien bagi perekonomian dan defisit pasokan yang ada, Indonesia mempertahankan pembatasan yang cukup banyak untuk perdagangan jasa. Data dari OECD menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pembatasan yang lebih tinggi, yang diukur dengan Index Pembatasan Perdagangan Jasa (STRI - *Services Trade Restrictiveness Index*) di seluruh 22 sektor yang disurvei di 42 negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang datanya tersedia (Gambar 48, Tabel 6). Untuk semua sektor, Indonesia berada di bagian atas desil negara dalam hal pembatasan, kecuali untuk jasa arsitektur, teknik dan jasa kurir. Indonesia juga memiliki skor STRI tertinggi di antara semua negara yang datanya tersedia dalam jasa pengiriman logistik, film, rekaman suara, telekomunikasi, distribusi dan perbankan umum. Dan sektor seperti jasa layanan hukum memiliki skor yang mendekati skor maksimum yang memungkinkan, yaitu 1, menunjukkan adanya tingkat pembatasan perdagangan yang menyeluruh (*pervasive*). Pembatasan di sektor ini di Indonesia termasuk larangan bagi pengacara asing untuk mendirikan praktek layanan hukum secara komersial di negeri ini, sesuatu yang diperkenankan di banyak negara sampel. Satu-satunya kemungkinan untuk memanfaatkan ahli hukum asing adalah pengacara Indonesia menyewa pengacara asing untuk memberikan nasihat mengenai hukum negara asing.

Gambar 48: Indeks pembatasan perdagangan jasa Indonesia (indeks*)



Sumber: OECD
Catatan: * indeks mengambil nilai antara nol dan satu, dengan satu sebagai yang paling ketat

Kotak 2: Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa

Index Pembatasan Perdagangan Jasa (STRI) OECD adalah alat berbasis bukti yang membantu untuk mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan untuk membatasi perdagangan. Hal ini dihitung berdasarkan database peraturan yang berisi informasi mengenai peraturan di 22 sektor jasa yang dikumpulkan dari 34 anggota OECD, sebagai tambahan dari Brazil, Tiongkok, Kolombia, India, Indonesia, Latvia, Rusia, dan Afrika Selatan. 22 sektor jasa tersebut adalah: jasa layanan komputer, jasa konstruksi, jasa layanan hukum, jasa akuntansi, jasa arsitektur, jasa teknik, jasa telekomunikasi, jasa distribusi, penyiaran, film, rekaman suara, perbankan umum, asuransi, transportasi udara, transportasi laut, transportasi angkutan jalan, transportasi angkutan kereta api, jasa kurir, jasa penanganan logistik kargo, jasa penyimpanan logistik dan gudang, jasa pengiriman logistik, dan jasa perantara logistik kepabeanan. Informasi peraturan dari sektor ini sebagian besar diambil dari perundang-undangan nasional yang tersedia di situs publik. Berdasarkan informasi kualitatif di dalam database, indeks komposit digunakan untuk mengukur pembatasan yang teridentifikasi di

lima kategori kebijakan standar, yang meliputi pembatasan masuknya pihak asing, pembatasan pergerakan orang, pembatasan untuk persaingan, transparansi peraturan, dan langkah-langkah diskriminatif lainnya. Sebagian besar langkah-langkah di dalam database regulasi STRI memiliki jawaban biner (*binary*) (ya/tidak) dan skor biner tersebut diterapkan secara langsung. Langkah-langkah yang memiliki jawaban numerik dipecah pada ambang batas di mana skor biner tersebut diterapkan. Skor mengambil nilai antara nol dan satu. Keterbukaan penuh untuk perdagangan dan investasi memberikan skor nol, sementara yang benar-benar tertutup bagi penyedia jasa asing menghasilkan skor satu. Indeks saat ini tersedia untuk tahun 2014 dan 2015, dan 2016 untuk beberapa negara.

Pembatasan yang tinggi ini mungkin telah berkontribusi pada produktivitas yang relatif rendah dari jasa Indonesia dibandingkan dengan negara-negara pembeding

Bukti internasional menunjukkan bahwa dengan menekan persaingan, hambatan dalam perdagangan jasa mengurangi efisiensi jasa.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan kasus di Indonesia, di mana pembatasan terhadap jasa yang relatif tinggi berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja sektor jasa yang rendah dibandingkan dengan negara-negara pembeding.

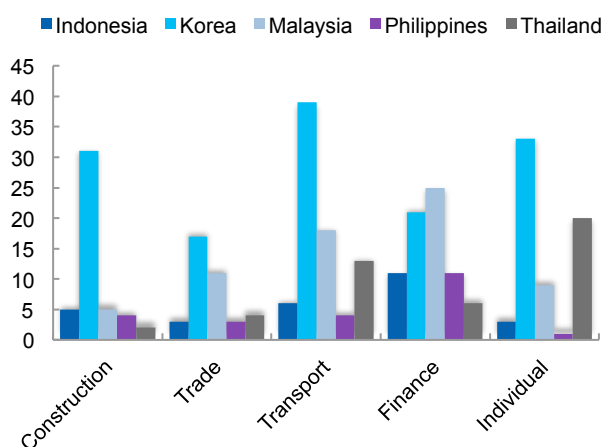
Produktivitas jasa diukur sebagai total nilai tambah dari masing-masing sektor

terhadap total tenaga kerja sektor tertentu, yang diambil dari database Groningen Growth Development Center (GGDC). Menurut data ini produktivitas sektor jasa Indonesia umumnya lebih rendah daripada kebanyakan negara-negara lain di kawasan (Gambar 49). Di antara sektor-sektor yang datanya tersedia,⁴⁶ Indonesia menunjukkan tingkat produktivitas yang sebanding dengan negara-negara utama lainnya di kawasan hanya dalam jasa konstruksi. Produktivitas di sektor ini meningkat dari USD 3.600 per pekerja pada tahun 2000 menjadi sekitar USD 5.000 per pekerja di tahun 2010-11. Sebaliknya, produktivitas Indonesia merupakan yang terendah dari negara-negara pembeding untuk jasa perdagangan, jasa perhotelan dan restoran; jasa transportasi dan komunikasi; jasa keuangan, jasa asuransi, jasa real estat dan jasa perusahaan; dan jasa perorangan, dan jasa sosial dan kemasyarakatan. Misalnya, produktivitas jasa perdagangan, jasa perhotelan dan restoran adalah USD 2.700 per pekerja pada tahun 2011, yang lebih rendah dari Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Pembatasan juga membebani produktivitas sektor manufaktur karena

Mengingat pentingnya jasa sebagai masukan untuk produksi, pembatasan perdagangan di antara sektor jasa juga meningkatkan biaya produksi dan membebani produktivitas perusahaan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Duggan, Rahardja dan Varela (2013) menemukan bahwa melonggarkan kebijakan bagi FDI di sektor jasa

Gambar 49: Indonesia memiliki produktivitas yang relatif rendah di sejumlah sektor jasa (USD ribu)



Sumber: Database GGDC

Catatan: data adalah untuk tahun 2010, harga tetap tahun 2005

⁴⁵ Lihat misalnya Bank Sentral Eropa (2006) dan Komisi Produktivitas Seldania Baru (2014).

⁴⁶ Sektor yang dianalisis adalah: jasa konstruksi; perdagangan, jasa perhotelan dan restoran; jasa transportasi dan komunikasi; jasa keuangan, asuransi, real estat dan jasa perusahaan; jasa perorangan, dan jasa layanan sosial dan kemasyarakatan.

**jasa merupakan
masukan utama
untuk produksi dan
ekspor manufaktur**

selama tahun 2000-an berkaitan dengan perbaikan kinerja yang dirasakan dari sektor jasa,⁴⁷ dan dengan peningkatan sebesar sekitar 8 persen pada faktor produktivitas total produsen. Peningkatan ini terutama didorong oleh pembatasan yang lebih rendah dalam jasa transportasi, distribusi dan tenaga listrik, sejalan dengan pentingnya jasa layanan tersebut dalam produksi barang manufaktur Indonesia. Hasil tersebut juga sesuai dengan banyak bukti empiris yang muncul dari negara-negara berkembang lainnya.⁴⁸

c. Mengurangi hambatan perdagangan jasa untuk kepentingan perekonomian**Penting untuk
mengevaluasi
kembali pembatasan
perdagangan jasa
mengingat
dampaknya pada
perekonomian secara
keseluruhan ...**

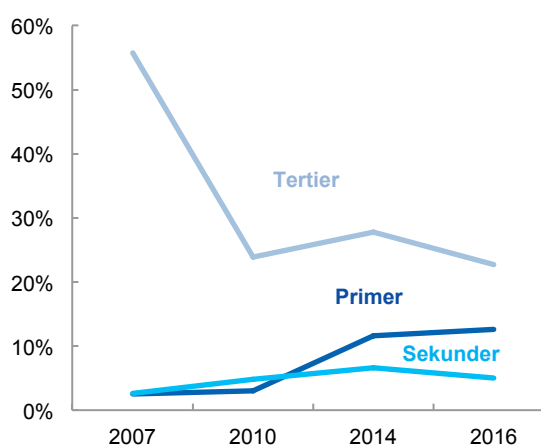
Temuan ini menunjukkan pentingnya mengkaji kebijakan yang ada pada pembatasan perdagangan jasa untuk mengamankan ketersediaan jasa layanan berkualitas dan mendukung daya saing ekonomi. Sebagian besar dari pembatasan ini muncul karena adanya peraturan umum yang berlaku untuk semua sektor dalam perekonomian. Misalnya, posisi manajemen tertentu di perusahaan-perusahaan Indonesia dikhususkan bagi warga negara Indonesia. Meskipun hal ini mungkin melindungi pekerja terampil

Indonesia tertentu, hal ini juga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas dan meningkatnya harga penyediaan jasa layanan ini, sehingga merugikan industri hilir.

Demikian pula, pembatasan bagi modal asing juga diterapkan di berbagai sektor jasa, yang mencegah kehadiran pihak asing untuk menyediakan jasa di Indonesia, yang mungkin merugikan bagi jasa layanan di mana terdapat kesenjangan permintaan dan pasokan. Pembatasan tersebut juga dapat membatasi pengenalan teknologi baru bagi produksi jasa layanan yang diperkenalkan oleh perusahaan-perusahaan asing. Menurut data yang baru dikumpulkan oleh Bank Dunia, sektor jasa memiliki pembatasan yang paling tinggi bagi modal asing di antara berbagai sektor (Gambar 50). Sedangkan pangsa (5-digit KBLI) dari sektor jasa dengan setidaknya satu

Gambar 50: Pembatasan ekuitas asing di sektor jasa telah menurun namun masih lebih tinggi dari sektor-sektor lainnya

(pangsa dari sektor dengan setidaknya pembatasan satu modal asing di DNI - Daftar Negatif Investasi)



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan keputusan Daftar Negatif Investasi (DNI)

Catatan: pangsa dihitung dari 1.456 sektor KBLI-5 digit

pembatasan modal asing di dalam satu sub-sektor mengalami penurunan sejak tahun 2007, dimana seperempat dari sektor-sektor tersebut masih terdapat setidaknya satu pembatasan di tahun 2016 dan pangsanya tetap stabil sejak tahun 2010. Pembatasan tersebut berlaku juga untuk sektor-sektor seperti keuangan dan transportasi, yang memiliki kesenjangan pasokan-permintaan dalam negeri yang besar.

Ada juga peraturan yang berlaku untuk sektor-sektor tertentu yang dapat mengakibatkan potensi kerugian yang besar bagi perekonomian. Misalnya, seperti pelayanan medis dibatasi hanya oleh penyedia dalam negeri, sehingga banyak warga negara Indonesia pergi ke luar negeri untuk mengakses layanan medis yang berkualitas tinggi. Sekitar 50 persen pasien internasional di Singapura adalah warga negara Indonesia dan sekitar 12.000 warga negara Indonesia pergi ke Malaysia setiap tahun untuk mendapatkan layanan medis⁴⁹. Dengan demikian, mengevaluasi ulang pembatasan tersebut, mengingat dampaknya secara keseluruhan, tidak hanya akan menguntungkan pengguna jasa di Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian secara keseluruhan.

... dan untuk mengurangi hambatan lain untuk bersaing di sektor jasa, sehingga dapat membantu mengeluarkan potensi sektor ini yang belum dimanfaatkan

Peningkatan keterbukaan terhadap sektor jasa tidak hanya menyiratkan peningkatan arus dari jasa yang keluar dari dan masuk ke negara, tetapi juga peningkatan kehadiran pihak asing dengan menurunkan hambatan masuk. Hal ini akan membantu meningkatkan persaingan antara penyedia jasa dalam negeri dan asing. Bukti internasional menunjukkan bahwa hal ini akan mengarah pada penyediaan jasa yang berkualitas tinggi, pengenalan jasa layanan baru dan/atau penurunan harga jasa layanan.⁵⁰ Dengan kebijakan yang mendukung yang tepat, efek yang memihak persaingan dari liberalisasi perdagangan jasa akan memungkinkan penyedia jasa dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas mereka untuk dapat lebih bersaing dengan penyedia jasa asing. Selain itu, keterbukaan terhadap perdagangan jasa juga dapat memperkenalkan pengetahuan dan teknologi baru kepada produsen dalam negeri yang menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan produktivitas di sektor jasa, dan bagi perekonomian.

⁴⁹ Lihat Kementerian Kesehatan, diambil pada tanggal 9 Jan, 2017

⁵⁰ Lihat Trapani dan Oslon (1982); Goolsbee dan Syverson (2008); Besker dan Noel (2009).

Tabel 6: Contoh Pembatasan di Sektor Jasa Konstruksi

Hambatan STRI	Hasil untuk Indonesia
Pembatasan penyertaan modal asing: maksimum penyertaan modal asing yang diperbolehkan (persen)	67
Ada batasan untuk proporsi saham yang dapat dimiliki oleh investor asing di perusahaan-perusahaan yang dikendalikan pemerintah	Ya
Pembatasan merger dan akuisisi (M&A) lintas batas	Tidak
Persyaratan kinerja	Ya
Persyaratan kualifikasi yang diskriminatif untuk izin mendirikan bangunan untuk melakukan pekerjaan konstruksi	Tidak
Kehadiran secara komersial diperlukan untuk memberikan layanan lintas batas	Ya
Bentuk badan hukum: hanya usaha patungan yang diperbolehkan	Tidak
Bentuk badan hukum: cabang perusahaan asing dilarang	Ya
Bentuk badan hukum: pembatasan lainnya	Tidak
Memo: Aliran data lintas batas: bebas untuk pengiriman data pribadi atau penerapan prinsip akuntabilitas	Tidak
Memo: Aliran data lintas batas: Pengiriman data hanya diperbolehkan bila terdapat sistem pengamanan pribadi tertentu	Ya
Aliran data lintas batas: pengiriman data hanya diperbolehkan untuk negara-negara dengan undang-undang perlindungan privasi yang pada hakekatnya sama atau mendapat persetujuan dari otoritas Pemerintah	Tidak
Aliran data lintas batas: memenuhi kombinasi dari persyaratan yang diperlukan sebelum pengiriman data diperbolehkan	Tidak
Aliran data lintas batas: pengiriman data pribadi dilarang	Tidak
Direksi: mayoritas harus warga negara	Tidak
Direksi: mayoritas harus penduduk	Tidak
Direksi: setidaknya salah satu harus warga negara	Tidak
Direksi: setidaknya satu harus penduduk	Tidak
Manajer harus warga negara	Ya
Manajer harus penduduk	Tidak
Skrining secara eksplisit dianggap sebagai kepentingan ekonomi	Tidak
Skrining dilakukan tanpa pengecualian dari kepentingan ekonomi	Ya
Memo: ambang batas untuk proyek-proyek skrining	Ya
Pembatasan lainnya pada masuknya pihak asing	Ya
Pengadaan dan penggunaan tanah dan real estat oleh orang asing dibatasi	Ya
Pembatasan jenis saham atau obligasi yang dimiliki oleh investor asing	Tidak
Kondisi pada transfer modal dan investasi berikutnya	Tidak
Kuota: penerima transfer intra-perusahaan	Tidak
Kuota: layanan pemasok berdasarkan kontrak	Tidak
Kuota: layanan pemasok independen	Tidak
Uji pasar tenaga kerja: penerima transfer intra-perusahaan	Tidak
Uji pasar tenaga kerja: pemasok jasa layanan berdasarkan kontrak	Tidak
tes pasar kerja: pemasok jasa layanan independen	Tidak
Pembatasan lama tinggal untuk penerima transfer intra-perusahaan (bulan)	24
Pembatasan lama tinggal untuk pemasok jasa layanan berdasarkan kontrak (bulan)	24
Pembatasan durasi tinggal untuk pemasok jasa layanan independen (bulan)	24
Pembatasan lainnya untuk pergerakan orang	Tidak
Pemasok asing diperlakukan tidak adil mengenai pajak dan kelayakan untuk subsidi	Tidak
Pengadaan pemerintah: preferensi eksplisit untuk pemasok lokal	Tidak
Pengadaan pemerintah: Peraturan Pengadaan secara eksplisit melarang diskriminasi dari pemasok asing	Tidak
Memo: batas atas yang lembut diamankan	Tidak
Pengadaan pemerintah: Spesifikasi teknis mempengaruhi kondisi persaingan yang mendukung penyedia lokal	Tidak
Pengadaan pemerintah: proses kualifikasi dan prosedur yang diskriminatif	Tidak

Pengadaan pemerintah: Pemberian kontrak atas dasar kriteria non-obyektif / diskriminatif	Tidak
Pengadaan pemerintah: undang-undang, peraturan dan prosedur mengenai pengadaan yang transparan	Tidak
Pengadaan pemerintah: pemasok asing diberi kesempatan untuk menggugat konsistensi pelaksanaan pengadaan dengan peraturan perundang-undangan.	Tidak
Undang-undang atau peraturan yang memberlakukan standar nasional yang menyimpang dari standar internasional: peraturan standar desain bangunan	Tidak
Undang-undang atau peraturan yang memberlakukan standar nasional yang menyimpang dari standar internasional: standar produk konstruksi	Tidak
Pembatasan lainnya dalam langkah-langkah diskriminatif lainnya	Tidak
Dapat mengajukan banding terhadap keputusan badan pengawas	Tidak
Perusahaan memiliki prosedur ganti rugi jika praktek bisnisnya membatasi persaingan di pasar tertentu	Tidak
Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi mengendalikan setidaknya satu perusahaan besar di sektor ini	Tidak
Perusahaan publik yang dikendalikan dibebaskan dari penerapan undang-undang persaingan umum	Tidak
Harga atau biaya diatur	Tidak
pembatasan lainnya di dalam hambatan untuk persaingan	Tidak
Persyaratan modal minimum	Tidak
Pembatasan beriklan	Tidak
Terdapat kewajiban hukum untuk mengkomunikasikan peraturan kepada publik dalam waktu yang wajar sebelum diberlakukan	Tidak
Terdapat prosedur yang memadai untuk memberi komentar secara publik yang terbuka bagi mereka yang tertarik, termasuk pemasok asing	Tidak
Rentang waktu pemrosesan visa (hari)	4
Visa masuk beberapa kali bagi pengunjung yang melakukan kunjungan usaha	Tidak
Biaya untuk mendapatkan visa kunjungan usaha (USD)	45
Jumlah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan visa kunjungan usaha	6
Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin bangunan (dalam hari kalender)	210,2
Total biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin bangunan (% dari nilai gudang)	3,8
Pembatasan lainnya dalam transparansi regulasi	Tidak
Jumlah prosedur yang diperlukan untuk memperoleh izin bangunan (nomor ijin)	17

Sumber: Database STRI OECD

2. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Baru ⁵¹

Artikel ini meninjau program Kredit Usaha Rakyat (KUR) program, yang mendukung pemberian pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan kredit parsial dan, oleh karena program ini didesain ulang pada tahun 2014, menawarkan subsidi bunga. Artikel ini berfokus pada perbandingan antara skema yang diterapkan antara tahun 2009 dan 2014, dan skema baru, yang saat ini sedang dilaksanakan, bersama dengan wawasan kebijakan dan rekomendasi.

a. Program KUR telah menjadi kebijakan utama Pemerintah untuk mendukung usaha kecil

UMKM merupakan landasan perekonomian Indonesia

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, ada sebanyak 57,9 juta UMKM di seluruh Indonesia pada tahun 2013. Mereka menyumbang lebih dari 99 persen dari semua perusahaan, mempekerjakan lebih dari 114 juta orang (lebih dari 97 persen dari total tenaga kerja di sektor swasta), dan memberikan kontribusi sekitar 60 persen dari PDB.⁵²

Akses terhadap pembiayaan terus menjadi tantangan bagi mereka

UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mengakses pembiayaan, terutama karena ketatnya persyaratan operasional, pelaporan dan persyaratan jaminan dari bank umum. Ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Misalnya, survei terbaru dari 200 usaha kecil dan menengah (UKM) di enam wilayah di Jawa menyimpulkan bahwa akses terhadap pembiayaan, berikut dengan persaingan yang ketat dari perusahaan berskala besar dan UKM lainnya, serta harga energi yang tinggi, adalah hambatan utama untuk pengembangan UKM di Indonesia.⁵³ Akses terhadap pembiayaan tersebut disebutkan sebagai kendala terpenting keempat oleh UKM Indonesia di dalam 2016-2017 *World Competitiveness Report* oleh *World Economic Forum*, di belakang korupsi, birokrasi pemerintah yang berlebihan, dan pasokan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia telah mendukung kredit bagi UMKM sejak tahun 2007 melalui program penjaminan kredit parsial, KUR

Dalam rangka memfasilitasi akses pembiayaan untuk usaha kecil, Pemerintah Indonesia membentuk program KUR pada tahun 2007 untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman bank melalui pemberian subsidi, dan jaminan kredit parsial. Jaminan KUR diberikan melalui Askrindo dan Jamkrindo - dua Perusahaan Penjaminan Kredit (CGCs - *Credit Guarantee Companies*) milik negara – ke bank peserta untuk pinjaman UMKM yang memenuhi syarat. Pemerintah membayar premi penjaminan dan modal yang diberikan kepada dua Perusahaan Penjaminan Kredit tersebut setiap tahunnya, dan menetapkan kebijakan dan persyaratan yang diterapkan dalam program KUR. Perusahaan Penjaminan Kredit menutup 70 sampai 80 persen dari risiko kerugian pinjaman untuk portofolio pinjaman UMKM bank.

⁵¹ Artikel ini didasarkan pada catatan kebijakan (*policy note*) yang akan datang yang disusun oleh *Finance and Market Global Practice*, Bank Dunia di Indonesia. Catatan ini terutama berdasarkan data yang diberikan oleh Komite Kebijakan KUR dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan program ini dan para ahli di bidang keuangan mikro, UMKM, dan pembangunan ekonomi.

⁵² Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan UMKM sebagai berikut: (i) usaha mikro dengan aktiva bersih hingga Rp 50 juta atau pendapatan tahunan hingga Rp 300 juta; (ii) usaha kecil dengan aset bersih antara Rp 50-500 juta atau pendapatan tahunan antara Rp 300 juta sampai 2,5 miliar; dan (iii) perusahaan menengah dengan aset bersih antara Rp 500 juta sampai 10 miliar atau pendapatan tahunan antara Rp 2,5-50 miliar.

⁵³ lihat Maya Irjayantia, Maya/Azib, Anton Mulyono (2012)

Pada tahun 2014, KUR adalah program penjaminan kredit parsial terbesar di negara-negara pasar berkembang

KUR dengan cepat bertumbuh menjadi suatu program yang cukup besar. Pada akhir tahun 2014, nilai total kredit yang didukung oleh KUR adalah sebesar Rp 49,5 triliun, menyumbang sekitar 14 persen dari seluruh pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil. Rasio pinjaman bermasalah (NPL) dari pinjaman yang didukung ini adalah 3,3 persen. Antara tahun 2009 dan 2014, 34 bank peserta menutup sekitar 12,5 juta kontrak pinjaman dengan UMKM dan mengucurkan pinjaman KUR yang didukung sebesar Rp 179 triliun. Mayoritas program — 85 persen dari total penyaluran pinjaman KUR yang didukung — disalurkan melalui tiga bank umum milik negara: BRI, Mandiri, dan BNI. BRI sendiri mengucurkan sejumlah Rp 117 triliun antara tahun 2009 dan 2014, atau 65 persen dari seluruh program KUR.

b. Program KUR telah berubah dari program penjaminan kredit parsial menjadi program pinjaman dengan bunga bersubsidi

Pada tahun 2015, Pemerintah mendesain ulang KUR dengan fokus subsidi suku bunga

Sementara program KUR pada awalnya ditujukan untuk berjalan sampai akhir tahun 2014, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program, tetapi memberlakukan reformasi besar-besaran. Pada saat perlambatan ekonomi, Pemerintah yang baru terbentuk ini menetapkan bahwa program KUR yang baru ditujukan untuk: (i) meningkatkan penyaluran kredit untuk usaha produktif; (ii) meningkatkan daya saing UMKM; dan (iii) mendukung pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Program KUR yang baru ini merupakan salah satu sorotan utama dalam paket reformasi ekonomi pemerintah yang diumumkan pada akhir tahun 2015. Berdasarkan program KUR yang baru, Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank peserta yang memungkinkan mereka untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dengan bunga yang memiliki batas atas (*capped interest rates*). Subsidi bunga juga menutupi biaya penjaminan yang dibayarkan oleh bank kepada Perusahaan Penjaminan Kredit.

Program ini mendominasi pasar pinjaman UMKM dengan porsi yang cukup besar

Pada tahun 2016, jumlah total pinjaman yang disalurkan melalui program KUR adalah sebesar Rp 94,4 triliun. Target pemerintah untuk 2017 ditetapkan lebih tinggi, mendekati Rp 110 triliun, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika dibandingkan dengan total stok pinjaman kepada usaha mikro (Rp 182 triliun pada akhir tahun 2016) dan kecil (Rp 241 triliun), terlihat jelas pentingnya program KUR untuk seluruh segmen pasar.

Penyesuaian secara substansial telah mengubah karakter program ini

Program KUR yang baru ini membawa perubahan cara pandang (paradigma), dari peningkatan akses terhadap pembiayaan bagi UMKM menjadi memberikan pinjaman murah bagi UMKM. Program KUR telah bergeser dari program penjaminan kredit parsial yang dimaksudkan untuk menciptakan rekam jejak kredit (*credit records*) bagi mereka yang baru pertama kali menjadi nasabah peminjam dan dengan demikian membuat mereka lebih laik bank (*bankable*), menjadi program dengan fokus utama pada subsidi suku bunga yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi kredit yang lebih baik bagi peminjam, termasuk peminjam pertama kali dan peminjam berulang (Tabel 7 merangkum aspek desain utama dari program KUR lama dan baru). Program KUR yang lama memiliki persyaratan yang eksplisit untuk pinjaman tambahan atau pinjaman berikutnya — yaitu, pinjaman yang pertama kali atau setidaknya pinjaman tambahan — untuk dapat menargetkan UMKM yang tidak memiliki sejarah kredit dan karenanya menjadi kendala terbesar dalam mengakses modal. Namun demikian, persyaratan ini tidak lagi berlaku di KUR yang baru. Para peminjam yang bukan pertama kalinya meminjam, dan bahkan yang pernah meminjam KUR dan yang pernah mendapat pinjaman komersial, sekarang dapat juga mengajukan pinjaman. Jumlah sektor yang memenuhi syarat juga meningkat, sehingga program KUR yang baru ini tersedia untuk hampir semua sektor di mana

UMKM beroperasi. Sektor dengan jumlah UMKM tertinggi yang memenuhi syarat termasuk grosir dan perdagangan ritel, serta pertanian.

Tabel 7: Aspek desain utama dari program KUR lama dan baru

Aspek	KUR 2007-2014	KUR 2015 dan seterusnya
Pinjaman	Mikro: sampai dengan Rp 20 juta Ritel: di atas Rp 20-500 juta Linkage *: sampai Rp 2.000 juta	Mikro: sampai dengan Rp 25 juta Ritel: Rp 25-500 juta
Suku Bunga Efektif Maksimum per tahun.	Mikro: 22% Ritel: 14%	Mikro dan Ritel: 12% (2015); 9% (2016 dan seterusnya)
Tenor maksimum	Modal Investasi: 5 tahun Modal Kerja: 3 tahun	Modal Investasi: 5 tahun ⁵⁴ Modal Kerja: 4 tahun
Jaminan Risiko parsial (Jaminan Kredit Grosir)	Pari-passu 70% (secara umum) atau dan 80% (untuk sektor-sektor prioritas ⁵⁵) (misalnya pertanian, perikanan, industri) dari jumlah saldo pinjaman dan bunga akrual (accrued interest) bagi bank dengan NPL di bawah 5 persen; tidak ada batas atas portofolio; pemicu klaim (claim trigger): pinjaman diklasifikasikan sebagai bermasalah ("meragukan");	Dirundingkan dan disepakati antara bank dan CGCs (Permenko 8/2015, Ps. 9 (2))
Biaya CGCs	Ditetapkan oleh Pemerintah RI dan dibayar ke CGCs 2007-2009: 1.50% 2010-2014: 3.25% dari bagian pinjaman yang dijamin ⁵⁶	Dirundingkan dan disepakati antara bank dan CGCs, menurut laporan difasilitasi oleh Komite KUR, dibayar di muka sebesar 1,5% dari jumlah pinjaman
Subsidi Bunga Pinjaman	Tidak ada	Mikro: 10% dari jumlah pinjaman, dibayarkan sebagai subsidi Ritel: 4,5% dari jumlah pinjaman, dibayarkan sebagai subsidi subsidi bunga dihitung berdasarkan jumlah saldo pinjaman bulanan dan dibayarkan langsung ke bank, termasuk biaya penjaminan kredit

Catatan: *) Pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya yang menyelenggarakan pinjaman KUR Mikro

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian)

Para pemangku kepentingan memiliki pandangan yang berbeda mengenai prioritas dan tujuan program

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan para pemangku kepentingan di Pemerintahan dan sektor keuangan menunjukkan bahwa pandangan mereka mengenai prioritas strategis dan tujuan dari program KUR yang baru ini berbeda-beda, dan kadang-kadang bertentangan. Hal ini menciptakan kebingungan mengenai tujuan kebijakan di antara para pemangku kepentingan yang berbeda dan tentang bagaimana mengukur efektivitas kebijakan tersebut.

Berdasarkan program KUR yang lama, subsidi langsung dan tidak langsung adalah sebesar 4,7 persen dari total portofolio pinjaman...

Sepanjang tahun 2008-2014, Pemerintah membayar subsidi imbalan jasa penjamin KUR sebesar Rp 5 triliun — merupakan subsidi langsung. Selain itu, Pemerintah memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) selama periode KUR sebelumnya. Perbedaan antara biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari penyertaan modal ini dan penghasilan CGCs yang diperoleh dari modal tersebut berjumlah sekitar Rp 638 miliar selama periode tujuh tahun dan dapat dianggap sebagai subsidi tidak langsung untuk program KUR. Selanjutnya, bank peserta memberikan pinjaman KUR dengan tingkat suku bunga di bawah harga pasar, yang berpotensi menghasilkan pendapatan bank yang lebih rendah dan

⁵⁴ Kredit investasi KUR bisa sampai tujuh tahun jika pinjaman molor, jumlah nominal meningkat atau direstrukturisasi.

⁵⁵ Sektor prioritas termasuk pertanian, perikanan, industri kecil, TKI.

⁵⁶ Rasio ini tidak sepenuhnya sebanding karena metode perhitungan berbeda, misalnya berdasarkan jumlah pinjaman atau hanya bagian yang dijamin dari jumlah pinjaman.

dengan demikian penerimaan pajak yang lebih rendah bagi Pemerintah — subsidi tidak langsung lainnya. Efek ini diperkirakan sebesar sekitar Rp 3 triliun.⁵⁷ Total subsidi langsung dan tidak langsung yang ditanggung oleh Pemerintah di dalam program KUR sebelumnya hingga 2014 dengan demikian dapat diperkirakan sebesar Rp 8,6 triliun, rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun. Ini sama dengan subsidi bunga rata-rata tahunan 4,4 persen dari saldo pinjaman KUR.

...sementara berdasarkan program KUR yang baru, jumlah ini telah meningkat menjadi 8,6 persen

Berdasarkan program KUR yang baru, Kementerian Keuangan menetapkan tingkat suku bunga efektif maksimum serta subsidi bunga yang dapat dikenakan oleh bank peserta, sesuai dengan kapasitas fiskal Pemerintah. APBN 2016 yang disetujui mengalokasikan Rp 12,6 triliun subsidi bunga untuk program KUR yang baru, dan APBN 2017 yang disetujui mengalokasikan Rp 9,5 triliun. Namun demikian, beberapa bank peserta telah mencatat bahwa subsidi bunga tidak mencukupi untuk menutupi perbedaan antara apa yang mereka anggap sebagai tingkat suku bunga pasar dan tingkat suku bunga efektif maksimum yang ditetapkan di dalam program KUR.⁵⁸ Meski begitu, dalam upaya untuk memenuhi target ambisius penyaluran KUR Pemerintah, beberapa bank telah menggeser pinjaman komersial dengan agunan menjadi pinjaman KUR. Sesuai dengan metodologi untuk memperkirakan biaya tidak langsung dari program KUR yang lama, pendapatan terdahulu ini diperkirakan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp 2,2 triliun pada tahun 2016-2017. Sejumlah Rp 0,2 triliun selanjutnya di tahun 2016-2017 dapat dilihat sebagai subsidi tidak langsung karena berkurangnya pengembalian modal dari Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs). Secara keseluruhan, proyeksi subsidi langsung dan tidak langsung untuk program KUR baru berjumlah Rp 12,3 triliun per tahun – sepuluh kali lipat subsidi tahunan dalam program KUR yang lama. Jika dihitung berdasarkan total pinjaman KUR, rata-rata subsidi tahunan meningkat secara substansial, dari 4,4 persen di bawah program KUR lama menjadi 14,8 persen di bawah program KUR baru. Tabel 8 merangkum biaya dari program KUR lama dan baru.)

Tabel 8: Ringkasan biaya KUR dan perbandingan antara KUR lama dan baru

(Rp triliun)

Mata Subsidi	Lama 2008-2014	KUR Baru 2016-2017
Subsidi langsung: Imbalan Jasa Penjamin KUR kepada Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan subsidi bunga pinjaman	5,0	22,1
Subsidi tidak langsung: Bunga Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk CGCs dikurangi Pendapatan Investasi dari KUR	0,6	0,2
Subsidi tidak langsung: Penurunan Penerimaan Pajak Pemerintah dari Laba Bank yang Lebih	3,0	2,2
Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung)	8,6	24,5
Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung), rata-rata tahunan	1,2	12,3
Subsidi (Langsung dan Tidak Langsung), % saldo pinjaman, rata-rata tahunan	4,4	14,8
Subsidi (hanya yang Langsung), % belanja Pemerintah pusat, rata-rata tahunan	0,05	0,5

Catatan: Data tahun 2008-2014 menggunakan realisasi APBN; Data untuk 2016-2017 menggunakan APBN. Saldo pinjaman (KUR) tahun 2008-2014 adalah nilai realisasi, sementara tahun 2016-2017 adalah nilai estimasi.

Sumber: Kemenkeu; Komite Kebijakan KUR, Perhitungan Bank Dunia

⁵⁷ Angka ini harus dipahami sebagai suatu perkiraan saja mengingat bahwa ada beberapa faktor yang sulit untuk diukur. Pertama, nilai jaminannya dianggap hanya sebagai perkiraan kasar ketika membandingkan tingkat suku bunga pasar dengan tingkat suku bunga yang sebenarnya dibebankan oleh bank yang peserta. Kedua, potensi nilai nasabah KUR yang mendapatkan kredit dan kemudian menjadi nasabah bank umum belum diukur.

⁵⁸ Tingkat suku bunga pasar rata-rata tertimbang sebesar 21,4 persen dapat dipecah menjadi 7,9 persen subsidi Pemerintah (ditambah 0,5 persen untuk biaya administrasi CGC), konsesi Bank sebesar 4,5 persen, dan suku bunga efektif sebesar 9 persen dibayar oleh peminjam.

c. Pengaturan yang baru mencerminkan suatu pendekatan berorientasi pasar

Pengaturan biaya jaminan kredit yang baru mencerminkan suatu pendekatan berorientasi pasar

Salah satu reformasi utama yang diberlakukan dalam program KUR yang baru adalah negosiasi dan kesepakatan antara Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan bank peserta mengenai imbalan jasa penjamin. Pengaturan baru ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pasar, di mana imbalan jasa penjamin tidak lagi diputuskan oleh Pemerintah, tetapi oleh Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan manajer bank, yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan hasilnya bagi masing-masing perusahaan. Selain itu, secara teori, Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) dan bank harus lebih mampu memperkirakan dan mengurangi risiko yang melekat (*inherent risks*) dalam penjaminan kredit.

Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) mengikuti beberapa praktek yang baik, tetapi bisa memperbaiki aspek-aspek lainnya

Kedua Perusahaan Penjaminan Pinjaman nasional besar, Askrindo dan Jamkrindo, mengikuti beberapa prinsip praktek terbaik yang diidentifikasi oleh Bank Dunia untuk skema penjaminan kredit.⁵⁹ Sebagai contoh, kedua Perusahaan Penjaminan Pinjaman tersebut mempertahankan sistem pencatatan terpisah untuk KUR yang memungkinkan adanya transparansi. Laporan tahunan dibuat dan diungkapkan kepada publik, termasuk: metode perhitungan untuk estimasi klaim reasuransi, kode etik, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Di sisi lain, laporan tahunan belum menganalisis dan menghadirkan fakta pada “fitur tambahan” dari program KUR - alasan utama bagi penjaminan kredit. Praktek terbaik (*best practice*) lainnya belum diadopsi, termasuk pengawasan independen dan efektif bagi Perusahaan Penjaminan Pinjaman (CGCs) atau CGS mengadopsi kebijakan penetapan harga berbasis risiko yang transparan dan konsisten.

d. Subsidi suku bunga tidak dianggap sebagai praktek terbaik dalam pembiayaan UMKM

Program KUR yang baru menjadikan subsidi suku bunga sebagai instrumen kebijakan yang penting

Sementara program KUR baru telah memberlakukan perbaikan dalam pengaturan imbalan jasa penjaminan, program ini telah meningkatkan penggunaan subsidi bunga. Subsidi bunga bukan ukuran baru dalam bauran kebijakan Indonesia. Bahkan, selama periode 2007-2014, Pemerintah membelanjakan Rp 1,7 triliun untuk subsidi kredit pertanian (subsidi bunga di sektor pertanian umum diterapkan di banyak negara lain). Besarnya skala program KUR baru membawa instrumen kebijakan ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi akan pentingnya program ini.

Akan tetapi, efektivitas subsidi tingkat suku bunga untuk mendukung pembiayaan UMKM diragukan

Ada empat alasan utama untuk meragukan efektivitas subsidi tingkat suku bunga dalam mendukung akses UMKM terhadap pembiayaan dan dengan demikian pada akhirnya peluang pertumbuhan mereka.

*Subsidi membuat pinjaman komersial kalah bersaing dan keluar dari pasar (crowd out), khususnya di segmen mikro. Mengingat bahwa tingkat suku bunga KUR yang jauh di bawah harga pasar yang berlaku, dan bahwa satu bank tunggal (BRI) yang mendominasi segmen mikro, lembaga keuangan yang tidak ikut serta dalam program KUR akan merasa sulit untuk bersaing. Menurut para pelaku pasar, KUR tidak hanya ditawarkan kepada mereka yang belum memiliki *credit record*, tetapi dalam proporsi yang besar ditawarkan juga kepada para nasabah yang sudah berulang kali meminjam dan para peminjam yang sebelumnya telah mengakses pinjaman bersubsidi – yang menimbulkan keraguan tentang fitur tambahan (*additionality*) yang dihasilkan oleh program KUR ini di pasar. Ada risiko bahwa bank akan*

⁵⁹ Lihat Bank Dunia dan *FIRST Initiative* (2015)

menyalurkan pinjaman bersubsidi KUR kepada para UMKM yang dapat memberikan informasi yang paling memenuhi syarat mengenai kelayakan kredit mereka (umumnya UMKM yang telah menerima pinjaman bank), sedangkan lembaga keuangan yang tidak memiliki akses terhadap KUR melayani UMKM yang memiliki risiko yang lebih tinggi dengan lebih sedikit informasi. Dalam jangka panjang, akan sulit bagi penawaran pinjaman komersial untuk bersaing di pasar pinjaman mikro (tingkat suku bunga pasar pinjaman komersial biasanya antara 20 sampai 26 persen), dan mungkin akan keluar dari pasar.

Bagi UMKM, akses berkelanjutan terhadap pinjaman biasanya lebih penting dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Hasil wawancara dengan perwakilan bank dan UMKM, dan dari penilaian kredit mikro, mengkonfirmasi bahwa pinjaman KUR bersubsidi memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan UMKM sebesar hanya 3 persen atau kurang; sedangkan peningkatan pendapatan hanya dari akses untuk pinjaman dan investasi yang tepat sering lebih dari 20 persen.

Suku bunga KUR saat ini tidaklah mandiri secara finansial, dan tidak akan mandiri dalam waktu dekat. Di sektor keuangan mikro, langkah-langkah swasembada keuangan sejauh pendapatan usaha (pembayaran bunga) suatu lembaga menutup biayanya yang disesuaikan, dengan tiga penyesuaian utama yang dilakukan terhadap biaya subsidi dana, subsidi dalam bentuk natura (*in kind*), dan inflasi.⁶⁰ Tingkat suku bunga bersubsidi KUR yang sebesar 9 persen hanya memungkinkan bank untuk memenuhi sebagian kecil dari biaya mereka di segmen keuangan mikro, baik saat ini maupun untuk tahun mendatang. Dengan demikian, penawaran pada tingkat suku bunga seperti itu tidak akan layak secara komersial dalam jangka menengah, dan Pemerintah harus membayar subsidi secara berulang, jika Pemerintah berusaha untuk mempertahankan tingkat suku bunga tersebut.

Subsidi bunga adalah suatu bentuk bantuan yang bersifat regresif. Total subsidi yang dibayar oleh Pemerintah meningkat secara linear dengan besarnya jumlah pinjaman. Jika pinjaman yang lebih besar cenderung berhubungan dengan bisnis yang lebih besar dan lebih sukses, ini berarti bahwa bantuan Pemerintah adalah bersifat regresif (yaitu, persentase dari bantuan Pemerintah lebih besar yang disalurkan untuk usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha kecil). Program KUR baru ini agak sedikit meringankan masalah ini dengan menyediakan subsidi yang lebih tinggi bagi perusahaan mikro dibandingkan dengan perusahaan kecil atau menengah, dan dengan membatasi jumlah pinjamannya.

e. Kesimpulan dan saran

KUR adalah program intervensi yang besar dengan biaya fiskal yang signifikan...

Program KUR telah berkembang menjadi mekanisme yang dominan dari Pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia. Selama berlangsungnya desain ulang utama pada tahun 2015, fokus KUR berubah dari memfasilitasi akses ke pinjaman bagi UMKM peminjam yang baru pertama kali melakukan peminjaman melalui pemberian jaminan kredit parsial, menjadi penyediaan pinjaman dengan tingkat suku bunga bersubsidi kepada UMKM, terlepas dari akses terhadap pembiayaan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Desain ulang ini telah menyebabkan peningkatan sepuluh kali lipat dalam biaya program kepada Pemerintah, baik dari segi subsidi langsung maupun tidak langsung, yang jumlahnya hingga sebesar Rp 12,3 triliun per tahun selama 2016-2017. Sementara itu penting bagi Pemerintah untuk mengkhususkan sumber daya yang substansial untuk sektor

⁶⁰ lihat Rosenberg, Richard (2009)

keuangan UMKM; ada banyak alasan untuk meragukan bahwa subsidi suku bunga adalah instrumen yang paling tepat dan berkelanjutan secara fiskal untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi segmen pasar ini.

...tetapi subsidi suku bunga bukanlah mekanisme yang efisien untuk mendukung UMKM...

Pertama, wawancara dengan para pemangku kepentingan di Indonesia dan pengalaman global menunjukkan bahwa akses berkelanjutan terhadap pinjaman biasanya lebih penting untuk UMKM dibandingkan dengan suku bunga yang lebih rendah. Kedua, ada banyak bukti internasional⁶¹ yang menunjukkan bahwa biaya dari pembiayaan bersubsidi biasanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Ketiga, ada risiko besar bahwa lingkungan yang kompetitif untuk pinjaman UMKM akan lumpuh, sementara kemampuan jangka panjang dari sektor keuangan untuk menawarkan pinjaman komersial bagi para peminjam tersebut sangat terhambat. Keempat, tingkat suku bunga KUR saat ini menyimpang secara signifikan dari tingkat suku bunga pasar, dan tidak berkelanjutan secara finansial. Mengingat serapan besar dari program ini, anggaran fiskal terkuras secara substansial dan ini akan terus terjadi.

...oleh karena itu, Pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR baru memiliki pembenaran atas peningkatan substansial dalam biayanya...

Kecuali manfaat yang signifikan dari program KUR dapat didokumentasikan dengan baik, ada kebutuhan yang tinggi untuk mempertimbangkan kembali penggunaan pinjaman bersubsidi untuk mendukung UMKM, mengingat biayanya. Secara khusus, Pemerintah harus mempertimbangkan apakah manfaat tambahan dari program KUR baru ini memiliki pembenaran atas peningkatan yang besar dalam biaya, atau apakah fokus pada instrumen-instrumen lainnya yang sudah teruji dan secara fiskal layak — seperti jaminan kredit parsial berikut dengan penguatan infrastruktur keuangan (sistem kredit informasi, pendaftaran agunan, dll) — dapat mendukung sektor UMKM dengan biaya yang jauh lebih rendah. Penargetan yang lebih terfokus dari subsidi bunga dan jaminan kredit kepada UMKM dengan akses sangat terbatas ke pembiayaan (seperti peminjam pertama kali, UMKM di daerah terpencil, atau UMKM di sektor-sektor prioritas yang kurang mendapat perhatian (*underserved*) juga dapat meningkatkan efisiensi program.

... terutama mengingat batasan fiskal yang ada saat ini

Pengeluaran Pemerintah untuk subsidi suku bunga dilakukan dengan mengorbankan pengeluaran di bidang-bidang intervensi prioritas lainnya, terutama mengingat kendala untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dan (menurunkan) defisit anggaran, setidaknya dalam jangka menengah. Bank Dunia (2017c) mencatat bahwa sektor-sektor prioritas yang kekurangan pendanaan di Indonesia (sektor-sektor di mana tambahan belanja publik dapat memiliki dampak terbesar pada kemiskinan dan pertumbuhan) meliputi infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial.

⁶¹ Lihat misalnya: ADB (2009) dan World Bank (2008)

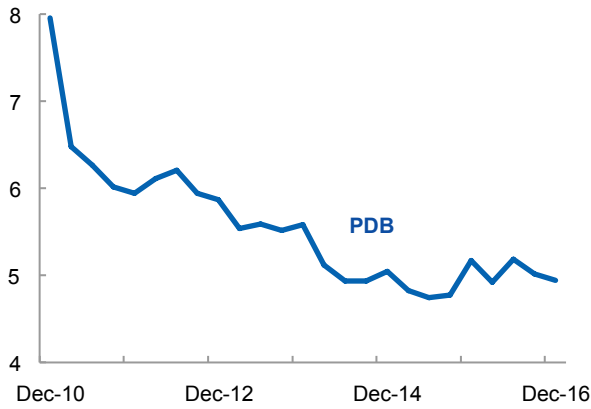
Referensi

- ADB (Asian Development Bank). 2009. *Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs' Key Indicators for Asia dan the Pacific*. Manilla: Asian Development Bank.
- ADB. 2017. *Meeting Asia's Infrastructure's Needs*. Manilla: Asian Development Bank.
- Arnold, J., B. Javorcik, M. Lipscomb dan A. Mattoo. 2016. "Services reform and manufacturing performance: Evidence from India." *Economic journal* 126 (590).
- Arnold, J., B. Javorcik, dan A. Mattoo. 2006. "Does services liberalization benefit manufacturing firms? Evidence from the Czech Republic." Policy research working paper 4109, The World Bank.
- Basker, E. dan M. Noel. 2009. "The evolving food chain: Competitive effect of Wal-Mart's entry into the supermarket industry." *Journal of economics and management strategy*, vol 18 issue 4, pages 977-1009.
- Bank Indonesia. 2017. *Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Triwulan IV 2016*, February. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2017. Press Release: *BI 7-Day Reverse Repo Rate Held at 4.75% Maintaining Stability, Supporting Economic Recovery Amid Global Uncertainty*. http://www.bi.go.id/en/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_190617.aspx
- Badan Kebijakan Fiskal. 2017. *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, dan Fiskal 2016: Titik Balik Perekonomian Indonesia*, Edisi I/Maret 2017. Jakarta: BKF
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. <https://www.ekon.go.id/ekliping/view/bahan-paparan-dalam-kegiatan.2886.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). February 2017. "Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2016 Menurun" Jakarta: BPS
- C. Constatntinescu, A. Mattoo, dan Michele R. 2016. "Trade developments in 2015: Policy Uncertainty weighs on global trade." *Global trade watch*, Mar 09, 2016. World Bank working paper
- Detik.com. January 12, 2017. <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3394206/kementerian-pupr-sudah-lelang-proyek-rp-33-t-awal-2017>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2017. <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>
- DJJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan). 2017a. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1805/Government-debt-securities-auction-result-DJJPPR>
- DJJPPR. 2017b. Government Securities Management. <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/loadViewer?idViewer=6861&action=download>
- Duggan, V., S. Rahardja dan G. Varela. 2013. "Service sector reform and manufacturing productivity: Evidence from Indonesia." Policy Research Working Paper 6349, World Bank, Washington DC.
- European Central Bank. 2006. "Competition, productivity and prices in the Euro area services sector", Occasional Paper Series no. 44.
- IIF. 2017. *February 2017 Capital Flows to Emerging Markets*. <https://www.iif.com/publication/capital-flows-emerging-markets-report/february-2017-capital-flows-emerging-markets?destination=node/10629>
- Long Finance. September 2016. "The Global Financial Centres Index 20". Accessed on 9 March 2016 at: <http://www.longfinance.net/programmes/global-financial-centres-index.html>
- Macquarie Research. January 2017. *Commodities Compendium— Politics, Profits and protectionism*. New York: Mcquarie Group:

- Malaysia Crude Palm Oil Council. <http://www.mpoc.org.my>
- Maya Iriyanti, Maya dan Azib, Anton Mulyono. 2012. *Barrier Factors dan Potential Solutions for Indonesian SMEs*. International Conference on Small and Medium Enterprises Development with a Theme “Innovation and Sustainability in SME Development.” ICSMED.
- Ministry of Health. 2017. retrieved on Jan 9, 2017 from <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=1592&id=quovadis-pengembangan-teknologi-di-rumah-sakit-pendidikan-untuk-menuju-world-class-hospital.html>
- New Zealand Productivity Commission. 2014. “Boosting productivity in the services sector”, Auckland: New Zealand.
- Reuters. January 9, 2017. <http://www.reuters.com/article/us-thailand-floods-idUSKBN14T0F8>
- Reuters. February 24, 2017. <http://www.reuters.com/article/indonesia-economy-autos-idUSJ9N1FN00H>
- Rosenberg, Richard. 2009. *Measuring Results of Microfinance Institutions - Minimum Indicators That Donors and Investors Should Track*. A C-Gap Technical Guide.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. <http://setkab.go.id/en/president-jokowi-appreciates-new-funding-schemes-for-development-projects/>
- Trapani J.M. dan C. V. Olson. 1982. “An analysis of the impact of open entry on price and the quality of service in the airline industry.” *The review of economics and statistics*, vol 64, issue 1, pages 67-76.
- World Bank and FIRST Initiative. 2015. *Principles for Public Credit Guarantee Schemes for SMEs*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2008. *Finance for all: policies and pitfalls in expanding access*. World Bank Policy report.
- World Bank. 2015a. *Indonesia’s Rising Divide*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2015b. *Indonesia Economic Quarterly: In Times of Global Volatility*. Jakarta: World Bank
- World Bank. 2016a. *Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2016b. *Indonesia Economic Quarterly: Pressure Easing*, October. Jakarta: World Bank
- World Bank. 2017a. *Global Economic Prospects: Weak Investment in Uncertain Times*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. 2017b. *Commodity Markets Outlook: Investment Weakness in Commodity Exporters*. January. Washington, DC: World Bank
- World Bank. 2017c. *Indonesia Economic Quarterly: Sustaining Reform Momentum*, January. Jakarta: World Bank
- World Bank. 2017d. *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017>
- World Bank trade in services database. <http://data.worldbank.org/data-catalog/trade-in-services>

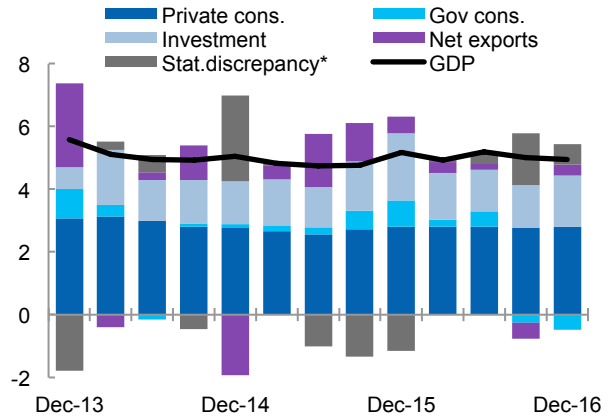
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil
(pertumbuhan triwulanan yoy, persen)



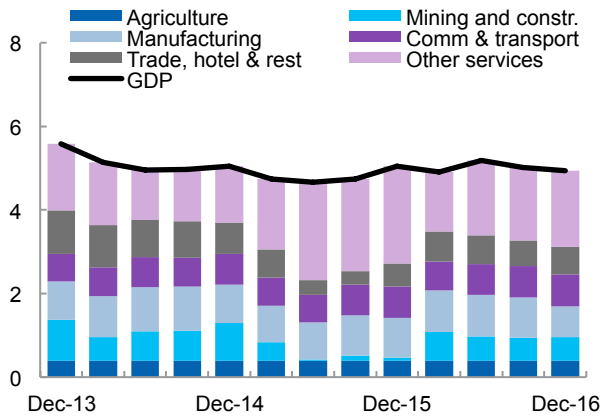
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



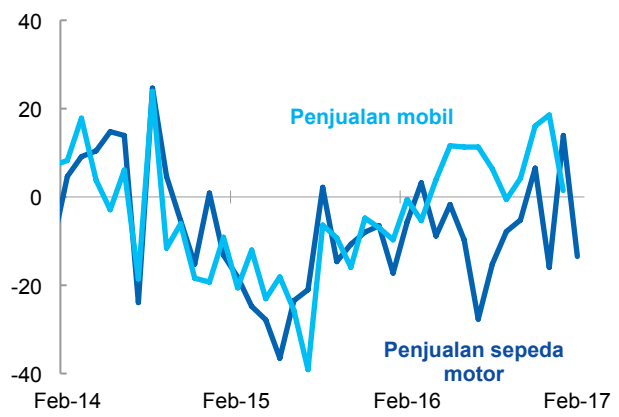
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: *sudah termasuk perubahan inventori

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase)



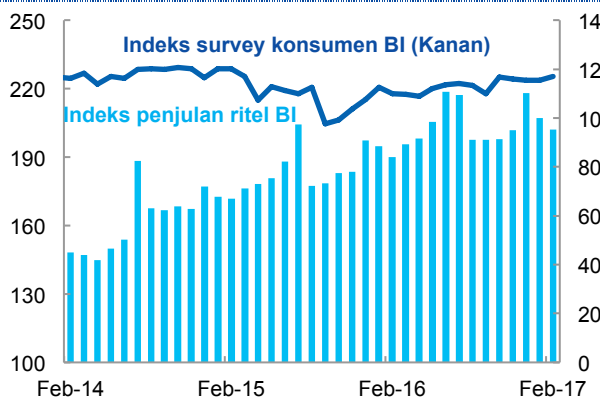
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor
(pertumbuhan yoy, persen)



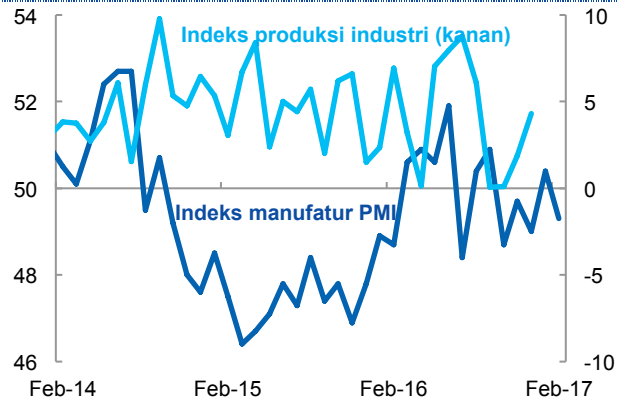
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(tahun dasar penjualan eceran 2010=100)



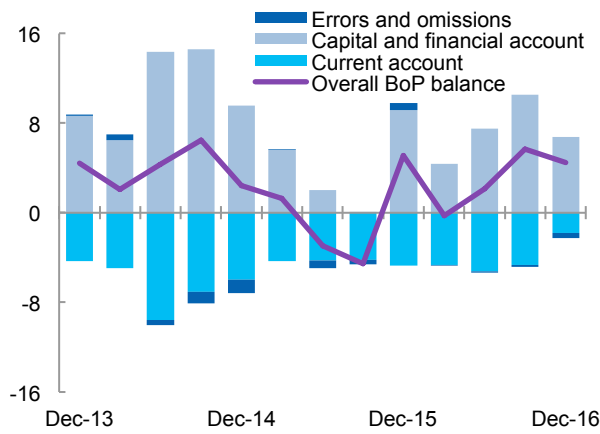
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI
(indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen)



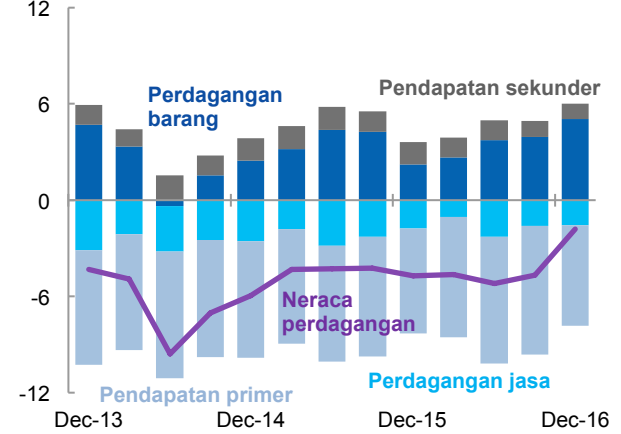
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran
(USD miliar)



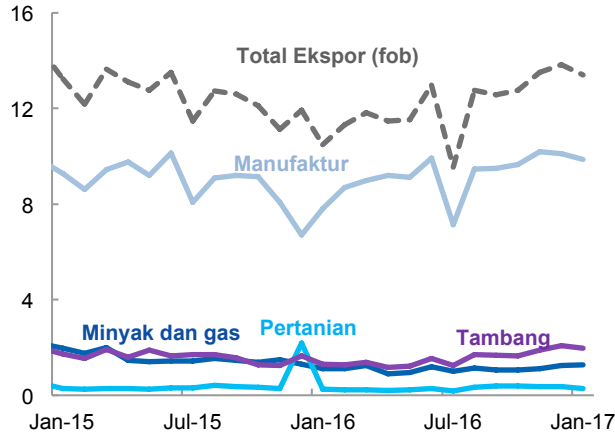
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



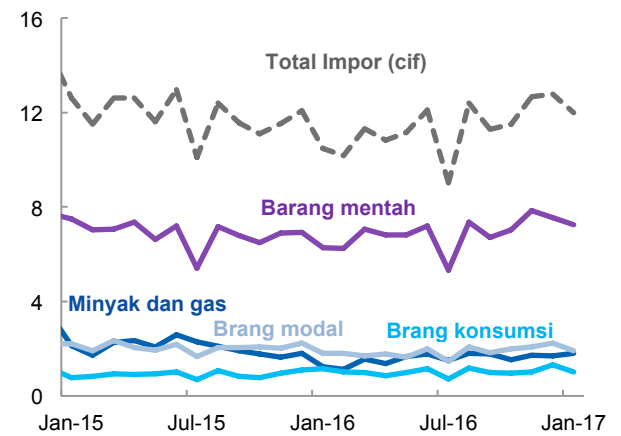
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(USD miliar)



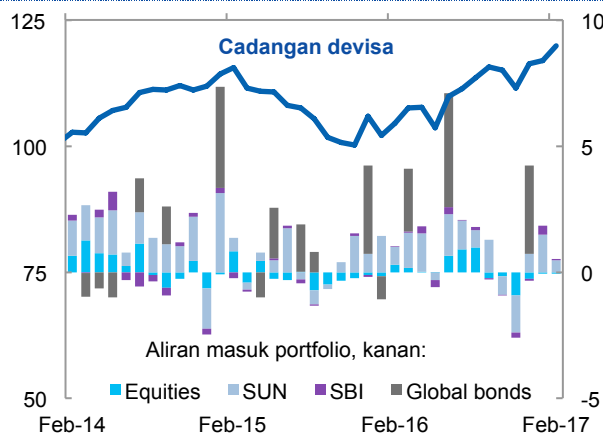
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(USD miliar)



Sumber: BPS

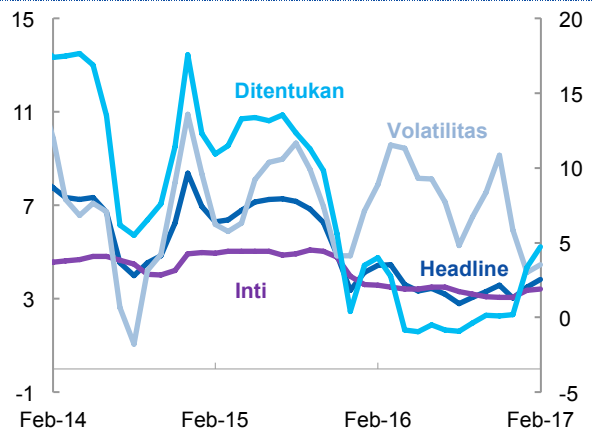
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal
(USD miliar)



Sumber: BI; Ministry of Finance (MoF)

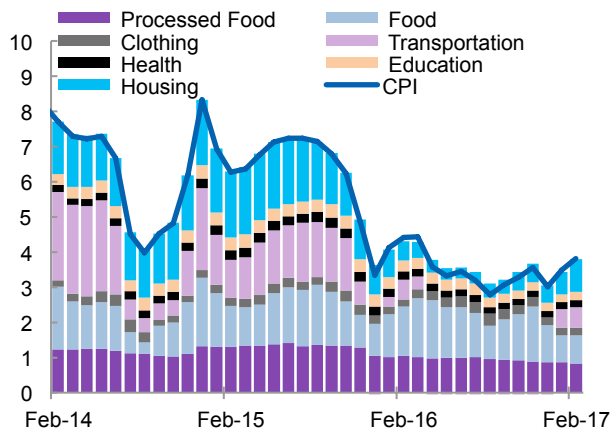
Catatan: SUN adalah Surat Utang Negara, SBI adalah sertifikat BI

Lampiran Gambar 12: Inflasi
(pertumbuhan yoy, persen)



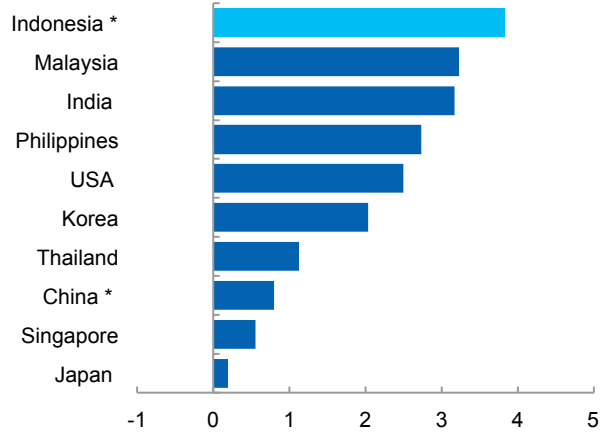
Sumber: BPS; BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



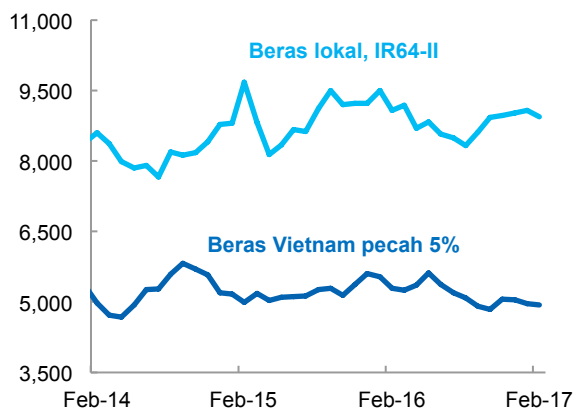
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara
(pertumbuhan yoy, persen)



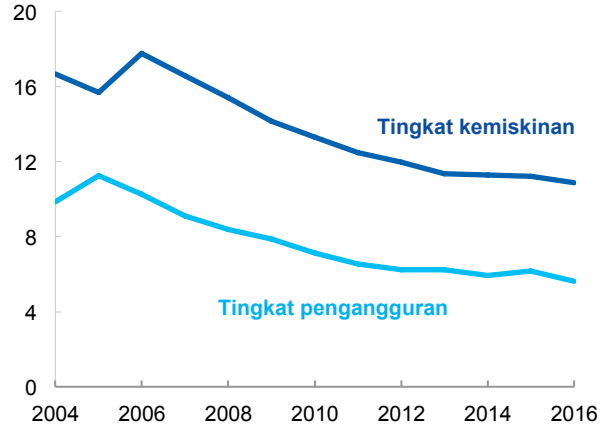
Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * February 2017; yang lain Januari.

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional
(harga kulakan, IDR per kg)



Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO
Catatan: "5% pecah" merujuk ke kualitas penggilingan beras. 5 persen proporsi biji terpecah selama tahap penggilingan proses.

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran
(persen)



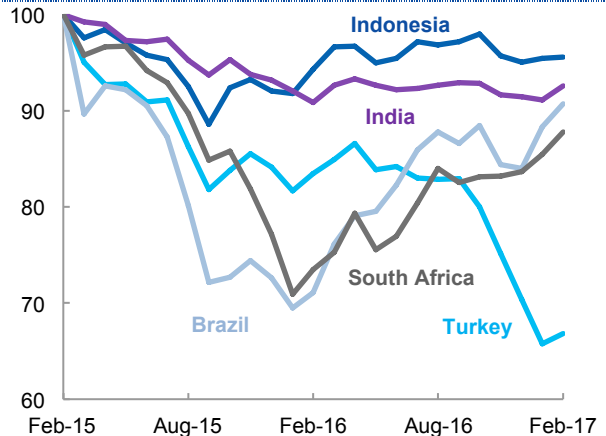
Sumber: BPS
Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional
(indeks harian, Maret 10, 2015=100)



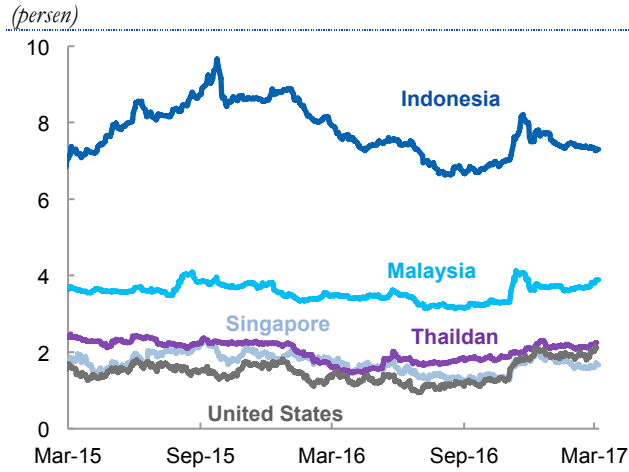
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS
(indeks bulanan, Februari 2015=100)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

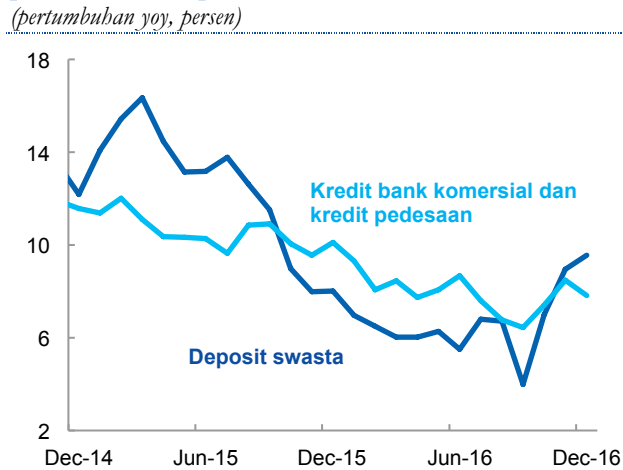
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal



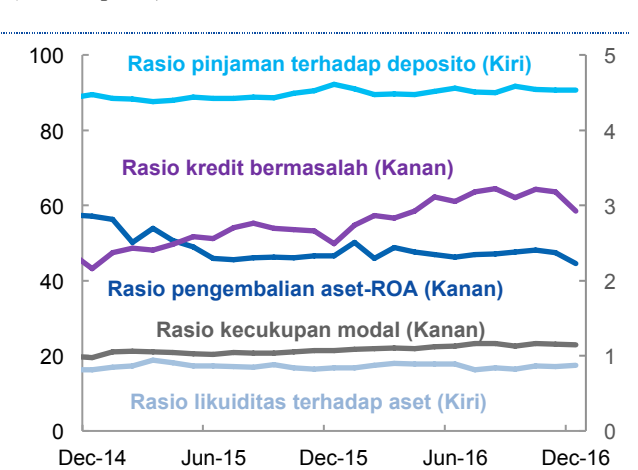
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS kelompok negara-negara EMBIG Global



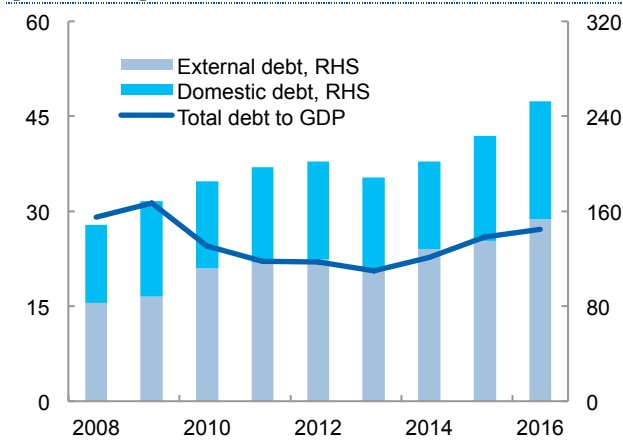
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito



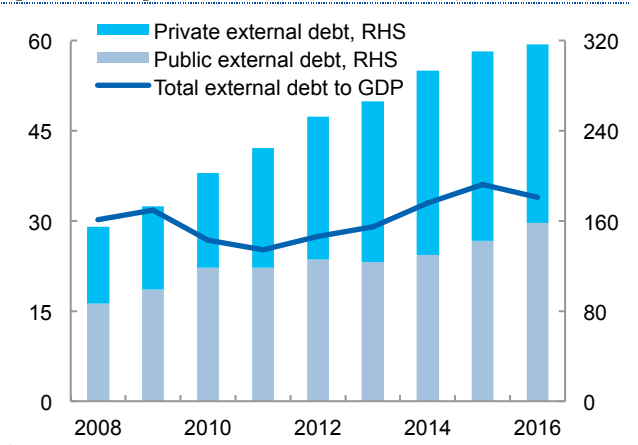
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan



Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah



Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri



Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah

(triliun Rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi Sementara	APBN
A. Penerimaan dan hibah	1,338	1,439	1,550	1,508	1,552	1,750
1. Penerimaan pajak	981	1,077	1,147	1,240	1,284	1,499
2. Penerimaan non-pajak	352	355	399	256	262	250
B. Pengeluaran	1,491	1,651	1,777	1,807	1,860	2,080
1. Pemerintah pusat	1,011	1,137	1,204	1,183	1,149	1,316
2. Transfer ke pemerintah daerah	481	513	574	623	711	765
C. Neraca utama	-53	-99	-93	-142	-125	-109
D. SURPLUS / DEFICIT	-153	-212	-227	-298	-308	-330
(persen dari PDB)	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5	-2.4

Sumber: MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: *Budget balance* sebagai persentase dari PDB menggunakan PDB yang direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan.

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2014	2015	2016	2015		2016			
				Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Neraca Pembayaran	15.2	-1.1	12.1	-4.6	5.1	-0.3	2.2	5.7	4.5
<i>Persen dari PDB</i>	1.7	-0.1	1.3	-2.1	2.4	-0.1	0.9	2.3	1.9
Neraca berjalan	-27.5	-17.5	-16.3	-4.2	-4.7	-4.7	-5.2	-4.7	-1.8
<i>Persen dari PDB</i>	-3.1	-2.0	-1.8	-2.0	-2.2	-2.1	-2.3	-1.9	-0.8
Neraca perdagangan	-3.0	5.4	8.9	2.0	0.5	1.6	1.5	2.3	3.5
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24.5	-22.9	-25.3	-6.2	-5.2	-6.3	-6.7	-7.0	-5.3
Neraca modal & keuangan	44.9	16.9	29.2	0.1	9.2	4.4	7.5	10.6	6.8
<i>Persen dari PDB</i>	5.0	2.0	3.1	0.0	4.3	2.0	3.3	4.3	2.8
Investasi langsung	14.7	10.7	15.1	1.6	2.8	3.1	3.3	6.5	2.2
Investasi porfolio	26.1	16.2	18.9	-2.2	4.3	4.4	8.3	6.5	-0.4
Investasi lain	4.3	-10.1	-4.8	0.4	2.3	-3.1	-4.0	-2.5	4.8
Kesalahan & pembulatan	-2.2	-0.4	-0.8	-0.4	0.6	0.0	-0.1	-0.2	-0.4
Cadangan devisa*	111.9	105.9	116.4	101.7	105.9	107.5	109.8	115.7	116.4

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode.

Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Neraca Nasional (% perubahan)¹								
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.7
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.4	-2.3
Investasi (% PDB)	20	31	31	33	5.0	4.4	5.0	4.5
Nominal PDB (USD miliar)	165	755	893	918	915	891	861	933
PDB per kapita (USD)	857	3,167	3,688	3,741	3,528	3,442	3,329	3,603
Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)²								
Penerimaan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	..
Penerimaan bukan pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	..
Penerimaan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.7	..
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	..
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	..
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	..
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	..
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	..
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	..
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	26.8	..
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	11.9	..
Total utang luar negeri (juga utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.0	..
Neraca Pembayaran (% PDB)³								
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.8	23.0	22.5	22.3	19.9	18.1
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.2	22.7	19.3	17.1
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	1.0
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.1
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.6
Cadangan devisa bruto (USD miliar)	29.4	96.2	110.1	112.8	99.4	111.9	105.9	116.4
Moneter (% perubahan)³								
Deflator PDB ¹	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	6.9	6.5	4.7	6.0	7.9	7.6	7.2
Kredit domestik	..	22.8	24.6	23.1	21.6	11.6	10.4	..
Nilai tukar Rupiah/USD (rata-rata)	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,869	13,389	13,300
Harga-harga (% perubahan)¹								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0
Indeks harga konsumen (rata-rata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5
Harga minyak mentah Indonesia (USD per barel) ⁴	28	79	112	113	107	60	36	51

Sumber: 1 BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dan rebased, 2 MoF dan Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kependudukan¹								
Penduduk (juta)	213	242	245	248	251	254	258	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	42	50	51	51	52	53	53.7	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	49	49.0	..
Angkatan Kerja²								
Angkatan kerja, total (juta)	98	117	117	120	120	122	122	125
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	45	38	36	35	35	34	33	32
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	31	30	29	28	28	29	28
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9
Di perkotaan	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8
Di perdesaan	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8
GINI indeks	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	..	0.40	0.40	0.39	0.59	0.53	0.59	0.60
Kesehatan dan Gizi¹								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.16	0.29	..	0.20
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	30	29	28	27	..
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	14	14	..
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	41	27	26	25	24	24	23	..
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	74	78	80	85	84	77	69	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	2.0	2.9	2.7	2.9	2.9	2.8
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	0.7	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1
Pendidikan³								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	92	92	93	92	93	97	97
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	61	60	60	61	65	66	66
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	16	14	15	16	18	20	21
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	53	50	54	54	55	56	55
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) ⁵	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.0
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) ⁵	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	78	85	85	86	86	87	87	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	93	93	94	94	94	94	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	68	76	77	77	78	79	80	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	44	57	58	59	60	61	61	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	64	70	71	71	72	72	72	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	30	44	45	46	47	48	48	..
Lainnya¹								
Pengurangan risiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik)	3.3
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8	18	18	19	19	17	17	20

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan Bank Dunia; ⁴ MoF, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya mencakup belanja pada Raskin, Askes, Beasiswa untuk keluarga miskin, dan PKH dan realisasi; ⁵ MoF; ⁶ Inter-Parliamentary Union



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
(SEMEFPA) program.